

**PROSES JURNALISME LINGKUNGAN HIDUP DI SURAT
KABAR**

**(Studi Deskriptif Pada Redaksi Riau Pos Tentang Pemberitaan
Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2017)**

TESIS



**Diajukan Untuk Syarat Memperoleh Gelar *Master
Of Arts (M.A)* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gajah Mada Yogyakarta**

Oleh :

Wininda Qusnul Khotimah

15/388852/PSP/27149

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PROSES JURNALISME LINGKUNGAN HIDUP DI SURAT KABAR
(Studi Deskriptif Pada Redaksi Riau Pos Tentang Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017)

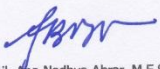
Dipersiapkan dan disusun oleh

Wininda Qusnul Khotimah
(15/388852/PSP/05457)

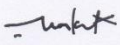
Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 31 Mei 2017

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

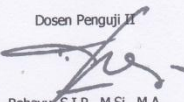
Pembimbing Utama


Dr. Phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S.
195902201988031002

Dosen Penguji I


Novi Kurnia, M.Si., M.A., Ph.D.
196911042002122001

Dosen Penguji II


Rahayu, S.I.P., M.Si., M.A.
197207101998032004

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Master
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Novi Kurnia, M.Si., M.A., Ph.D.
196911042002122001

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wininda Qusnul Khotimah

NIM : 15/388852/PSP/27149

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Tesis : Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup Di Surat Kabar (Studi Deskriptif Pada Redaksi Riau Pos Tentang Pemberitaan Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2017)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian tesis saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan karya tesis oleh orang lain, atau pelanggaran etika lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Gadjah Mada.
2. Karena itu, tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain. Apabila kemudian hari ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa tesis ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta, Juni 2017



Wininda Qusnul Khotimah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, penguasa alam semesta, atas kesempatan yang diberikan untuk kembali menempuh ilmu di Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, UGM, Yogyakarta. Tesis yang berjudul “*Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup Di Surat Kabar ; Studi Deskriptif Pada Redaksi Riau Pos Tentang Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017*” menjadi syarat mencapai derajat Sarjana S2 yang telah saya selesaikan dengan bimbingan ilmu, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Dr. phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S.**, dosen pembimbing sejak semester tiga di perkuliahan seminar proposal sampai selesai berbentuk Tesis. Terima kasih atas arahan, petunjuk, coret-coretan, dan waktunya.
2. **Rahayu, S.IP., M.Si., M.A** dosen sejak semester satu yang sangat ramah juga ternyata menjadi dosen penguji ketika ujian Tesis. Terima kasih atas masukan dan saran-sarannya selama penelitian ini dilakukan.
3. **Novi Kurnia, M.Si., M.A., Ph.D.**, dosen penguji sekaligus Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi UGM atas arahan sistematisasi pada Tesis saya.
4. Seluruh dosen S2 Ilmu Komunikasi yang sudah berbagi ilmu selama masa perkuliahan saya di UGM sejak September 2015.
5. Riau Pos Grup, sekretariat redaksi dan tim redaksi yang sangat memudahkan peneliti untuk mengakses berbagai macam data dan terutama mengizinkan untuk melakukan penelitian di Redaksi Riau Pos.
6. Narasumber penelitian di Riau Pos yaitu pemimpin redaksi pak **Asmawi Ibrahim**, pemimpin riapos.co mas **Hary B.K**, para redaktur di ruang redaksi **Firman Agus, Edwar Yaman**, dan **Furqon LW**, Koordinator liputan abang **Desriandi Candra, Muslim**, dan **Abu Kasim**, Para reporter dan layouter bang **Rizal**, bang **Ali Nurman**, bang **Agustiar**, bang **Fathra Nazrul Islam**, bang **Eka Gusmadi P**, bang **Mario Kisaz**, kak **Kunni Masrohanti**, mas **Didik Hermanto**

terutama yang membantu sejak pra penelitian, tidak lupa juga kak **Rike** di sekretariat redaksi. Terima kasih atas informasi yang diberikan dan waktunya karena sering ditemui, mengizinkan berada di redaksi selama berminggu-minggu, bahkan bersedia diikuti ketika liputan, juga terimakasih atas kesediaannya berkomunikasi melalui *whatsApp* dan juga dihubungi via *e-mail*.

7. Terima kasih tak terhingga untuk MAMA (Dra. Intartik) dan AYAH (Drs. Heri Winarto) , juga Winindi atas do'a dan segala yang telah diberikan untuk mendukung pendidikan dan kehidupan ananda. Tesis ini untuk mama dan ayah yang selalu dalam do'aku.

8. Terimakasih untuk Kak Pela, ibu dan bapak. Yang sangat menolong ketika berada di Riau, memberi kenangan yang indah ketika di Pekanbaru dan juga di Padang selama penelitian dilakukan.

9. Untuk RAINBOW, KELUARGA BUAH dan KATRO (Agung, Opik, Fara, Bella, Heni, Restu, Dio, Takwim, Faried) Teman-teman yang tidak lagi dekat jaraknya, namun selalu menjadi penyegar yang dekat, segar dalam canda, dan terasa hangat di hati , dikala terasa penat dengan berbagai aktivitas dan menyelesaikan tugas perkuliahan.

10. PELIPUR LARA (Intan, Uni, Nuril) di Jogja, yang selalu saling dukung dalam menyelesaikan tugas-tugas selama perkuliahan, menjadi motivator dadakan, dan selalu membuat untuk terus belajar dan belajar untuk mengejar impian. *Stay hungry stay foolish* :D

11. Teman-teman di kos jogja Mawad, kak Ani, Neni, Eta, dan mbak Yuni yang selalu menjadikan Jogja terasa nyaman buat berteman. Juga untuk Ibu dan Bapak Kos dengan nasihat baiknya.

Yogyakarta, Juni 2017

Wininda Qusnul Khotimah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTARCT	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 <i>Literature Review</i>	6
1.6 Kerangka Pemikiran	
1.6.1 Praktik Jurnalisme Lingkungan Hidup	8
1.6.2 Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup Dalam Surat Kabar	11
1.6.2.1 Berita Lingkungan Hidup dalam Kebijakan <i>News Room</i>	15
1.6.2.2 Jurnalis Lingkungan Hidup	17
1.7 Kerangka Operasional	21
1.8 Metodologi Penelitian	
1.8.1 Metode Penelitian	22
1.8.2 Subjek Penelitian	23
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data	24
1.8.4 Teknik Analisis Data	25
1.8.5 Sistematika Penulisan	26
1.8.5 Limitasi Penelitian	26

BAB II PROSES JURNALISME LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU POS

2.1 Pengantar	27
2.2 Pembagian Tugas di Redaksi	27
2.3 Mekanisme Pemberitaan di Redaksi	29

2.3.1 Forum: Proyeksi dan Evaluasi	32
2.3.2 Penentuan Isi Berita Lingkungan	34
2.3.3 Menentukan Kelayakan Berita Lingkungan.....	37

BAB III EDITORIAL MIX: PADUAN REDAKSI RIAU POS TENTANG BERITA KARHUTLA

3.1 Pengantar	44
3.2 Paduan Penulisan dan Arah Peliputan	44
3.3 Halaman Untuk Karhutla	47
3.3.1 Karhutla Minggu	48
3.3.2 Karhutla Harian	52
3.4 Editorial : Sikap Riau Pos Terhadap Isu Karhutla	56

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Pengantar.....	62
4.2 <i>News Planning</i> Redaksi Riau Pos	63
4.2.1 Karhutla Minggu yang Terkonsep.....	65
4.2.2 Proyeksi : <i>Listing</i> Karhutla yang Tidak Selalu Ada di Harian	69
4.2.3 Evaluasi : Berita Karhutla yang Kecolongan	71
4.3 <i>News Gathering</i> Oleh Wartawan Riau Pos	73
4.3.1 Rilis dan Konferensi Pers Sebagai Sumber Utama	77
4.4 <i>News Writing</i> : Penulisan Karhutla Sebelum Naik Cetak	79
4.4.1 Karhutla Minggu yang Lebih Dalam.....	85
4.4.2 Penulisan Karhutla Secara Akomodatif	87
4.4.3 Berita Karhutla yang Tidak Pesimistis	90
4.5 <i>News Editing</i> : Proses Penyuntingan Berita Karhutla	92
4.5.1 Redaksional : Penyuntingan Hanya Pada Judul Berita	95
4.6 <i>News Publishing</i> : Karhutla Riau Pos yang Naik Cetak	99
4.6.1 Ruang Karhutla Masih Terbatas.....	106

4.6.2 Berita Karhutla yang Selalu Mengakomodir Kerja Pemerintah	108
4.7 Faktor yang Mempengaruhi Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup di Riau Pos	111

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran dan Rekomendasi	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	128
----------------------	------------

DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR

Bagan 1.1 Struktur Redaksional Ruang Pemberitaan	15
Bagan 1.2 Alur Kerja Penelitian Proses Jurnalisme Lingkungan	21
Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep	21
Tabel 1.4 Daftar Narasumber	23
Bagan 2.1 Tahapan Pemberitaan Dalam Ruang Redaksi Riau Pos	29
Gambar 2.2 Tahapan Tugas Pemberitaan Dalam Surat Kabar	30
Gambar 2.3 Rapat harian redaksi Riau Pos.....	32
Gambar 2.4 Rapat gabungan Redaksi Riau Pos.....	33
Gambar 2.5 Dummy Standar Riau Pos dengan Format Kekirian	39
Gambar 2.6 Proses Penyajian Berita Pada Dummy Standar Koran Tiga	40
Gambar 2.7 Berita yang Sudah di <i>Layout</i>	41
Gambar 2.8 Pengecekan Berita Karhutla	42
Gambar 2.9 Pengeditan Berita Dengan Kertas Berukuran Folio	43
Gambar 3.1 Berita Karhutla Pada Rubrik <i>Save The Earth</i>	50
Gambar 3.2 Berita Karhutla Pada Halaman <i>For Us</i>	50
Gambar 3.3 Berita Karhutla Pada Halaman Liputan Khusus	51
Gambar 3.4 Berita Karhutla Halaman Internasional.....	53
Gambar 3.5 Berita Karhutla Halaman Pro Otonomi	53
Gambar 3.6 Berita Karhutla Halaman Metropolis	54
Gambar 3.7 Berita Karhutla Halaman Nasional	54
Gambar 3.8 Tajuk Rencana Riau Pos	59

Gambar 4.1 Berita Karhutla TNTN Oleh Tribun Pekanbaru	72
Tabel 4.2 Penyuntingan Judul berita.....	96
Gambar 4.3 Berita Karhutla “Restorasi Gambut, Seluas 400 Ribu Ha”	99
Tabel 4.4 Daftar Poses Pemberitaan “Tahun Ini, Restorasi Gambut 400 Ribu Ha”	100
Gambar 4.5 berita karhutla “Pangdam Siap Kirim Pasukan”	101
Tabel 4.6 Daftar Poses Pemberitaan “Pangdam Siap Kirim Pasukan”	101
Gambar 4.7 berita karhutla “Pesawat Tempur Pantau <i>Hotspot</i> ”	103
Tabel 4.8 Daftar Poses Pemberitaan “Pesawat Tempur Pantau <i>Hotspot</i> ”	103
Gambar 4.9 berita karhutla”Waspada Sebelum Membara”	105
Tabel 4.10 Daftar Poses Pemberitaan “Waspada Sebelum Membara”	105

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau merupakan permasalahan lingkungan hidup yang sudah ada sejak tahun 1997/1998 bahkan berlanjut hingga tahun 2017. Pemberitaan mengenai karhutla adalah persoalan lingkungan hidup yang menjadi perhatian utama oleh surat kabar Riau Pos. Sehingga, Riau Pos mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Riau sebagai media yang berperan dalam mendukung operasi penanganan karhutla pada tahun 2016. Penghargaan yang didapat tentunya tidak terlepas dari bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. Olehnya, masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos dalam pemberitaan karhutla pada tahun 2017? Melalui metode kualitatif, penelitian ini disajikan dan dianalisis secara deskriptif mengenai proses pemberitaan karhutla di Riau Pos. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos dalam pemberitaan karhutla masih belum optimal. Meskipun ruang pemberitaan untuk karhutla selalu diberikan oleh Riau Pos, namun isi dari pemberitaan masih terbelah hanya dikulitnya saja terutama pada koran harian. Jurnalis Riau Pos masih banyak yang tidak memiliki latar belakang ilmiah dan juga belum tergabung dalam organisasi profesional wartawan seperti PWI ataupun AJI. Berita karhutla yang dihasilkan tanpa melalui riset terlebih dahulu, berita karhutla banyak mengandalkan sumber elit pemerintah yang dianggap lebih mengerti perihal karhutla dibanding dengan observasi langsung ke lapangan. Deskripsi tentang konsekuensi karhutla masih menjadi topik utama dalam pemilihan *framing* wartawan dan redaktur. Proses penyuntingan yang dilakukan hanya perihal redaksional, untuk mengganti judul dan pengurangan jumlah paragraf agar sesuai dengan *layout* yang sudah dirancang oleh halaman perwajahan. Sehingga, berita karhutla yang dihasilkan masih banyak yang belum memenuhi kaidah jurnalisme lingkungan.

Kata Kunci: Proses, Jurnalisme lingkungan hidup, Berita Kebakaran Hutan dan Lahan, Surat Kabar Riau Pos

ABSTRACT

Forest and land fire in Riau has been an environmental issue since 1997/1998 until 2017. The reporting about forest and land fire is an environmental issue that becomes main concern of Riau Pos News Paper. Therefore, Riau Pos achieved appreciation from provincial government of Riau as a media that took role in supporting the handling of forest and land fire in 2016. The appreciation could not be separated from the process of environmental journalism as the effort to save the environmental. The main problem of the research was how environmental journalism process in Riau Pos in reporting about forest and land fire in 2017? By qualitative method, this research is presented and analyzed descriptively about reporting process of forest and land fire in Riau pos. The result of the research shows that environmental journalism process of Riau Pos in reporting forest and land fire has not been optimal. The report of forest and land fire was produced without investigation, the report of forest and lane fire just depend on source from government elite that was considered knowing more about forest and land fire rather than directly observing to the field. It was because many of them also came from journalists who were not incorporated in professional organizations of journalists such as PWI and AJI. Description about forest and land fire consequences was still the main topic in framing from journalist and editor. Editing process was just conducted about editorial, to change the title and reduce the numbers of paragraphs in order to suit with the layout, which had been designed by the lay outer. So that the news about forest and lane fire had not complied the principle of environmental journalism.

Key Words: Process, Environmental Journalism, Forest and Land Fire News, Riau Pos Newspaper

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jurnalisme lingkungan hidup muncul sebagai salah satu perspektif untuk melihat dan melaporkan realitas lingkungan hidup yang ada di sekitar. Jurnalisme ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya untuk penyelamatan lingkungan hidup. Melalui pemberitaan yang memihak kepada upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan. Melalui berita lingkungan yang dimuat dalam pemberitaan, upaya penyelamatan lingkungan bisa dilakukan. Berita lingkungan yang baik akan menghasilkan pengetahuan yang baik pula bagi masyarakat (Sudibyo, 2014:5). Pada akhir Desember 2016, pemerintah Provinsi Riau memberi penghargaan kepada surat kabar Riau Pos sebagai media yang berperan dan mendukung dalam operasi siaga darurat penanggulangan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2016 (Sumber: Riau Pos edisi Rabu, 28 Desember 2016).

Praktik jurnalisme lingkungan hidup sepertinya sudah lama dan diterapkan oleh Riau Pos dalam meliput kasus lingkungan hidup, hal ini terbukti ketika Riau Pos menasbihkan diri menjadi media cetak lokal yang peduli akan lingkungan hidup dengan menyediakan halaman khusus *For Us* sejak tahun 2009 pada koran edisi Ahad. Berbagai permasalahan lingkungan hidup diangkat dalam pemberitaannya seperti, *illegal logging*, perburuan satwa liar, penghijauan, banjir, kabut asap dan terutama soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kasus karhutla telah ada di Riau sejak tahun 1997, banyak kerugian yang dialami warga Riau selama 19 tahun kemunculan asap akibat karhutla tersebut. Kebakaran terparah sendiri terjadi pada tahun 2015 yang memakan lima korban akibat karhutla tersebut dan 97 warga terkena ispa. Kabut asap yang muncul juga selama berbulan-bulan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya (Wawancara langsung, koordinator Jikalahari 9 Januari 2017). Kebakaran hutan dan lahan ternyata tidak berhenti di tahun 2015 saja, menurut data jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari) terdapat satu orang meninggal akibat karhutla pada tahun 2016

(Jikalauhari.or.id, 30/1/2017). Temuan ini menunjukkan adanya potensi kemunculan karhutla setiap tahunnya di Riau. Sehingga, keterlibatan Riau Pos dalam pemberitaan karhutla menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Sebab, dengan didapatkannya penghargaan dari pemerintah Provinsi dalam penanganan kasus karhutla, menunjukkan bagaimana surat kabar tersebut memberikan perhatian lebih untuk memberitakan persoalan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Pemberitaan mengenai karhutla hingga mendapat penghargaan, tentunya tidak terlepas dari bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan oleh redaksi. Mulai dari peliputan oleh wartawan, penyuntingan oleh redaktur hingga kontrol dari pemimpin redaksi. Proses jurnalisme tersebut tentunya melewati banyak tahapan yang kompleks hingga menjadikan berita karhutla yang baik. Melihat, tidak mudah untuk menyajikan berita lingkungan hidup yang independen juga berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini dikemukakan oleh Abrar (1993), wartawan lingkungan hidup harus memiliki kewaspadaan terhadap idealisme kerja di perusahaan media tempatnya bekerja. Jurnalis lingkungan hidup ialah wartawan umum yang selama peliputan berita akhirnya memiliki ketertarikan yang kuat untuk memberitakan masalah lingkungan hidup (Abrar, 1993:109).

Menurut Aristiarini dalam Atmakusumah 1996, peliputan dan penurunan berita lingkungan hidup di surat kabar lebih sering terhambat oleh kendala internal. Artinya, meskipun berita lingkungan hidup tersebut penting bagi pembaca, namun ketika rapat redaksi tidak diputuskan menjadi berita utama, maka berita penting tersebut akan ditempatkan di bagian dalam surat kabar saja. Kendala internal di sini adalah kebijakan redaksional pemberitaan dan juga jika ada campur tangan pihak manajemen terhadap berita lingkungan hidup. Tidak jarang berita lingkungan hidup yang sebenarnya bermanfaat bagi pembaca tidak bisa terbit karena tidak sejalan dengan keinginan organisasi media. Akhirnya wartawan lingkungan berfikir untuk membuat berita lingkungan yang seadanya saja (Abrar, 1993:32).

Sehingga, penulis melakukan pra-penelitian terlebih dahulu mengenai bagaimana pengalaman mereka membuat berita lingkungan hidup dan dihadapkan

dengan media tempat mereka bekerja. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh jurnalis Tempo kontributor Pekanbaru yakni:

...kami jurnalis di Riau ini sampai bosan meliput kasus kebakaran hutan ini karena selalu ada setiap tahun. belum lagi peliputannya yang aksesnya sangat jauh, jadi saya belum pernah meliput secara langsung ke lokasi kejadian. Data yang saya dapat dari Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Untuk peliputannya saya memenuhi tanggung jawab penugasan peliputan saja, ya karena kontributor saya juga meliput berbagai rubrik tidak hanya kasus lingkungan hidup. Masyarakat juga sudah berulang kali melakukan demo tapi ya tindakan pemerintah hanya sampai di pencegahan saja, dalam arti mengucurkan dana miliaran rupiah hanya untuk memadamkan api, yang tiap tahun terjadi...(Ryan Nofitra, wawancara 27 Setember 2016)

Hasil dari wawancara peneliti dengan wartawan Tempo tersebut menggambarkan sedikit banyak proses kerja jurnalis lingkungan di media Riau dalam meliput dan menghasilkan berita tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ternyata dalam praktiknya, menunjukkan bagaimana seorang wartawan yang berada di sekitar kasus lingkungan hidup tidak selalu melakukan peliputan melalui observasi langsung (wawancara *via Whatsapp* 27 September 2016). Pengalaman berbeda tentang liputan kasus karhutla juga didapatkan oleh Didik Hermanto sebagai wartawan Riau Pos. Peliputan kasus karhutla sudah dilakukan sejak tahun 2014 dari menjadi pewarta foto hingga reporter. Didik bercerita bagaimana pengalamannya mendapatkan berita karhutla yang harus terjun ke lokasi dan bagaimana ketika berita karhutla tersebut akan diterbitkan. Beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai berita karhutla yang tidak naik cetak dan sensor yang dilakukan oleh editor. Dalam wawancara langsung yang dilakukan yaitu:

.....Kadang Ada, ya itu tadi kaitannya dengan bisnis media, misal kita tau gimana di lapangan nih, kadang karena kepentingan bisnis, kita tuh tidak bisa menyebutkan nama perusahaan yang terlibat ini....(Didik Hermanto, wawancara 4 Januari 2017)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan mantan wakil pemimpin redaksi Riau Pos tahun 2011 hingga 2014. Dalam wawancara langsung tersebut Hary menyampaikan :

“.....Sebenarnya kalau di media itu ya, pengiklan di utamakan, tetap di beritakan mungkin lebih *soft*, di sini sangat akomodatif, kita beritakan rilis mereka, secara *soft* dan ada konfirmasi dari mereka....” (Hary B Koriun, wawancara 28 Desember 2016)

Dari beberapa hasil wawancara pra dan penelitian yang dilakukan, maka bisa dilihat bahwa apa yang menjadi kebijakan redaksional media maka akan mempengaruhi bagaimana berita lingkungan hidup tersebut disajikan untuk pembaca. Sensor narasumber penyajian berita lingkungan hidup masih tergantung pada kepentingan dari perusahaan media. Praktik jurnalisme lingkungan menurut Abrar (1993:85), memberlakukan sensor akan menguntungkan satu pihak, dan pihak yang diuntungkan sebenarnya haruslah pembaca.

Namun, di Riau Pos penyensoran dilakukan untuk menguntungkan pihak pengiklan yang beriklan pada media tersebut. Beberapa media juga masih belum menaruh perhatiannya kepada permasalahan lingkungan hidup. Media cetak Riau Pos menjadi bukti dari beberapa media yang masih menyediakan *desk* khusus untuk kasus lingkungan hidup. Sehingga, dengan dipilihnya kasus karhutla yang sudah 19 tahun terjadi di Riau, tulisan ini lebih sesuai karena dilakukan dengan melihat proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos. Sebab penghargaan pemerintah Riau dijatuhkan kepada Riau Pos sebagai media yang dianggap peduli untuk penanganan kasus karhutla. Karena, terdapat asumsi awal bahwa proses jurnalisme lingkungan hidup yang diterapkan masih terkendala oleh praktik yang dilakukan oleh jurnalisnya dan adanya kendali besar kepentingan redaksi dan manajemen surat kabar tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena tersebut, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni : “Bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos tentang pemberitaan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos dalam pemberitaan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017.
2. Menganalisis hambatan dalam proses jurnalisme lingkungan hidup tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: **Manfaat Teoritis** : Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi kalangan akademisi. Hal ini mengingat tidak banyak penelitian yang mengambil isu mengenai praktik jurnalisme lingkungan hidup dan seperti apa jurnalis Indonesia memaknai isu lingkungan hidup yang ada di sekitarnya **Manfaat Praktis** : Penelitian tentang isu lingkungan yang masih sedikit, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat baik bagi media massa maupun media *online* (organisasi pers) di Indonesia dalam merumuskan standar berita lingkungan hidup, sehingga dapat menjadi panduan meliput isu lingkungan bagi jurnalis dan redaksi surat kabar dan tulisan ini nantinya diharapkan berguna bagi para jurnalis lingkungan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam meliput dan menuliskan pemberitaan tentang lingkungan hidup.

1.5 Literatur Review

Sebagaimana diketahui tulisan ini ingin mengetahui praktik jurnalisme yang ada di media cetak atau surat kabar mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan. Peneliti meyakini adanya hambatan dalam praktik pemberitaan tersebut dan hambatan ini bisa bersumber dari kebijakan redaksi hingga pada wartawan yang mencari berita. Penelitian ini dilakukan berdasarkan gambaran yang didapatkan pada tulisan-tulisan terkait jurnalisme lingkungan hidup. Tulisan mengenai pemberitaan jurnalisme lingkungan hidup pada dasarnya sudah pernah dilakukan,

baik oleh akademisi ilmu komunikasi maupun akademisi ilmu lingkungan. Olehnya, peneliti mencoba merangkum beberapa penelitian terkait, untuk dijadikan acuan dalam menindak lanjuti penelitian mengenai praktik jurnalisme lingkungan hidup tersebut.

Tulisan pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustafa K. Anuar (2012) dengan tema “*Reporting the Environment Human Rights, Development and Journalism in Malaysia*”. Anuar dalam tulisannya menjelaskan bagaimana konflik yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Kasus lingkungan hidup yang diangkat dalam tulisannya ialah mengenai kilang tanah yang dilakukan oleh Lynas Corporation di Pahang, dengan mengidentifikasi 35 berita mengenai kasus Lynas dengan tiga media utama di Malaysia (Utusan Malaysia, The Star, dan New Straits Times). Anuar melihat butuhnya pendidikan kepada mahasiswa jurnalistik untuk mampu lebih kritis terhadap lingkungan hidup. Dalam temuan ia memaparkan bagaimana seharusnya wartawan di Malaysia mampu mencari informasi mengenai kasus tersebut dari berbagai sumber yaitu tidak hanya dari sumber resmi yang ada saja, melainkan sumber yang ada pada masyarakat pinggiran atau yang terkena dampak kerusakan lingkungan tersebut. Menurutnya, dengan banyaknya sumber berita yang didapatkan merupakan salah satu cara untuk bersikap adil, etis, dan bertanggung jawab dalam jurnalisme. Sebab, apa yang ditemukannya ialah hanya sekitar 11,4 % persen dari 35 berita tersebut memberikan ruang pada demonstran untuk mengekspresikan keluhan dan keprihatinan mereka, dan sisanya merupakan ruang untuk politisi, pejabat pemerintah, dan pemimpin Lynas.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nuryadi (2004) dengan tema “Penerapan Jurnalisme Lingkungan Pada Pemberitaan Lingkungan Hidup di Surat Kabar”. Nuryadi memaparkan hipotesisnya yaitu kurangnya kepedulian surat kabar dalam mengangkat isu krisis air dalam kaidah jurnalisme lingkungan. Nuryadi menggunakan analisis berita pada dua surat kabar yaitu Kompas dan Sinar Harapan edisi Desember-Januari 2003. 1) Hasil temuannya adalah, frekuensi dan porsi halaman pemberitaan persoalan lingkungan hidup masih sedikit bila dibandingkan dengan pemberitaan lain, 2) Kebijakan

redaksional masih mempengaruhi kepedulian surat kabar dalam memberitakan kasus lingkungan hidup, dan kepentingan bisnis juga faktor sosial politik yang terjadi turut mempengaruhi kemunculan berita lingkungan hidup, 3) kedua surat kabar yang diteliti belum mampu menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan hidup.

Penelitian mengenai jurnalisme lingkungan hidup juga pernah dilakukan oleh Dwi Pela Agustina, dengan topik “Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup di Media *Online*”. Penelitian ini dilakukan pada situs www.mongabay.co.id, dengan meneliti bagaimana kontributor meliput kasus lingkungan hidup yang ada. Penelitian ini dilakukan kepada tujuh orang kontributor Mongabay yang berada di Sumatra, seperti Riau, Jambi, Sumatra Barat, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Agustina mencoba melihat bagaimana para kontributor tersebut mendapatkan sumber berita hingga penulisan dan pengeditannya. Temuan yang didapat ialah, para kontributor *mongabay* tersebut memang memiliki antusiasme dan minat yang besar terhadap kepedulian akan lingkungan hidup. Bergabungnya para kontributor tersebut menurut Agustina merupakan bentuk kekecewaan terhadap media *mainstream* yang memang tidak *concern* soal kasus lingkungan hidup. Berdasarkan identifikasi berita yang dilakukan, Agustina menemukan bahwa berita-berita lingkungan yang dihasilkan masih memuat unsur berita yang lengkap. Satu dari ketujuh kontributor yang diteliti masih ada yang tidak pernah menggunakan sumber rilis ataupun *pressconference*.

Penelitian mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan sebelumnya pernah ada, dengan tema “*Problem* Jurnalis Lingkungan di SKH Riau Pos” yang ditulis oleh Ayu Puspita Sari (2014). Penelitian tersebut dilakukan kepada tiga orang jurnalis SKH Riau Pos yang pernah meliput kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam penelitian yang dilakukannya, permasalahan utama yang coba dipaparkan Sari yaitu bagaimana kendala yang dihadapi oleh jurnalis lingkungan di SKH Riau Pos dalam meliput kebakaran hutan dan lahan. dalam tulisannya, Sari menjelaskan bagaimana Riau Pos merupakan media yang *intens* memberitakan kasus tersebut, namun hanya satu dari tiga jurnalis tersebut yang mendapat *problem* yang berkaitan dengan jurnalisme lingkungan. Hasil lainnya yaitu,

bagaimana ketiga jurnalis tersebut memiliki *problem* yang tidak jauh berbeda. Permasalahan tersebut yaitu dari segi wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga, hasil utama dari penelitian tersebut ialah, hanya ada satu jurnalis yang mendapati permasalahan khusus yang berkaitan dengan jurnalisme lingkungan.

Dari beberapa *review* penelitian di atas perlu di kaji kembali untuk melihat praktik jurnalisme tersebut tidak hanya sekedar dari analisis teks berita maupun jurnalisnya saja. Kegiatan ini perlu penelusuran lebih jauh lagi dengan melihat langsung cara kerja media dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan berita lingkungan hidup tersebut. Pada dasarnya masih ada permasalahan dari penerapan atau praktik jurnalisme lingkungan hidup. Permasalahan tersebut sebagian bersumber dari praktik jurnalisme yang dilakukan oleh jurnalis, kebijakan media, dan berita yang dihasilkan. Sehingga, penelitian ini mencoba melihat dari sisi yang berbeda yaitu mendeskripsikan proses jurnalisme lingkungan hidup yang ada di Riau Pos mengenai berita lingkungan hidup khususnya dalam pemberitaan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Praktik Jurnalisme Lingkungan Hidup

Akar dari jurnalisme lingkungan adalah komunikasi lingkungan, yang mengkaji bagaimana individu, lembaga, masyarakat serta budaya menerima, memahami, membentuk, menyampaikan dan menggunakan pesan tentang lingkungan itu sendiri, serta hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungan (Cox, 2010: 6). Pada prinsipnya pengertian jurnalisme lingkungan hidup tentu tidak lepas dari definisi jurnalisme yang baku. Jurnalisme lingkungan, meskipun diakui sebagai ‘spesialisasi’ baru, tetaplah jurnalisme yang bertolak dari aturan, norma, dan etika baku di dalam jurnalistik. Hal serupa dituliskan oleh Patel (2006) dalam jurnalnya yaitu : “...*environmental journalism is more about how people affect the environment and how the environment affects people, about feedback loops of environmental damage..*”, dimana dalam tulisannya Patel bercerita begitu berpengaruhnya perlakuan manusia terhadap lingkungan dan begitu sebaliknya, yang menjadi perhatian utama Patel ialah bagaimana

sumberdaya yang rusak benar-benar mempengaruhi keadaan ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, budaya dari suatu Negara.

Olehnya, jurnalisme lingkungan hidup memiliki tujuan untuk memberikan pencerahan, informasi sekaligus edukasi mengenai kesadaran pentingnya lingkungan, persoalan lingkungan hingga tata cara perbaikan lingkungan yang rusak. Jurnalisme lingkungan hidup dalam praktiknya memiliki beberapa tujuan antara lain (Sudiby, 2014: 8): (a) Membantu masyarakat untuk mendapatkan kesadaran sosial atas apa yang sedang terjadi terhadap lingkungan mereka, (b) Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk memutuskan sikap, (c) Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan bertindak dalam pelestarian lingkungan hidup, (d) Menekan pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan informasi lingkungan hidup sebagai landasan tindakan dan kebijakan yang di ambil, (e) Memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR tentang pelestarian lingkungan atau pengendalian praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Tujuan dari jurnalisme lingkungan tersebut, tidak serta merta dengan mudah tercapai. Praktik jurnalisme lingkungan, umumnya sama dengan jurnalisme lainnya yang tidak lepas dari hambatan atau kendala baik dari proses pencarian informasi, penulisan, pengeditan, hingga penerbitannya. Dalam praktiknya, jurnalis lingkungan dituntut mampu menguasai persoalan lingkungan secara komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas, solusi-solusi, memberikan prediksi berkait dengan potensi resiko baik yang berskala kecil maupun besar, berkait dengan sebuah isu lingkungan. Jurnalis lingkungan selalu saja dihadapkan dengan masalah gangguan dalam meliput atau melakukan investigasi, yakni dihalang-halangi, bahkan tak jarang juga diserang yang dapat mengancam keselamatan jurnalis, hingga jurnalis tersebut bisa saja terjatuh kasus hukum, bila ia tetap memberitakan liputannya. Wilkins & Patterson (1998), melihat bahwa jurnalis terbatas pada kecenderungan pemberitaan berdasarkan peristiwa (*event centered reporting*). Pemberitaan berdasar peristiwa ini akhirnya gagal dalam melihat isu-isu lingkungan yang bersifat jangka panjang. Jurnalis lebih suka meliput peristiwa tornado, angin topan, banjir bandang, longsor,

daripada masalah rusaknya ekosistem laut, atau suhu bumi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Isu lingkungan lain yang coba dituliskan oleh peneliti Jerman dari Dortmund University yaitu Rögner & Wormer (2015), dalam penelitiannya yang mencoba mendefinisikan kriteria jurnalisme lingkungan yang baik dan bagaimana penerapannya melalui berita-berita lingkungan di Jerman. Dalam tulisan tersebut, mereka menggambarkan hasil survey dari 50 kasus lingkungan hidup yang terjadi di Jerman. Hasilnya ialah, dalam pemberitaan puluhan kasus lingkungan hidup tersebut masih banyak bukti lapangan yang tidak di dapatkan oleh wartawan Jerman, dan hal tersebut memunculkan permasalahan baru dalam pelaporan kerusakan lingkungan hidup.

Seorang jurnalis lingkungan mengemban tugas besar dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Sehingga, perlu *skill* khusus dalam peliputan berita yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Wartawan lingkungan bukanlah wartawan yang hanya mendengar apa yang dikatakan oleh pemerintah, manajemen perusahaan, LSM, pakar lingkungan atau tokoh masyarakat, seorang wartawan lingkungan ialah wartawan lapang yang benar-benar terjun sendiri melihat, menyaksikan, dan menginvestigasi kondisi lingkungan secara langsung (Sudibyo, 2014:72).

1.6.2 Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup Dalam Surat Kabar

Sebuah berita tercipta melalui mekanisme kerja yang cukup rumit. Tidak terkecuali berita mengenai kasus lingkungan hidup, yang memiliki perspektif dan pengetahuan khusus dalam peliputannya. Proses pembuatan berita haruslah melalui ruang pemberitaan atau *news room*. Dimana ruang pemberitaan menjadi tempat penyemaian dari suatu informasi di lapangan hingga menjadi berita yang muncul dalam halaman surat kabar. Ruang pemberitaan merupakan tanggung jawab dari bagian redaksional, yang dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi yang bertanggung jawab terkait dengan perencanaan berita hingga pelaporan berita (Santana, 2005:188).

Menurut pandangan Conrad C. Fink (1998:136), manajemen redaksi untuk memproduksi materi pemberitaan : (1) ***Planning in the Newsroom*** : Secara garis besar, *planning in the newsroom* menekankan pada *planning effective of human resources, planning journalistic tone and the drive for quality*. Dalam koridor ini aspek yang harus diperhatikan adalah: *Planning Checklist for Quality* yaitu sebagai daftar kerja dan elemen-elemen yang perlu diperhatikan pemimpin redaksi sebagai pemegang tertinggi dalam upaya menjamin kualitas jurnalistiknya, *Plan to Follow Readership* yaitu kebutuhan informasi pembaca memiliki dinamika luar biasa maka media harus mampu mengikuti dan menyediakannya, *Plan "Showcase" Improvement*. *Showcase* adalah elemen penting pada tampilan surat kabar yang perlu diperhatikan agar dapat menampakkan kekuatan berita. Misalnya, pada *front page* memuat *the day's best news* dengan tampilan *eye-catching* untuk menarik pembaca. (2) ***Evaluation the News Product*** : Evaluasi merupakan aktivitas rutin bagi media, terlebih pada media harian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Aspek terpenting pada tahap ini adalah melihat proses dalam hasil kerja redaksi secara keseluruhan. Apakah pembaca tercukupi kebutuhan informasi atas berita (*news*) yang disajikan.

Pendekatan lebih umum mengenai tugas dan fungsi yang harus dilakukan manajemen redaksional di persuratkabaran, Sindhawani (1979:100-101) merinci beberapa hal yaitu:

(1) ***Planning Editorial Mix*** : Konsep perencanaan mencakup aturan atau kebijakan yang ditetapkan dalam proses produksi berita, menyangkut komposisi dan format berita, tampilan surat kabar, ilustrasi dan foto, dan hal lain terkait dengan penampilan fisik surat kabar yang sesuai dengan keinginan pasar dan agenda perusahaan. *Editorial mix* berkaitan dengan komposisi mengarah kepada penentuan seberapa besar proporsi berita karhutla dan berita lain yang berjenis *hard-news*, opini dan *features*. Selain itu, ditentukan seberapa banyak untuk rubrik-rubriknya.

(2) **Organizing Newsroom Operations** : Fungsi tertentu sebagai instrumen pelaksana manajemen terorganisasi dalam sebuah struktur. Pengorganisasian fungsi-fungsi yang terlibat itu ditujukan untuk mendistribusikan tugas dan wewenang dalam operasional *editorial mix* yang ditetapkan. Dalam rapat tersebut sudah ditentukan berita karhutla seperti apa yang akan dimuat, tinggal *editor* naskah berperan menyunting naskah hingga siap cetak.

(3) **Research, Experimentation and Feedback** : Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan harapan khalayak, sehingga dapat memproduksi berita yang merefleksikan dan memenuhi kebutuhan pasar. Biasanya dilakukan oleh bagian penelitian dan pengembangan. Bagian ini secara umum bertugas melakukan penelitian untuk keperluan media massa.

Proses pemberitaan berita lingkungan hidup di surat kabar tidak berbeda dengan tahapan pada media lainnya. Tahapan proses pemberitaan tersebut meliputi perencanaan (*news planning*), pengumpulan (*news gathering*), penulisan (*news writing*), penyuntingan (*news editing*), dan publikasi (*news publishing*) (Rolnicki dkk, 2015: 212, 275).

- 1) Tahap *Planning* : Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bagaimana Conard C Fink menjelaskan tahapan ini untuk menentukan informasi yang dibutuhkan pembaca dan juga membuat berita menjadi lebih menarik. Fink (1998) juga menjelaskan perlunya evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja dengan melihat berita yang disajikan apakah sudah mencukupi kebutuhan pembaca ataukah belum. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan rapat redaksi, biasa di sebut dengan rapat proyeksi atau rapat *budgeting*.
- 2) Tahap *News Gathering* : Tahapan ini meliputi pencarian data atau informasi dari suatu kejadian lingkungan hidup, sebelum di tulis menjadi sebuah berita. Proses peliputan atau pengumpulan fakta oleh wartawan menurut Itule dan Anderson (1987: 17-18), ditentukan berdasarkan pada tugas umum, sistem *beat*, dan liputan khusus. Liputan khusus memungkinkan seorang wartawan lingkungan melakukan peliputan yang

lebih dalam dari yang lainnya. Seorang wartawan yang melakukan peliputan mengenai permasalahan lingkungan hidup haruslah paham dengan apa yang ditulisnya dengan mengumpulkan fakta di lapangan (Itule & Anderson, 1987:18-19). Teknik mengumpulkan fakta sebagaimana dalam Abrar (2005) ialah observasi, wawancara, konferensi pers, Studi literatur (riset), dan *press release*. Menurut Ermanto (2005 :161-168), hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan berita lingkungan hidup ialah, sudut pandang, keakuratan data, konsekuensi pemberitaan, dan kode etik jurnalistik.

- 3) Tahap *News Writing* : Berita lingkungan hidup haruslah mampu disampaikan dengan tulisan yang mudah di pahami dan memperkaya batin (Abrar, 1993:73). Hal tersebut, dapat dilakukan jurnalis lingkungan hidup dengan cara : tidak menggunakan kata-kata yang susah untuk dipahami, hati-hati dengan penggunaan istilah ekologi atau istilah rumit lainnya, menguraikan proses kimia, fisika, dan biologi sesederhana mungkin, tidak banyak menggunakan angka dan grafik, memakai tulisan yang luwes dan tidak melompat-lompat, (Amor dkk 1988:153-163 dalam Abrar, 1993:73). Penulisan berita lingkungan tidak berbeda dengan berita lain, pada umumnya penulisan berita harus tetap memenuhi unsur 5 W+ 1 H, berita juga tetap ditulis berdasarkan piramida terbalik (Rolnicki, dkk, 2015:53).
- 4) Tahap *News Editing* : Tahapan ini dilakukan oleh redaktur atau *copy editor*, yang seharusnya dalam *editing* berita lingkungan seharusnya meminimalkan sensor dan menyederhanakan penyajian berita (Abrar, 1993:85). Tahap ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap berita-berita yang ditulis oleh wartawan. Pengecekan faktanya meliputi angka, tanggal dan waktu, verifikasi fakta, hilangkan fakta yang meragukan, keringkasan berita. Proses ini nantinya menentukan *headlines* berita dalam surat kabar, *headline* bertujuan untuk menggambarkan isi berita secara cepat dan menarik pembaca melalui *headline* tersebut (Garst & Bernstein, 1982:91).

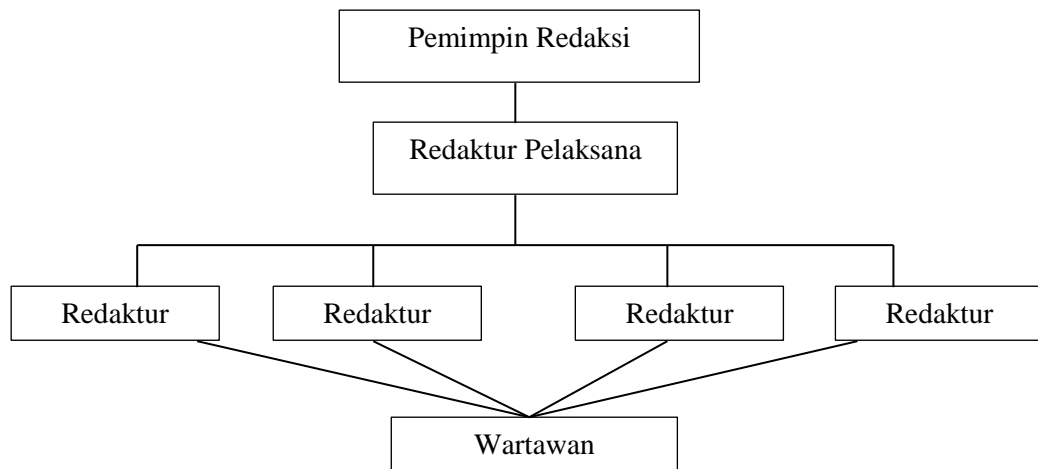
- 5) Tahap *News Publishing* : Tahapan ini dilakukan oleh pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana, berita yang telah di edit harus mendapat persetujuan pemimpin redaksi, barulah redaktur pelaksana menyajikan berita tersebut dan menyerahkannya ke bagian layout dan percetakan (Djuroto, 2002 : 23). Tahapan ini sebenarnya melibatkan banyak pihak, mulai dari editor naskah juga editor fotografer, bersama desainer untuk membahas presentasi visual yang menarik. Aspeknya meliputi jumlah halaman, desain grafis, foto yang menarik dengan *caption* yang jelas dan menarik (Rolnicki, dkk 2015: 275).

1.6.2.1 Berita Lingkungan Dalam Kebijakan *News Room*

Setiap surat kabar merupakan perpaduan kegiatan dari bidang redaksional, percetakan, dan bidang usaha. Redaksional merupakan penentu bagaimana berita yang diproduksi sesuai dengan sistem kerja yang ada dalam ruang pemberitaan atau *news room*. Sistem kerja yang ada pada redaksional memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh masing-masing anggota redaksi. Namun, seiring dengan berkembangnya kegiatan ini menjadi sebuah industri, saat ini kebijakan redaksi kadang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan manajemen (Abrar 1993). Lalu, siapa saja yang terlibat dalam ruang redaksi tersebut? Pape & Featherstone (2006) menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam *news room* tersebut. Seorang editor merupakan penentu bagaimana berita di produksi, apa yang dia katakan dan putusan akan menjadi keputusan terakhir untuk menjadikan isu tersebut naik dalam pemberitaan (Pape & Featherstone, 2006:2).

Dalam media yang besar, editor dibantu oleh dua sampai tiga orang asisten editor. Kemudian, yang terlibat dalam *news room* ialah editor berita, tugas utamanya ialah memutuskan berita apa yang harus diliput dan dicari oleh reporter atau wartawan. Jika digambarkan, maka susunan dalam *news room* surat kabar adalah sebagai berikut:

1.1 Stuktur Redaksional Ruang Pemberitaan



(Sumber : Djuroto, 2002:25)

Penjelasan susunan ruang redaksi menurut Djuroto, memiliki istilah berbeda dengan yang di miliki oleh Pape & Feather. Djuroto tidak hanya menggunakan istilah editor dan editor berita saja sebagai pihak yang terlibat dalam ruang redaksi tersebut. Djuroto dalam bukunya menjelaskan, setiap bidang redaksi akan dikepalai oleh pemimpin redaksi yang akan bertanggung jawab pada semua isi penerbitan. Mengendalikan kegiatan keredaksian dari penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk. Baik buruknya berita lingkungan hidup maupun seluruh berita tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi juga dalam melihat dan memilih kasus lingkungan tersebut (Djuroto, 2002: 19).

Tugas pemimpin redaksi dalam ruang pemberitaan dibantu oleh beberapa tenaga, yang pertama ialah redaktur pelaksana (*managing editor*), jumlah redaktur pelaksana akan disesuaikan dengan jumlah halaman yang diterbitkan. Redaktur pelaksana selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pemimpin redaksi. Jika berita yang ia koreksi disetujui oleh pemimpin redaksi barulah akan disajikan dalam penerbitannya. Selanjutnya, adalah redaktur (*editor*) yang bertanggung jawab dengan semua isi surat kabar. Tugas utama redaktur ialah menerima bahan berita yang ada pada kantor berita, bahan berita kemudian diseleksi untuk dipilih mana yang layak untuk naik cetak. Berita yang di seleksi oleh redaktur tersebut

bersumber dari tulisan wartawan yang mengumpulkan beritanya. Wartawan merupakan ujung tombak perusahaan surat kabar (Djuroto, 2002: 23). Mereka yang nantinya akan menyuplai bahan berita lingkungan. Sehingga, terdapat istilah jurnalis lingkungan hidup bagi para wartawan yang menjalankan tugas peliputan lingkungan hidup atau bertempat di *desk* lingkungan hidup. Sehingga dalam ruang redaksi, berita merupakan hasil kerja tim yang hasil akhirnya tergantung pada keputusan redpel dan pemred dalam memutuskan penyajian berita di surat kabar.

Dalam Produksi di ruang pemberitaan (*news room*) tidak terlepas dari beberapa pengaruh baik internal maupun eksternal. Reese dan Shoemaker dalam Ishadi SK (2001), bahwa proses dinamika di sebuah ruang pemberitaan melalui sejumlah pengaruh yaitu:

(a) **Individual Level** : Pada level ini para wartawan yang berperan dalam menentukan agenda berita, karena mereka langsung berhubungan dengan sumber berita. Dalam merekonstruksi peristiwa sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, penalaran dan batas-batas tertentu berdasar pada persepsi subyektifnya.

(b) **Media routine level** : Level ini adalah praktik media di mana keputusan dan persepsi mengenai peristiwa yang dibawa ke ruang pemberitaan dipengaruhi oleh cara para profesional media di perusahaan tempat mereka bekerja dalam mengorganisasi sistem kerjanya.

(c) **Organizational Level** : Di samping level rutinitas media, organisasi juga terlibat dalam proses rekonstruksi berita dan peristiwa.

(d) **External Media Level** : Level media eksternal berarti faktor-faktor di luar media bisa memengaruhi isi media.

(e) **Ideology Level** : Level ideologi ini berkaitan dengan struktur kekuasaan dalam arti sejauh mana kekuasaan melalui berbagai peraturan yang ditetapkan mampu berpengaruh atas proses pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan.

Kelima level tersebut secara jelas menurut Reese & Shoemaker memberi pengaruh kepada individu yang berada di ruang redaksi, seperti pemred hingga redaktur dan tidak terkecuali bagi wartawan di media tersebut. Dengan melihat

faktor internal dan internal dalam ruang pemberitaan (*news room*), perlu dilihat juga bagaimana peran dari wartawan sebagai individu yang menjadi tombak penting bagi sebuah produksi berita.

1.6.2.2 Jurnalis Lingkungan Hidup

Jurnalis adalah seni dan profesi yang memiliki tanggung jawab professional dalam kegiatannya, melihat dengan mata segar pada setiap peristiwa untuk menangkap hal-hal pelik dengan kegigihan (Ishwara, 2011:17-18). Pendapat tersebut juga didukung oleh Suroso (2001 : 75), jurnalis menjalankan kegiatan jurnalistik yang bertujuan untuk mencari fakta dalam kegiatan investigasi, yang berarti kegiatan tersebut tidak hanya mengandalkan pada tulisan semata melainkan juga pada proses pencarian datanya. Penyebutan jurnalis lingkungan hidup sebenarnya tidak berbeda dengan penyebutan jurnalis politik, jurnalis olahraga, ekonomi dan sejenisnya. Wartawan atau jurnalis lingkungan hidup merupakan wartawan umum yang selama peliputan berita akhirnya memiliki ketertarikan dan motivasi yang kuat untuk memberitakan masalah lingkungan hidup (Abrar, 1993:109). Studi Hanitzsch (2005; 2006) menunjukkan bagaimana proses kerja jurnalis di Indonesia. Berjudul "*Journalist di Indonesia: Educated but Timid Watchdogs*" ditulis berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 385 wartawan di Jakarta (50% dari total responden), Yogyakarta (25% dari total responden), dan Sumatera Utara (25% dari total responden). Dia menemukan bahwa wartawan di Indonesia cenderung berorientasi untuk menyampaikan informasi secara netral dan obyektif, dibandingkan menjadi anjing penjaga (*watchdog*) yang kritis. Orientasi wartawan Indonesia ini meliputi, "*getting information to the public neutrally and precisely*", "*depicting reality as it is*", "*staying away from stories with unverified content*" and "*getting information to the public quickly*" (Hanitzsch, 2005: 498). Hal ini bisa dipengaruhi dari bagaimana seorang jurnalis tersebut menempatkan dirinya sebagai pelaku di media tempatnya bekerja.

Jurnalis menempati dua posisi, yaitu jurnalis melakukan fungsi sosial, kemudian hasil yang diperoleh adalah informasi yang disampaikan kepada

khalayak dan publik. Jurnalis juga sebagai pelaku dalam media pers yang memposisikan dirinya sebagai alat produksi. Hasil yang diperoleh adalah komoditas yang nantinya disampaikan kepada khalayak selaku konsumen (Abrar, 2015: 30-31). Fungsi yang harus diperhatikan, Louis W. Hodges dalam Ishwara (2011: 29-33) memaparkan hal tersebut dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan pada penugasan (*assigned responsibilities*), jurnalis akan selalu mendapat penugasan peliputan baik dari pemerintah, editor, atau pemimpin redaksi. hal tersebut menunjukkan bahwa jurnalis tidak selamanya bebas total tetapi juga memiliki tanggung jawab penugasan,
- 2) Tanggung Jawab berdasarkan kontrak (*contracted responsibilities*), jurnalis akan secara khusus terlibat dalam dua kontrak yaitu dengan perusahaan media tempatnya bekerja dan dengan pembaca /pendengar / pemirsa. memang dengan audiens-nya wartawan tidak terikat kontrak tertulis, tetapi audiens menjanjikan sebuah kebebasan kepada pers untuk menjalankan tugasnya, dengan asumsi bahwa pers juga akan melayani kebutuhan informasi kepada audiens tersebut.
- 3) Tanggung jawab yang timbul dari diri sendiri (*self-imposed responsibilities*), tanggung jawab ini lebih mencerminkan bagaimana ekspresi watak atau kebajikan jurnalis sebagai suatu individu. Bagaimana seorang jurnalis berlaku adil, jujur, dan layak dipercaya dalam bertugas.

Melalui beberapa fungsi yang disebutkan di atas, jurnalis atau wartawan pada kenyataannya hanya memandang dirinya melulu sebagai pelaku dalam media, yang selalu melakukan tanggung jawab pertama yaitu *assigned responsibilities*. Jurnalis lingkungan hidup memiliki beberapa kriteria tersendiri yang harus ia lakukan yang menjadikannya berbeda dengan jurnalis bidang lain. Bloom dalam Abrar (1993 : 110-111) memaparkan bagaimana seorang jurnalis lingkungan harus kritis dalam menyajikan realitas lingkungan hidup yang meliputi beberapa tahap: (1) Pengatahuan: menyerap informasi, mulai dari istilah, konsep sampai klasifikasi realitas lingkungan hidup, (2) Pemahaman: memahami bagian dari

realitas lingkungan yang bisa diinterpretasikan, (3) Aplikasi: menggunakan konsep yang ada untuk memperoleh data lingkungan hidup yang akan diinterpretasikan, (4) Analisis: membuat permasalahan yang ditemukan menjadi lebih spesifik, (5) Sintesis: mencari jalan keluar untuk masalah yang ditemukan, (6) Evaluasi: Mengkonfirmasi kepada narasumber yang kompeten dan mengevaluasi masalah sesuai kriteria normatif yang berlaku.

Berita lingkungan hidup yang di produksi oleh jurnalis memiliki beberapa karakteristik (Kaheru, 2005: 32). **Sumber** : Jurnalis yang meliput berita lingkungan cenderung lebih mengandalkan pendapat kelompok elit seperti ilmuwan atau pejabat resmi Negara. Misal, Hannigan (1995) menemukan bahwa pemberitaan tumpahan minyak di California tahun 1969 lebih mengandalkan tokoh penguasa dan organisasi sebagai sumber berita. **Berorientasi pada peristiwa** : Berger (2002) menyatakan bahwa berita lingkungan umumnya bercerita tentang krisis atau peristiwa dramatis. Media lebih tertarik untuk memberitakan isu lingkungan yang tergolong besar seperti tumpahan minyak atau ledakan nuklir. Pada dasarnya media sulit menjual berita tentang fenomena yang dampaknya baru terlihat puluhan tahun kemudian seperti pemanasan global (Dumanoski, 1990, h.6).

Negativism. Lowe dan Morison (1984:78) menyatakan bahwa berita lingkungan cenderung berkisah tentang kemunduran dibandingkan kemajuan. Media menyebut berita lingkungan yang bersifat pesimis dan menyudutkan kegagalan teknologi atau manusia berpotensi memberikan gambaran yang salah tentang kenyataan sebenarnya. **Pembingkaiian:** Media menggunakan bahasa tertentu untuk membahas suatu masalah agar khalayak menerima masalah tersebut sesuai dengan keinginan media. Misalnya media membingkai ledakan nuklir Chernobyl sebagai insiden terkait perang dingin dan bukan merupakan kecelakaan nuklir sungguhan (Kaheru, 2005:32).

Pembingkaiian atau *framing* yang dilakukan oleh wartawan juga dijelaskan oleh Abrar (2005) *framing* berita dilakukan agar pembaca dapat menangkap wacana sesuai dengan yang diharapkan oleh wartawan. Teknik yang dilakukan dalam mem-*framing* berita ialah sebagai berikut:

1. *Defining Problem* : mendefinisikan masalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sering kali didasari nilai-nilai kultural yang berlaku umum.
2. *Diagnosing Causes* : mendiagnosis akar permasalahan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam permasalahan.
3. *Making moral judgement* : memberikan penilaian moral terhadap akar permasalahan dan efek yang ditimbulkan.
4. *Suggesting remedies* : menawarkan solusi dengan menunjukkan perlakuan tertentu dan dugaan dampak yang mungkin terjadi.

Aspek pemberitaan yang menjadi objek *framing* seorang wartawan ialah: *pertama*, judul berita yang menggunakan metode empati, yaitu menciptakan “pribadi khayal” dalam diri masyarakat. *Kedua*, fokus berita yang biasanya di-*framing* dengan metode asosiasi, yaitu “menggabungkan” kebijakan yang aktual dengan fokus berita. Fokus berita merupakan fakta yang menjawab pertanyaan *what*. Fakta ini kemudian yang “digabungkan” dengan berbagai kebijakan yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak. *Ketiga*, penutup berita yang dapat di-*framing* dengan menggunakan metode *packing*, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung berita (Abrar, 2005: 38).

Trivialisasi : Dalam meliput berita lingkungan terkadang media memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan suatu isu sebagai akibat dari pemingkanaan atau sifat *event centered*. Hal ini dilakukan untuk menjaga bentuk laporan *straight news* yang tidak menyediakan banyak tempat untuk informasi latar belakang.

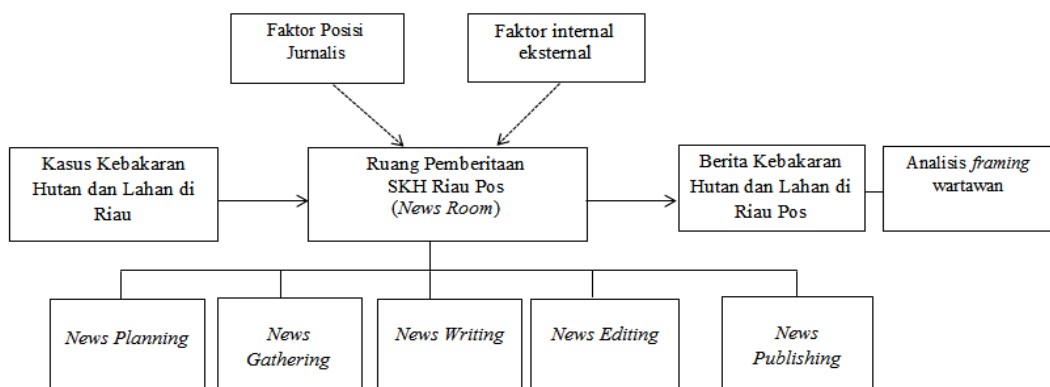
Aspek kelima menunjukkan bagaimana media massa masih saja memberikan ruang yang sedikit kepada kasus lingkungan hidup. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penyederhanaan yang juga sebagai bentuk kurangnya kompetensi jurnalis lingkungan dalam melakukan analisis, sintesis, juga evaluasi dalam penulisan kasus lingkungan hidup. Aksi penyelamatan lingkungan hidup dapat dilakukan sebagai bentuk suatu kebajikan mulia dan bertindak etik yaitu dalam bentuk pemberitaan yang bersumber dari kesadaran diri seorang jurnalis. sehingga

seorang jurnalis lingkungan hidup khususnya, dituntut untuk memiliki kesadaran dan pemahan khusus akan peristiwa lingkungan hidup.

1.7 Kerangka Operasional

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang membahas aspek praktik jurnalisme lingkungan hidup dan proses pemberitaanya, maka kerangka konsep pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

Bagan 1.2 Alur Kerja Penelitian Proses Jurnalisme Lingkungan



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Rincian dari alur tersebut dijelaskan dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Makna	Indikator	Ruang Lingkup	Keterangan
<i>News Planning</i>	Bagaimana redaksi merencanakan suatu peliputan karhutla	<ul style="list-style-type: none"> Berita yang dibutuhkan pembaca Editorial Mix Agenda surat kabar 	Mendata proses rapat proyeksi dan evaluasi redaksi mengenai kasus karhutla	<ul style="list-style-type: none"> Sindhawani (1979:100-101)
<i>News Gathering</i>	Bagaimana melakukan pengumpulan fakta di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Press realese dan Press conference Studi literatur (riset) 	Mendata wartawan yang meliput berita karhutla	<ul style="list-style-type: none"> Abrar (2005) Ermanto (2005:161-168)

<i>News Writing</i>	Bagaimana menuliskan berita yang di dapat di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur 5 W + 1 H • Jenis penulisan • Istilah Ekologi • Nilai Berita • Aplikasi • <i>Framing</i> 	Mendata wartawan yang menulis berita karhutla	<ul style="list-style-type: none"> • Abrar (1993 : 110-111) • Abrar 2005 • Rolnicki dkk, 2015:2-3, 89;
<i>News Editing</i>	Bagaimana proses pengeditan naskah berita	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan kalimat • Pengecekan jumlah angka, nama gelar, tanggal, lokasi, dan kata • Meminimkan sensor • Menentukan <i>headline</i> / judul • Ferivikasi dan kode etik jurnalistik 	Mendata cara kerja redaktur dan redaktur pelaksana ketika mengedit berita karhutla, serta melihat berita karhutla	<ul style="list-style-type: none"> • Abrar, 1993 • Garst & Bernstein 1982
<i>News Publishing</i>	Bagaimana berita yang ada di sajian secara visual	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kolom dalam pemberitaan • Makna pemberitaan • Gambar dan <i>caption</i> yang jelas • Tidak ada kesalahan dalam pemberitaan 	Mendata proses penyajian dan <i>layouting</i> karhutla di redaksi. Mendata pandangan NGO lingkungan soal pemberitaan karhutla Riau Pos,	<ul style="list-style-type: none"> • Rolnicki 2015

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.2 Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan penyajian deskriptif menurut Moleong (2001) merupakan metode yang digunakan untuk menemukan fakta dan melakukan interpretasi, menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu. Studi deskriptif dipilih sebagai alat untuk membuktikan asumsi sementara atau hipotesis penelitian. Studi deskriptif sengaja dipilih untuk mengamati fenomenologi yang terjadi dalam praktik jurnalisme lingkungan hidup. Sebab, format deskriptif akan tepat jika digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Bungin, 2008:69).

Olehnya, penelitian ini sebisa mungkin mencari fakta dengan melihat secara langsung bagaimana proses pemberitaan jurnalisme lingkungan hidup yang ada di Redaksi Riau Pos dalam mengangkat permasalahan karhutla. Deskripsi ini nantinya akan dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan bagaimana proses jurnalisme lingkungan yang ada di ruang pemberitaan Riau Pos tersebut, khususnya soal pemberitaan karhutla. Sehingga, melalui metode ini deskripsi secara sistematis tentang latar belakang pemberitaan karhutla pada praktik jurnalisme lingkungan dalam ruang redaksi surat kabar akan digali lebih dalam.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah surat kabar Riau Pos dengan informan penelitian ini adalah redaksional SKH Riau Pos dalam ruang pemberitaan yang meliputi : pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, wartawan, dan pewarta foto. Wartawan (*reporter*) dan pewarta foto dipilih berdasarkan pengalamannya yang pernah meliput karhutla. Pemimpin redaksi, akan dijadikan informan dalam segala kegiatan redaksional di media cetak. Sementara Sumber lainnya yang juga akan dijadikan data penelitian dicari dari organisasi dan praktisi lingkungan hidup Riau yang memiliki informasi mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau seperti Jikalahari. Daftar narasumber yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.4 Daftar Narasumber

No	Nama	Posisi	Alasan pemilihan	Tanggal Wawancara
1.	Asmawi Ibrahim	Pemimpin redaksi Riau Pos 2016	Pemegang kontrol redaksi Riau Pos	28 -12- 2016
2.	Hary B. Koriun	Pemimpin redaksi RiauPos.co 2016	Wapimred Riau Pos 2014 dan terlibat dengan desk lingkungan hidup	27- 12-2016
3.	Firman Agus	Redaktur Pelaksana	Editor utama kasus karhutla	27-12-2016
4.	Edward Yaman	Redaktur Riau Pos	Editor berita halaman utama	27-12-2016
5.	Desriandi Candra	Koordinator Liputan Riau Pos	Yang menugaskan peliputan karhutla ke wartawan	26-12-2016

6.	Mario Kisaz	Penanggung Jawab For-Us	Tim koran minggu yang pernah meliput karhutla	03-01-2017
7.	Kunni Masrohanti	Wartawan minggu Riau Pos	Wartawan khusus yang pernah meliput karhutla	04-01-2017
8.	M Fathra Nazrul Islam	Wartawan Harian Riau Pos Penempatan Jakarta	Wartawan yang pernah meliput karhutla	15-02-2017
9.	Didik Hermanto	Wartawan Harian Riau Pos	Wartawan sekaligus pewarta foto Riau Pos yang pernah meliput karhutla	04-01-2017
10.	M Ali Nurman	Wartawan Harian Riau Pos	Wartawan yang pernah meliput karhutla	04-01-2017
11.	Eka Gusmadi Putra	Wartawan Harian Riau Pos	Wartawan Riau Pos yang meliput kasus karhutla	15-01-2017
12.	Agustiar	Wartawan Harian Riau Pos	Wartawan Riau Pos yang meliput kasus karhutla	15-01-2017
13.	Woro Supartinah	Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)	Sebagai NGO yang terlibat langsung dengan kasus karhutla	09-01-2017

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah data pendukung yang dapat menjelaskan praktik jurnalisme lingkungan di kalangan jurnalis, di antaranya beberapa contoh berita media masa (dokumentasi) tentang berita kebakaran hutan dan lahan di Riau, dan mengamati cara kerja jurnalis di sana dalam meliput karhutla (observasi). Penulis juga akan mencari data mengenai faktor-faktor penghambat dalam perkembangan jurnalisme lingkungan di kalangan wartawan melalui wawancara mendalam kemudian diperkuat dengan data lain yang didapat melalui studi pustaka. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan digunakan: **Dokumentasi** : Teknik pengumpulan data dengan cara ini dimaksudkan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang dimaksud diantaranya pengumpulan berbagai pemberitaan yang ada di media Riau Pos mengenai pemberitaan tentang kebakaran hutan dan lahan di Riau. **Wawancara Mendalam** : Wawancara dilakukan untuk memperdalam penelitian dan mempertajam analisis permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara semi-sistematis. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para jurnalis Riau Pos.

Observasi : Observasi akan dilakukan dalam waktu satu bulan di Riau yang di mulai pada Desember 2016 hingga Januari 2017. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di kantor Graha Pena lantai tiga Riau Pos Jalan H.R Soebrantas Km 10,5 Kota Pekanbaru. Observasi dilakukan di mana peneliti hanya bertugas sebagai observer tanpa ikut serta menjadi partisipan dalam peliputan dan rapat redaksi. **Studi Pustaka** : Studi pustaka merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang berasal dari pihak lain di luar objek penelitian. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka yang merupakan data yang diperoleh dari membaca buku-buku ilmiah dan pengetahuan umum sebagai landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif menurut Bungin (2008) lebih banyak menganalisis dengan memerhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena. Untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran utuh mengenai informasi tertentu, penulis bisa menggunakan metode wawancara dan observasi sekaligus untuk mengecek kebenarannya. Khusus untuk berita kebakaran hutan dan lahan yang ada akan dilakukan analisis menggunakan konsep *framing* wartawan dalam menuliskan berita untuk melihat wacana berita karhutla yang coba ditampilkan oleh wartawan (Abrar :2005). Model analisis ini digunakan sebab sebagai pelengkap untuk mendeskripsikan isi suatu teks berita dari teks berita karhutla yang diproduksi Riau Pos yang digunakan sebagai data sekunder. Selanjutnya periset melakukan pemaknaan terhadap data. Sedangkan tahap analisis data kualitatif adalah sebagai berikut (Moleong, 2012:248) :Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, memilah dan menganalisis data wawancara dan observasi dikelompokkan sesuai dengan kelompok bahasan, mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, menuliskan model yang ditemukan.

1.8.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki titik fokus tersendiri guna menyempurnakan hasil penelitian. **Bab I** merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konsep penelitian penelitian dan metodologi penelitian. **Bab II** mengenai proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai tugas di redaksi dan mekanisme pemberitaan di redaksi yang meliputi forum, penentuan isi berita lingkungan hidup dan kelayakan berita lingkungan. Kemudian **Bab III** berisi *editorial mix* yaitu panduan di Redaksi Riau Pos mengenai berita karhutla.. Menganalisis temuan akan sikap Riau Pos terhadap karhutla dan seperti apa karhutla disajikan dalam berita surat kabar Riau Pos. **Bab IV** menelaah hasil temuan dan analisis penelitian. Pada Bab ini akan memaparkan bagaimana temuan tentang proses pemberitaan berita kebakaran hutan dan lahan oleh Riau Pos, yang setelahnya akan digambarkan bagaimana kaitan antara proses pemberitaan lingkungan hidup dengan perkembangan praktik jurnalisme lingkungan. **Bab V** merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran terhadap para praktisi jurnalisme lingkungan maupun medianya. (diadaptasi dari Abrar, 2005: 54-55).

1.8.7 Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan. *Pertama*, penelitian ini hanya dilakukan dengan wawancara pada anggota redaksi dan observasi langsung pada ruang pemberitaan Riau Pos, adapun teks berita yang berkaitan hanya menjadi data pelengkap atau dokumentasi dalam sumber penelitian. *Kedua*, penelitian ini hanya terbatas pada pengamatan terhadap proses jurnalisme lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau, sebagaimana yang sudah dijabarkan pada sub bab operasionalisasi penelitian. Sehingga, tidak membahas hal-hal di luar kasus lingkungan hidup yang lain dan di luar redaksi Riau Pos.

BAB II

PROSES JURNALISME LINGKUNGAN HIDUP

DI RIAU POS

2.1 Pengantar

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos. Hal itu meliputi pembagian tugas dan sistem kerja yang diterapkan dalam ruang redaksi Riau Pos pada tahun 2016-2017, yang menjadi tempat peneliti mengumpulkan data. Diantaranya bagaimana kebijakan di ruang redaksi Riau Pos mengenai forum evaluasi dan proyeksi pemberitaan karhutla. Bab ini juga menggambarkan bagaimana proses menentukan berita lingkungan hidup yang layak untuk naik cetak di Riau Pos.

2.2 Pembagian Tugas di Redaksi

Riau Pos merupakan media lokal pertama yang beridiri di Riau pada tahun 1991. Dengan visi misi “Bangun Negeri Bijakkan Bangsa”, menjadikan tujuan utama didirikannya ialah untuk kepentingan kedaerahan, soal daerah dan untuk warga Riau juga. Sehingga, menurut Asmawi Ibrahim¹ pemimpin redaksi Riau Pos, persoalan lingkungan yang ada di Riau juga merupakan tanggung jawab kami untuk memberitakannya. Dalam memberitakan suatu persoalan, ruang redaksi merupakan bagian dari surat kabar yang bertanggungjawab atas kendali tersebut. Ruang pemberitaan atau yang disebut juga dengan ruang redaksi dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi, dengan kendali pihak menejerial yang bertanggung jawab akan bidang bisnis perusahaan Riau Pos.

Organisasi redaksi Riau Pos memiliki satu orang pemimpin redaksi yang bertugas mengontrol jalannya perencanaan dan produksi berita. Tugas seorang pemimpin redaksi Riau Pos di bantu oleh tiga orang wakil pemimpin redaksi yang juga bertugas menentukan *headline*, perwajahan, foto, dan memimpin rapat redaksi. Dalam redaksi, adanya dewan redaksi menjadi hal yang penting bagi

¹ Asmawi Ibrahim mulai bergabung di Riau Pos sejak tahun 1999, dan menjadi reporter. Latar belakang pendidikan yang dimilikinya adalah sarjana ilmu pendidikan agama UIN Sumatra Utara, Hingga pada tahun 2014 hingga 2016 menempati jabatan pemimpin redaksi Riau Pos

setiap perusahaan media, sehingga Riau Pos memiliki sembilan orang dewan redaksi yang mendampingi jalannya proses pemberitaan. Ruang redaksi di Riau Pos juga dikenal dengan sebutan departemen produksi. Departemen tersebut memiliki sembilan orang redaktur pelaksana kompartemen yang berubah nama menjadi penanggung jawab koran. Tugas penanggung jawab koran adalah sebagai penentu *headline* dan menjaga lintas berita agar tidak keluar jalur. Dengan dibantu oleh 19 orang redaktur atau yang disebut dengan istilah penanggung jawab halaman. *Job desk* mereka adalah sebagai editor berita sesuai dengan tugas halaman masing-masing yang mereka pegang, yang dikirim oleh penanggung jawab liputan. Beberapa asisten redaktur sejumlah empat orang bertugas membantu kerja dari para redaktornya tersebut. Satu orang koordinator liputan membawahi lembaga liputan yang dibantu oleh tiga orang asisten koordinator liputan.

Tugas mereka adalah membagi tugas kepada wartawan atau reporter suatu posko atau *beat* yang sudah ditentukan. Posko wartawan Riau Pos yang bertempat di Kota Pekanbaru adalah 13 orang wartawan. 17 orang wartawan posko daerah ditugaskan masing-masing pada setiap Kabupaten atau daerah di Pekanbaru dan satu orang wartawan Jakarta. Untuk pewarta foto Riau Pos memiliki tiga orang fotografer. Redaksi Riau Pos tidak hanya memiliki departemen produksi saja (Sumber: sekretariat redaksi Riau Pos).

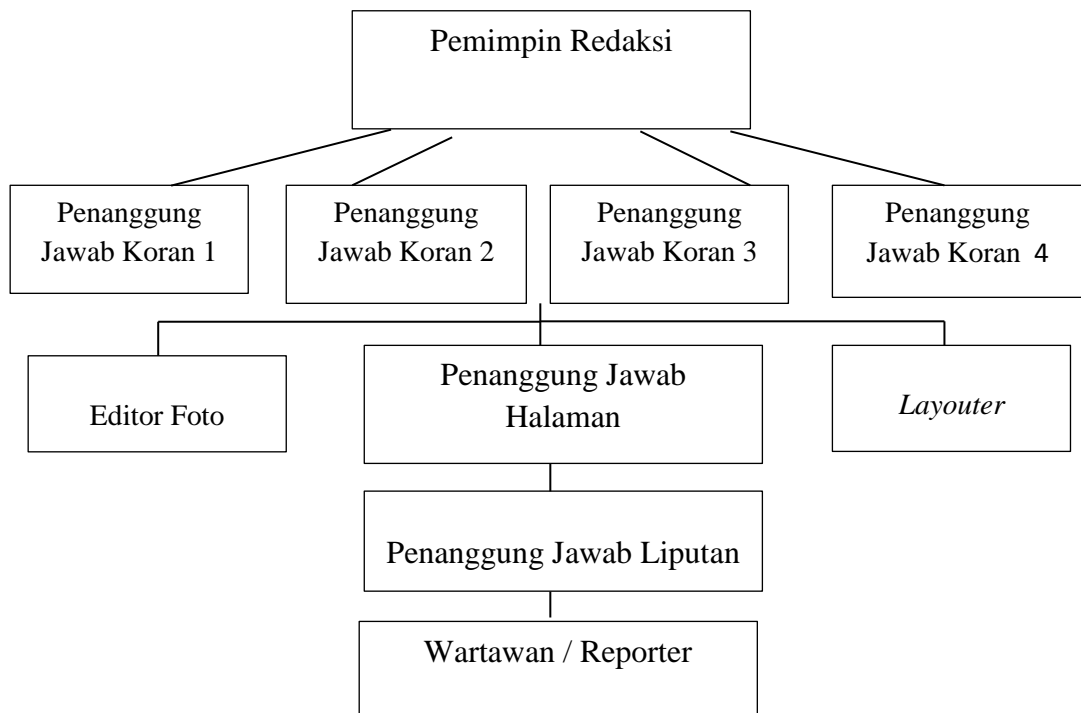
Bagian perwajahan, desain grafis dan pra-cetak juga tergabung dalam ruang redaksi di Riau Pos. Divisi tersebut meliputi asisten manager perwajahan, grafis, dan olah foto yang berjumlah 10 orang. Departemen perwajahan, kemudian departemen desain grafis dan foto *editing*, pracetak, pemeliharaan alat, dan penjab logistik. Divisi ini yang mengatur bagaimana gaya tulisan berita-berita di Riau Pos seperti : menghasilkan produk (koran) yang berpenampilan bagus dengan keterbacaan yg baik. *Job desk* dalam perwajahan terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Layouter : layout, paginasi halman, *print out* ke bagian pracetak
- 2) Desainer grafis & olah foto : membuat grafis atau infografis, ilustrasi, pengolahan foto
- 3) Pracetak: *plate making* yang akan diserahkan ke bagian percetakan.

2.3 Mekanisme Pemberitaan di Redaksi

Bagian redaksional Riau Pos dalam melakukan proses produksi berita di kontrol oleh seorang pemimpin redaksi, dan di bantu oleh empat orang redaktur dan wakil pemimpin redaksi. Beberapa kebijakan tersebut pada tahun 2016 ternyata berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Manajemen Grup Jawa Pos mengalami krisis, hingga merubah jabatan yang ada di Riau Pos, sehingga tidak ada lagi istilah redaktur pelaksana dan redaktur. Tim redaksi menjalankan fungsi keredaksiannya dengan nama penanggung jawab. Struktur redaksi yang ada di Riau Pos ialah sebagai berikut:

2.1 Tahapan Pemberitaan Dalam Ruang Redaksi Riau Pos



(Sumber : Sekretariat redaksi Riau Pos)

Dari susunan bagan 2.1 tersebut, digambarkan bagaimana proses pemberitaan yang dilakukan oleh redaksi Riau Pos tidak serumit dengan konsep yang dimiliki oleh Santana:



Gambar 2.2 Tahapan Tugas Pemberitaan Dalam Surat Kabar
(Sumber : Santana, 2005:193)

Proses pemberitaan di redaksi menurut Brook dalam Santana (2005) yaitu merupakan proses yang rumit, dimulai dengan wartawan kemudian dilanjutkan oleh redaktur kota (*city editor*) yang bertugas menyunting naskah dan menyerahkan kepada redaktur berita. Kemudian redaktur berita (*news editor*) memutuskan penempatan naskah dan menyerahkan kepada kepala bagian naskah. Setelah di cek kembali oleh redaktur naskah maka kepala bagian naskah akan merampingkan dan memeriksa naskah kemudian mengirimnya pada bagian penyetingan. Proses tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Riau Pos sebagai rutinitas dalam peliputannya. Hal tersebut diakui bagaimana rutinitas tersebut yang akhirnya membawa kendala tersendiri bagi berita-berita yang diproduksi. Hary B menjelaskan bagaimana proses di Riau Pos yang dibuat sederhana:

“Latar belakang pendidikan mereka, di sini juga tidak ada editor bahasa, jadi di situ susahnyanya, kalau saya ya harusnya *njelimet* gapapa tapi masalahnya ya di *deadline* itu, orang menganggap kesalahan sepele, tapi kan kita jual kata-kata, dan nantinya bisa jadi masalah” (Hary B Koriun, wawancara 4 Januari 2017)

Dari penjelasan tersebut, memperjelas keadaan di redaksi Riau Pos bagaimana mekanisme produksi berita yang dilakukan. Proses yang dijabarkan oleh Brook dalam Santana (2005:193) sebenarnya sudah menunjukkan standar pemberitaan yang menghasilkan berita layak. Bagaimana jika salah satu unsur dihilangkan seperti dalam Riau Pos yang tidak memiliki redaktur naskah (*copy editors*) atau dalam istilah lain disebut oleh Hary B sebagai redaktur bahasa, yang memang bertugas untuk mengecek detail penulisan. Jika sudah begini, bisa dikatakan bahwa rutinitas peliputan di redaksi memang memudahkan bagi para pekerja yang

memang ingin membuat berita sekedarnya saja tanpa memperhatikan unsur penerapan ejaan yang baik atau bahkan hingga keakurasian informasi yang didapat oleh wartawannya.

Dalam hal ini pemimpin redaksi yang memegang penuh kontrol redaksi yang berupa kebijakan dari proses pembuatan berita lingkungan hidup di ruang redaksi. Pemimpin redaksi yang mengontrol apakah berita tersebut sudah sesuai dengan tujuan organisasi media, sehingga liputan yang dihasilkan betul-betul terarah. Pemimpin redaksi Riau Pos menyampaikan :

“Redaksi Riau Pos menerapkan jurnalisme akomodatif sebagai arah kebijakan pemberitaannya. Jurnalisme akomodatif yang di maksud adalah memberi ruang bagi pihak yang terkait untuk melakukan konfirmasi, sehingga publiklah yang menilai, Riau Pos hanya menyajikan ruang saja” (Asmawi Ibrahim, wawancara 28 Desember 2016).

Proses pemberitaan yang dikontrol langsung oleh pemimpin redaksi dan dibantu oleh empat wakil pemimpin redaksi. Kemudian proses pemberitaan di redaksi akan dijalankan penugasan seorang koordinator liputan yang berganti nama menjadi penanggung jawab liputan kepada para wartawan untuk meliput. Setelah itu, berita dari seorang wartawan akan diperiksa kelengkapan beritanya dan berita akan diteruskan kepada redaktur yang berganti nama menjadi penanggung jawab halaman. Redaktur mengecek kelengkapan dan nilai berita kemudian berita akan di distribusikan kepada redaktur pelaksana kompartemen yang berganti nama menjadi penanggung jawab koran. Penanggung jawab akan menyesuaikan berita yang ada dengan *dummy* yang sudah disiapkan oleh layouter. Setelah pengeditan tahap terakhir maka berita tersebut memerlukan persetujuan pemimpin redaksi, yang biasa diwakilkan kepada wakil pemimpin redaksi.

Mekanisme tersebut berbeda dengan yang ada ketika peneliti melihat langsung proses di redaksi. Tidak semua berita dikontrol langsung oleh pemimpin redaksi, bahkan ketika rapat redaksi, pemimpin tidak harus ada dalam rapat. Hal tersebut dilakukan karena adanya sistem yang sudah berjalan agar masing-masing redaktur pelaksana mengontrol tiap korannya. Pengecekan yang dilakukan oleh pemimpin redaksi kebanyakan untuk berita halaman utama saja, tentunya yang berkaitan dengan *headline* berita yang naik cetak pada hari tersebut. Teorinya,

praktik produksi harusnya dipegang penuh oleh seorang pemimpin redaksi yang tentunya bertanggung jawab atas isi redaksional medianya (Santana, 2005:191).

2.3.1 Forum : Proyeksi dan Evaluasi

Proses selanjutnya ialah rapat redaksi yang dilakukan setiap harinya di ruang redaksi Riau Pos. Rapat redaksi dilakukan untuk membuat *listing* berita yang akan diliput untuk keesokan harinya dan juga mengevaluasi berita yang sudah terbit pada hari itu. Rapat ini biasanya dikontrol langsung oleh pemimpin redaksi, ataupun penanggung jawab koran yang sudah terjadwal. Penanggung jawab koran berjumlah empat orang sesuai dengan jumlah sesi koran pada Riau Pos. Koran pertama yaitu sesi satu koran nasional, dua koran olahraga, sesi tiga koran pro-otonomi, dan sesi empat koran metropolis. Peserta rapat adalah pemimpin redaksi, penanggung jawab koran, penanggung jawab halaman, *layouter*, editor foto dan koordinator liputan yang juga berganti nama menjadi penanggung jawab liputan.

Dalam penjelasannya, pemimpin redaksi yaitu Asmawi Ibrahim menjelaskan soal rapat redaksi gabungan yang dilakukan pada hari Senin dan Jumat. Rapat gabungan tersebut dimaksudkan untuk seluruh anggota redaksi baik tim Minggu maupun tim harian. Tim Minggu merupakan tim bentukan yang bertugas untuk mengisi rubrik pada Hari Minggu. Rubrik tersebut salah satunya ialah rubrik *for-us, save the earth*, kuliner, *tour*, puisi, *ranggi*, dan *zetizen*. Rapat dilakukan setiap pukul 14.00 atau 15.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.



2.3 Rapat harian redaksi Riau Pos yang dipimpin oleh pemimpin redaksi



2.4 Rapat gabungan yang dipimpin oleh *chairman* Riau Pos Grup

Dimulai dengan evaluasi berita yang terbit pada hari tersebut dan dilanjutkan dengan proyeksi berita harian dan hari minggu. Untuk kasus kebakaran lahan yang sempat parah, biasanya pemimpin redaksi akan berdiskusi dengan para penanggung jawab terlebih dahulu sebelum akhirnya dibicarakan pada meja rapat redaksi. Rutinitas rapat harian yang dilakukan akan dipimpin oleh pemimpin redaksi yang secara bergantian juga dipimpin oleh wakil pemimpin redaksi atau sekarang menjadi penanggung jawab koran di Riau Pos. Evaluasi yang dilakukan hanya seputar bagaimana kesalahan tulisan hingga kesalahan pemilihan berita. Ternyata evaluasi dan proyeksi tidak hanya berlangsung di ruang redaksi saja seperti yang dikatakan oleh Firman Agus redaktur pelaksana koran satu.

“Itu setiap hari di rapat proyeksi dan evaluasi, dan juga ada grup *whatsapp* untuk memberitahu info, untuk tim redaksi dari pemred juga ada. Semua saling mengevaluasi bersama, yang pimpin rapat bergilir karena ada 5 orang penanggung jawab koran atau redpel”(Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Perlu dikritisi dalam hal ini ialah bagaimana kontrol dari pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana terhadap evaluasi dan bagaimana proyeksi berita yang akan diliput. Dalam praktiknya, peneliti melihat bagaimana mudahnya melakukan

komunikasi melalui teknologi berkirim pesan tidak menjadikan informasi tersebut semakin jelas ketika dibawa ke ruang rapat. Nyatanya, pada pemberitaan karhutla yang naik cetak pada tanggal 12 Januari 2017 tidak dilakukan proyeksi terlebih dahulu di ruang redaksi. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan wartawan yang meliput karhutla pada tanggal 11 Januari :

“Kalau penugasan ya biasanya, tapi karena ini karhutla jadi ya yang ini inisiatif aja” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana tim redaksi yang kalah cekatan dengan para wartawan meskipun praktiknya mereka saling berbagi informasi melalui teknologi *whatsapp* sebagai teknologi yang mempermudah mereka untuk berbagi informasi diluar rapat. Ternyata, tidak ada koordinasi mengenai peliputan tersebut, tidak ada proyeksi yang dilakukan untuk membahas kasus karhutla pada rapat proyeksi kala itu. Sehingga, ketika rapat redaksi pada tanggal 12 Januari menjadi sesuatu yang mengejutkan di meja rapat ketika pemberitaan tersebut di evaluasi dan ternyata luput juga dari bidikan koordinator liputan. Liputan karhutla yang naik cetak tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh redaksi. Lalu, untuk apa rapat proyeksi dilakukan jika berita yang sudah naik cetak bukan berita yang diinginkan oleh pemred? Kesalahan ini yang perlu diperhatikan, evaluasi yang dilakukan oleh Riau Pos ternyata berkaitan dengan kurangnya koordinasi ketika proyeksi dan antara wartawan dengan koordinator liputan. Seharusnya, rapat proyeksi menjadi panduan utama untuk *listing* tema sebelum wartawan terjun lapangan sesuai dengan tugas dari koordinator liputan.

2.3.2 Penentuan Isi Berita Lingkungan

Penentuan isi berita dilakukan ketika rapat proyeksi di redaksi. Dimana ketika akan mengangkat suatu isu maka terlebih dulu redaksi Riau Pos membuat beberapa tawaran tema yang diajukan ketika rapat. Cara lain yang dilakukan ketika rapat gabungan pada hari Senin dan Jumat yaitu dengan menuliskan kerangka acuan kerja untuk peliputan atau yang biasa disebut dengan *term of reference* (TOR). Penulisan kerangka peliputan tersebut menurut Mario

memudahkan untuk peliputan dan sesuai dengan yang diinginkan media, dan keunggulannya ialah pasti dimuat dalam pemberitaan. Mario Kisaz yang merupakan penanggung jawab halaman *for-us* pada tim Minggu menjelaskan bahwa karena penyajian berita *for-us* seminggu sekali, maka proyeksi akan dilakukan ketika Hari Senin untuk evaluasi tim Minggu dan Jumat proyeksi dengan menuliskan TOR tersebut, termasuk untuk berita karhutla. Proses tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh tim harian yang hanya mengajukan judul dan *listing* data apa yang dibutuhkan. Contoh TOR karhutla yang dibuat oleh tim Minggu ketika melakukan rapat proyeksi adalah sebagai berikut :

Term Of Reference (TOR) Liputan Khusus Kebakaran Lahan Konsesi 18 Oktober 2015

Rencana Judul :

1. Pilih, Tebang, Pilih
2. Tak Pilih Menebang, Tak Tebang Pilih

Misi :

Pelajaran Bagi Perusahaan Lain agar Pemerintah Menghukum Tegas Perusahaan Pembakar Lahan

Latar Belakang:

18 tahun Riau dikepung asap. Selama itu pula pemerintah baru menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka pembakar lahan. yakni PT Langgam Inti Hibrido dan PT Hutani Sola Lestari yang merupakan perusahaan pemegang izin hak pemanfaatan hutan kayu (HPH. Dirut PT LIH pun telah ditangkap sebagai tersangka karena telah membiarkan 533 hektar lahan konsesinya terbakar awal Juli silam di Desai Gondai. Selain di Gondai, PT LIH juga memiliki ratusan hektar lahan di Desa Kemang. Di desa Gondai tidak ada lagi aktifitas, tapi, kabarnya, di Desa Kemang, aktifitas masih berjalan. Mengapa demikian? Benarkah selama 18 tahun hanya dua perusahaan yang membakar lahan? Masyarakat menderita, dunia pendidikan dan ekonomi Riau lumpuh. Aktifis lingkungan pun berteriak agar pemerintah tidak 'main mata', tidak tebang pilih. Akankah Riau lebih baik pasca pembekuan izin dua perusahaan tersebut, akan adakah lagi pembekuan izin untuk perusahaan-perusahaan berikutnya? Seperti apakah dampak yang ditimbulkan dari pembekuan izin ini?

Sumber Berita :

Hasil pantauan di Perusahaan PT LIH Desa Gondai Pelalawan, hasil *interview* masyarakat dan karyawan di sekitar lokasi, hasil *interview* pemegang dan penimbang kebijakan, hasil perusahaan, hasil *interview* aktifis lingkungan Riau.

(Sumber: Data Kunni Masrohanti reporter Riau Pos)

Praktiknya, TOR yang dibuat dalam setiap pemberitaan tim Minggu biasanya disertai oleh pengajuan dana liputan. Dengan adanya TOR tersebut peliputan berita hari Minggu akan selalu naik cetak karena akan mendapat persetujuan terlebih dahulu pada rapat hari Jumat. Kunni menceritakan bagaimana proses rapat redaksi oleh tim Minggu, dimana setelah proses rapat redaksi berakhir dan TOR yang dibuat telah disepakati, maka para jurnalis atau wartawan yang bertugas meliput kasus kebakaran hutan dan lahan, akan menghitung biaya peliputan lapangan. Biaya tersebut langsung diajukan ke sekretariat redaksi dengan persetujuan pemimpin redaksi. Tidak jarang para wartawan tidak mendapat dana peliputan dari pihak redaksi terkait minimnya jumlah dana.

“Kadang kalau berbahaya tidak di setujui sama pemred, kalau pemred tidak izinkan ya tidak naik juga beritanya, kadangpun tak ada biaya itu dia, kadang anggaran tidak ada. biaya peliputan kan kita yang buat dan ajukan langsung ke pemred biasanya, kalau tidak ada biaya ya pakai uang sendiri, kadang juga tidak ganti, hehe “(Kunni Masrohanti, wawancara 4 Januari 2017)

Contoh pengajuan dana peliputan karhutla tersebut ialah sebagai berikut:

Usulan Biaya Liputan Khusus
Illegal Logging, Desa Bukit Kerikil, Kec Bukitbatu, Bengkalis
Tanggal 4-6 Oktober

Tim Peliput	: Kunni Masrohanti (reporter)	
Pendamping	: Voulentic (fotografer)	
	: Voulentic (driver)	
Jadwal Liputan : 4 – 6 Oktober 2016		
Transportasi	: 1 Mobil Avanza	-
Minyak Mobil	: Pekanbaru-Bukit Kerikil (PP)	Rp. 300.000,-
Konsumsi	: Rp50.000 x 3 orang x 3 hari	Rp. 450.000,-
Minyak Motor	: 3 motorx 5 liter (batu kerikil-sidodadi- Batas cagar biosfer) PP	Rp. 150.000,-
M Kapal + Tekong	: Sidodadi-Cagar Biosfer	Rp. 300.000,-
Informan	: 1 orang	Rp. 100.000,-
TOTAL		Rp1.300.000,-
Pekanbaru, 3 Oktober 2016		
Penanggungjawab		Menyetujui
		Pemimpin Redaksi
(Kunni Masrohanti)		(Asmawi Ibrahim)

(Sumber: Data Kunni Masrohanti reporter Riau Pos)

Penentuan isi berita akan lebih mudah dengan dibuatnya TOR untuk pemberitaan hari Minggu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mario sebagai berikut:

“Kita sudah punya TOR kita rapatkan, dan kita komunikasikan, isinya apasih yang mau kita buat nih, kemudian jadilah kerangka untuk kita jadikan tulisan ini, rapatnya senin dan jumat. Kita bahas mana yang menarik dan kita evaluasi juga. kita diskusikan. Dengan penulisan TOR ketika rapat hari Jumat dan langsung di edit di halaman, yang beritanya tidak jauh berbeda dengan hasilnya, dan pasti dimuat dalam berita Ahad”(Mario Kisaz, wawancara 3 Januari 2017)

Melalui TOR yang dibuat terlebih dahulu sebelum peliputan, sebenarnya menunjukkan bagaimana kesiapan yang dimiliki oleh redaksi dan juga wartawannya terhadap suatu isu. Isu ditemukan terlebih dahulu dan dikuasai latar belakangnya agar lebih mudah dalam menentukan isi yang akan ditonjolkan. Hal serupa yang disampaikan Simbolon (1997) dalam Ermanto (2005:131) penting bagi seorang wartawan untuk menemukan peristiwa, mengeceknya, menguasai jalan cerita, menakar nilai berita, dengan begitu akan mudah untuk menyusun berita dan setidaknya bukan berita yang asal jadi saja. Singkatnya, TOR dan listing berita yang dilakukan pada rutinitas redaksi Riau Pos memang sangat membantu dalam mendapatkan data sesuai yang diinginkan oleh redaksi.

2.3.3 Menentukan Kelayakan Berita Lingkungan

Setelah rapat maka seorang koordinator liputan yang dibantu oleh dua orang asistennya akan mulai menugaskan peliputan karhutla kepada wartawan daerah dan kota sesuai dengan poskonya. Setiap satu orang wartawan menempati 10 posko di Kota, dan 12 orang lainnya menempati posko daerah sesuai dengan jumlah Kabupaten di Riau. Setiap wartawan wajib mengumpulkan lima sampai enam berita setiap harinya. Desriandi Candra menggambarkan bagaimana tugas seorang penanggung jawab liputan (koordinator liputan). Berita karhutla yang dikumpulkan juga termasuk dari kuota berita yang ditugaskan tersebut. Setelah itu berita akan di kirim oleh wartawan melalui e-mail riaupos2017@gmail.com, yang mana e-mail tersebut dipegang oleh seorang penanggung jawab liputan liputan dengan *deadline* pukul 23.00 WIB untuk koran satu, pukul 21.00 WIB untuk

koran dua, koran tiga pada pukul 18.00 WIB, dan 17.00 WIB untuk *deadline* koran empat. Setelah itu berita akan didistribusikan oleh koordinator liputan kepada masing-masing penanggung jawab halaman atau istilah umumnya adalah redaktur.

Para penanggung jawab halaman yang memegang kasus kebakaran hutan dan lahan kemudian melakukan proses *editing* yang dilakukan dengan berdiskusi langsung dengan penanggung jawab koran atau istilah lainnya adalah redaktur pelaksana kompartemen. Proses diskusi terlihat sangat mudah karena posisi duduk yang memang dibuat bersebelahan pada ruang redaksi tersebut. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mencetak berita yang diserahkan kepada *layouter*. Berita karhutla yang dicetak masih berupa cetakan dalam kertas folio yang bertujuan untuk memudahkan penanggung jawab koran melakukan pengecekan kata dan kalimat juga *headline*. Proses pengecekannya dengan memberikan tanda koreksi pada pemberitaan tersebut.

Penanggung jawab koran satu, Firman Agus² menjelaskan bagaimana proses diskusi menentukan berita yang akan naik cetak, seorang editor foto akan berdiskusi dengan penanggung jawab Koran tentang foto yang layak dan menarik untuk berita yang sudah di edit tersebut, dan setelahnya terdapat diskusi antara penanggung jawab Koran dan *layouter* juga editor foto untuk mengatur tata letak berita yang sudah siap atau selesai tahap *editing*. *Layouter* yang mengatur tata letak sebuah berita sudah memiliki *dummy* standar Riau Pos. Menurut Furqon³, *dummy* kekirian merupakan ciri khas di Riau Pos.

.....*Dummy* dibuat ketika foto utama dan *space* iklan sudah ditentukan. Standar atau pakem dirancang oleh bagian perwajahan dan di-acc pemred. Rubrik di kirian memang pakem atau ciri khas *layout* Riau Pos, cuma pada praktiknya tak selalu pakai kirian.... (Furqon LW, 15 Februari 2017)

Furqon menjelaskan bagaimana tahapan yang dilakukan ketika suatu berita setelah di edit oleh redaktur pelaksana. Tahapannya adalah bagian perwajahan

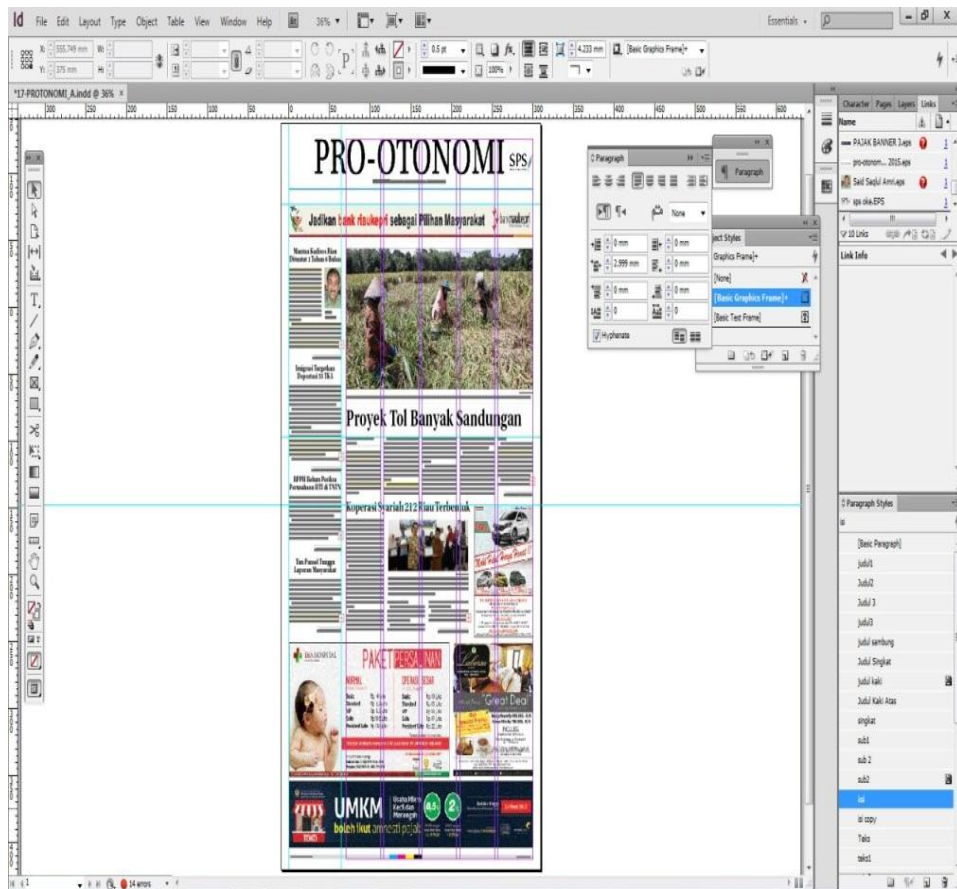
² Firman Agus adalah seorang penanggung jawab Koran satu, atau redaktur komplementer untuk koran satu. Firman menempati posisi tersebut dari tahun 2011 hingga 2016.

³ Furqon LW adalah kepala divisi perwajahan di Riau Pos yang membawahi 10 orang di timnya.

menyiapkan *dummy* halaman. *Dummy* ini biasanya sudah standar dan dijadikan style/pakem layout-nya Riau Pos. Redaktur setiap hari membuka *file* halaman (aplikasi yang digunakan *InDesign*) yang sudah ada *dummy* tersebut. Kemudian menempatkan (*place*) berita dan foto. Jadi penentuan penempatan berita (berita utama/*headline*, *second headline*, *feature*, berita singkat/kirian dan lain-lain) dan foto ditentukan oleh redaktur dengan mengikuti *dummy*. Layouter kemudian melayout berita dan foto tersebut. Pada praktiknya, penempatan berita dan foto menjadi keputusan bersama antara redaktur dan *layouter*, agar didapat tampilan halaman yang bagus dan terpenuhi unsur keterbacaannya



Gambar 2.5 *Dummy* Standar Riau Pos dengan Format Kekirian



Gambar 2.6 Proses Penyajian Berita Pada Dummy Standar Koran Tiga

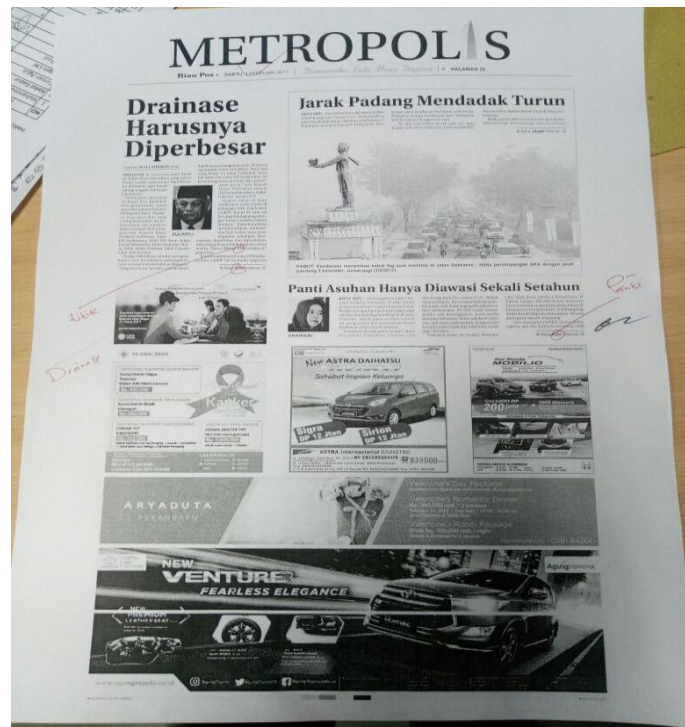
Setelah berita tersebut dilayout, maka hal yang akan di lakukan adalah pengecekan. Furqon menuturkan terdapat tiga tahapan pengecekan setelah proses layouting tersebut. Proses tersebut adalah:

- 1) Pada Redpel. Halman yang sudah dikerjakan redaktur harus *acc* atau di setuju dulu oleh redpel. Kontrol diutamakan pada berita yang tak boleh sama dengan berita pada sesi koran lain (misal berita yang ada pada koran pro-tonomi dengan koran metropolis) .
- 2) Pada Wapemred. Halaman baru boleh dicetak (*fiat to print*) setelah ada persetujuan pemred, yang pada kesehariannya diwakili oleh Wapemred.
- 3) Wapemred perwajahan. Mengecek tampilan halaman apakah sesuai dengan standar Riau Pos. Pada praktiknya, pengecekan perwajahan dilakukan pertama sebelum pengecekan redaktur pelaksana dan wakil pemimpin redaksi.

Berita karhutla yang akan naik cetak terlebih dahulu di diskusikan dengan forum informal yang biasa dilakukan oleh pemred dan penanggung jawab koran (redpel) dan halaman terkait. Hal tersebut berkaitan dengan tahap pengecekan tahap pertama setelah melalui tahap *layouting*. Setelah itu setiap pukul 22.00 WIB pemred akan melakukan pengecekan kembali untuk berita karhutla yang akan naik cetak dan sudah di cetak pada pukul 24.00 WIB. Proses pengecekan tersebut adalah sebagai berikut :



2.8 Pengecekan Berita Karhutla Oleh Redaktur Pelaksana Sebelum Naik Cetak



2.9 Tahap Pengeditan Berita dengan Cetakan Berukuran Kertas Folio

Proses pengecekan berita dilakukan antara redaktur pelaksana dan penanggung jawab perwajahan seputar tidak ada kesamaan berita antar kolom dan pengecekan penulisan. Berita-berita yang sudah melalui tahapan penulisan hingga pengeditan yang dilakukan oleh redaktur dan juga redaktur halaman maka, berita tersebut sudah dikatakan layak untuk naik cetak. Berita yang layak menurut para redaktur ialah yang memang memenuhi standar 5 w + 1 h dan yang terpenting ialah berita tersebut memang sudah sesuai *listing* yang dilakukan pada proyeksi sebelumnya. Ternyata, berita yang tidak di diskusikan ketika *listing* juga bisa saja menjadi layak untuk mengisi kolom yang ada ketika nilai bertanya lebih menarik dibanding dari *listing* awal yang mereka buat. Hal tersebut disampaikan oleh Firman Agus dalam proses kelayakan yang menjadi penting adalah menjaga kelengkapan berita, Meskipun lengkap belum tentu juga dikatakan layak untuk diberitakan, karena pemilihan narasumber ataupun nilai pentingnya. Kode etik dan konfirmasi adalah menurutnya, juga menjalankan SOP harus diperhatikan.

BAB III

EDITORIAL MIX: PADUAN REDAKSI RIAU POS TENTANG BERITA KARHUTLA

3.1 Pengantar

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana *editorial mix* atau paduan berupa arah peliputan dan juga gaya penulisan berita karhutla di Riau Pos. Kemudian bab ini juga akan memaparkan berita karhutla yang disajikan dalam surat kabar Riau Pos. Penyajian berita kebakaran hutan lahan dalam halaman koran harian Riau Pos dan berita pada *desk* lingkungan hidup yang khusus di halaman koran Minggu. Sub bab berikutnya juga berisikan editorial atau opini yang menunjukkan suara dari Riau Pos mengenai karhutla. Bab ini memaparkan kelanjutan dari gambaran subjek dan objek penelitian yang melatar belakangi penelitian.

3.2 Paduan Penulisan dan Arah Peliputan

Dalam penulisan berita di Riau Pos memiliki empat bagian koran. **Koran satu** Riau Pos, yang memuat berita tentang informasi internasional, nasional, berita iklan seputar bisnis, dan berita-berita politik berupa berita iklan maupun tidak. Berita koran satu termasuk jenis berita *strigt news* dan *hard news*. Dengan rubrikasi : nasional, opini, pro bisnis, komunikasi bisnis, dan politika. **Koran dua** berita Total Sport, koran ini berisi tentang pemberitaan seputar dunia olahraga dan kesehatan, juga informasi hiburan. Berita dalam koran dua dikemas lebih ringan meskipun berjenis *stright news*. Koran tersebut memiliki rubrikasi : arena, aktivitas, selebritis, AYO PSPS (Sumatera Net).

Koran tiga dengan berita pro-otonomi, yaitu berisi tentang ulasan berita dari berbagai daerah atau kabupaten di Riau. Tidak jarang berita yang dimuat berjenis *advertorial* ataupun *stright news*. Rubrikasinya ialah : pro-Siak, pro-Kampar, pro-Bengkalis, Pro-Rokan Hulu, pro-Dumai, pro-Kepulauan Meranti, pro-Pelalawan, pro-Indagiri Hilir, pro-Rokan Hilir, pro-Kuantan Singingi, dan Alumni. **Koran empat** Riau Pos adalah berita Metropolis yang berisi berita seputar Kota Pekanbaru dengan jenis berita *hard news*, *soft news* dan *features*. Rubrikasinya yaitu : metropolis, zetizen, dan metrokrim. Surat Kabar harian Riau

Pos berjumlah 36 hingga 40 halaman setiap terbitnya. Berita yang diterbitkan dikatakan layak terbit jika sesuai dengan apa yang dibicarakan pada rapat proyeksi dan apa yang menjadi isu nasional saat itu.

Untuk edisi hari Minggu, Riau Pos memiliki rubrikasi yang sedikit berbeda dengan koran harian. Perbedaan itu terletak pada tambahan rubriknya, yaitu : liputan khusus, bunda dan buah hati, Riau televisi-buku, kuliner, *tour, life health*, ranggi, jempana, esai, kembang, hari puisi, *car free day, save the earth*, dan *for us*. Rubrik yang ada pada koran harian akan tetap ada, namun dalam jumlah berita dan halaman yang lebih sedikit. Koran Hari Minggu berjumlah 32 hingga 36 halaman dengan jumlah 20 halaman untuk rubrik Minggu. Dengan jenis berita *soft news* dan *features*, berita Minggu memuat berita ringan dan berbeda dengan koran yang terbit pada hari Senin hingga Sabtu.

Menurut Hary B Koriun⁴, Riau Pos tidak memiliki paduan tertulis yang jelas tentang bagaimana *style* informasi dan desain visualnya, karena semua sudah berjalan dengan sendirinya. Namun, panduan tersebut tetap berlaku untuk divisi perwajahan di Riau Pos. Paduan tersebut digunakan untuk membuat gaya penulisan dan tata letak yang menggambarkan ciri Riau Pos.

Paragraph style Riau Pos:

Bodytext: utopia, regular, size 8,5 pt, leading 9,6 pt, horizontal scale 95%.

Judul utama: utopia, bold, size 60-75 pt, leading auto. Horizontal scale 80-100 %

Judul: utopia, bold, size 30-50 pt, horizontal scale 80-100 %

Dalam pemberitaan karhutla semua fakta di munculkan dan tentunya harus sesuai dengan kepentingan manajemen juga. Kebijakan redaksi ketika kasus krusial seperti kabut asap akan dibentuk rapat khusus yang diikuti oleh manajer dan pemimpin redaksi. Sebab, pemberitaan soal karhutla dan kabut asap juga perlu dilakukan penyetingan atau agenda *setting* seperti yang dilakukan media lain pada umumnya. Dalam wawancara tersebut Hary B Koriun juga menyampaikan bagaimana manajemen redaksi memberi pengaruh kepada ruang redaksi, menurutnya :

⁴ Harry B Koriun adalah seorang pemimpin redaksi portal *online* Riau Pos (Riaupos.co) 2015-2016, pernah menjabat selama tiga tahun sebagai wakil pemimpin redaksi Riau Pos selama tahun 2011 hingga 2014 .

....Manajemen Riau Pos saat ini dikendalikan langsung oleh pihak Jawa Pos Grup, sehingga bagaimana pemilihan pemimpin redaksi dan jenis berita yang akan naik harus tetap memberi keuntungan kepada Riau Pos yang merupakan anggota dari Jawa Pos Grup (Hary B Koriun, wawancara 24 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hary B Koriun dalam redaksi Riau Pos, target pembaca Riau Pos tidak berbeda dengan Jawa Pos Grup yakni para pembaca muda, sehingga pemimpin redaksi Riau Pos perjanuari 2017 juga berusia dibawah 40 tahun, agar konten surat kabar ini menarik pasar yang dituju tersebut. Sekitar 70 pelanggan tetap Riau Pos ialah dari instansi dan korporasi, sisanya adalah masyarakat. Secara umum pelanggan Riau Pos mengalami penurunan dari 20 ribu pelanggan menjadi 10 sampai 13 ribu pelanggan, tidak berbeda dengan oplah yang juga mengalami penurunan dari 30 ribu menjadi 23 ribu. Berita-berita karhutla yang ada di Riau Pos secara umumpun tidak menaikkan oplah produksi, namun menjadi berita yang harus ada setiap musim panas, mulai dari aspek terjadinya peristiwa, proses pemadaman, dan aspek pencegahan. Karhutla menjadi berita yang selalu diprioritaskan dalam kebijakan ruang redaksi. Pemberitaan seputar karhutla akan disajikan di beberapa *desk*, tidak hanya dalam rubrik lingkungan saja. Beberapa berita karhutla bisa menempati halaman koran depan ataupun koran dalam tergantung dari besar kecilnya karhutla yang terjadi.

Pemimpin redaksi Riau Pos menjelaskan tentang arah peliputan dimana hal tersebut merupakan kebijakan yang dimiliki manajemen dan pendiri, sehingga pemimpin redaksi hanya menjalankan sesuai dengan sistem yang sudah berjalan. Asmawai menyampaikan :

“....Kebijakan tertulis tidak dimiliki oleh Riau Pos, sehingga sistem kerja yang dilakukan terlebih dahulu harus dilaporkan secara langsung kepada pemimpin redaksi. Melalui proses tersebut akan mudah melakukan koordinasi antara berita yang sudah ada dan yang akan di terbitkan. Jurnalisme akomodatif dipilih Riau Pos sebagai arah dalam pemberitaannya. Gaya jurnalisme yang diterapkan oleh Riau Pos merupakan gaya tulisan bertutur dan lebih bercerita, hal itu yang dikatakan oleh seluruh anggota redaksi Riau Pos” (Asmawi Ibrahim, if wawancara 24 Januari 2017)

Sesuai dengan pernyataan dari pemimpin redaksi Riau Pos tersebut menunjukkan sebenarnya gaya penulisan berita yang menggunakan naratif (*story telling*).

Penulisan berita seperti ini menunjukkan bahwa penulisan berita pada koran lokal tidak seketat ketika menggunakan gaya piramida terbalik ala *stright news* (Santana,2005:29). Dengan gaya bertutur atau bernarasi menuntut kemampuan dari para wartawannya untuk bisa mengisahkan suatu peristiwa lebih dekat kepada pembaca. Gaya bernarasi ini terutama banyak diterapkan oleh wartawan Riau Pos dalam meliput berita lingkungan hidup. Keunggulan dari teknik penyampaian ini ialah membangun perasaan akan pengalaman bersama dan nilai bersama, yang pada hal tersebut dapat menarik dan mempertahankan perhatian (Santana, 2005:31). Media lokal seperti Riau Pos sepertinya mengandalkan teknik ini sebagai ciri khas yang dimilikinya. Tidak hanya itu, gaya akomodatif yang digunakan sebenarnya menunjukkan pula bahwa koran tersebut berusaha menjadi pihak yang objektif dalam menuliskan berita dan menentukan arah peliputannya. Namun kenyataannya, akomodatif tidak selamanya cukup menampilkan realitas yang sesuai di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Hary sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau di media itu ya, pengiklan di utamakan, tetap di beritakan mungkin lebih *soft*, disini sangat akomodatif, kita beritakan rilis mereka, secara *soft* dan ada konfirmasi dari mereka”(Hary B K, wawancara 4 Januari 2017)

Pernyataan tersebut disampaikan apabila perusahaan yang memasang iklan di Riau Pos terlibat pembakaran hutan. Maka jawabannya ialah sebisa mungkin Riau Pos tetap memberitakannya, namun jika diperhatikan praktik akomodatif yang mengakomodir dari berbagai sumber tersebut membuat pemberitaan menjadi tidak sesuai dengan yang ada pada realitas di lapangan.

3.3 Halaman Untuk Karhutla

Berita kebakaran hutan dan lahan di Riau Pos disajikan dalam beberapa rubrik. Hal tersebut dilakukan melihat dari jenis berita karhutla dan dampak yang ditimbulkannya. Menurut Desriandi Candra yang merupakan koordinator liputan Riau Pos, berita kebakaran hutan dan lahan yang sudah menimbulkan kabut asap baru akan muncul di halaman satu koran nasional, jika berita karhutla masih berupa kebakaran skala kecil dan belum menimbulkan asap maka akan diterbitkan pada halaman dalam yaitu koran Pro-otonomi sebab kebakaran masih berdampak

pada tingkat daerah saja, jika sudah berdampak hingga ke negara tetangga maka pemberitaan soal asap dan karhutla akan diletakkan pada halaman internasional. Berita karhutla yang lebih ringan (*soft news*) akan terbit pada koran hari minggu baik di halaman *save the earth* maupun halaman *for-us*.

Berita lingkungan di Riau Pos tidak hanya disajikan pada koran hariannya. Berita lingkungan yang menempati koran hari Minggu di Riau Pos memiliki tim khusus yang bertugas untuk menyiapkan berita Minggu. Tim Minggu terdiri dari empat orang yang bertugas meliput, menulis, sampai mengedit berita lingkungan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Mario Kisaz selaku penanggung jawab halaman lingkungan *For-Us*:

.....saya di sini mulai dari mengumpulkan bahannya, menulis, sampai mengedit, khususnya ya soal di *For Us* ini. Ada sekitar tiga halaman yang ditulis....(Mario Kisaz, wawancara 3 Januari 2017).

Berita lingkungan pada hari minggu merupakan berita lingkungan yang tidak ditangani langsung oleh lembaga liputan atau koordinator liputan dan wartawan harian. Sehingga berita lingkungan yang akan terbit pada hari Minggu, berdasar pada usulan dan liputan langsung yang dilakukan oleh Tim Minggu. Tim tersebut merupakan tim khusus yang menyajikan berita pada *desk* lingkungan dan *desk* liputan khusus yang terbit sebulan sekali pada Koran Minggu. Liputan khusus tidak hanya membahas persoalan lingkungan hidup.

3.3.1 Karhutla Minggu

Jenis berita kebakaran hutan dan lahan yang disajikan juga merupakan jenis *feature* atau lebih kepada *soft news*. Hal tersebut disampaikan oleh Mario Kisaz ada beberapa aspek yang membedakan di antara rubrik lingkungan hidup tersebut ialah, *for-us* merupakan berita lingkungan yang sedang hangat-hangatnya terjadi dan pada skala umum, rubrik *save the earth* mempublikasikan informasi lingkungan yang berbau lokal, sementara *car free day* merupakan rubrik mingguan yang menginformasikan berita lingkungan tentang aktifitas pada kegiatan mingguan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut. Persoalan lingkungan hidup yang diangkat akan mengisi tiga halaman Koran Minggu yang di dalamnya

akan menyajikan banyak ulasan dan analisis mendalam tentang persoalan lingkungan hidup.

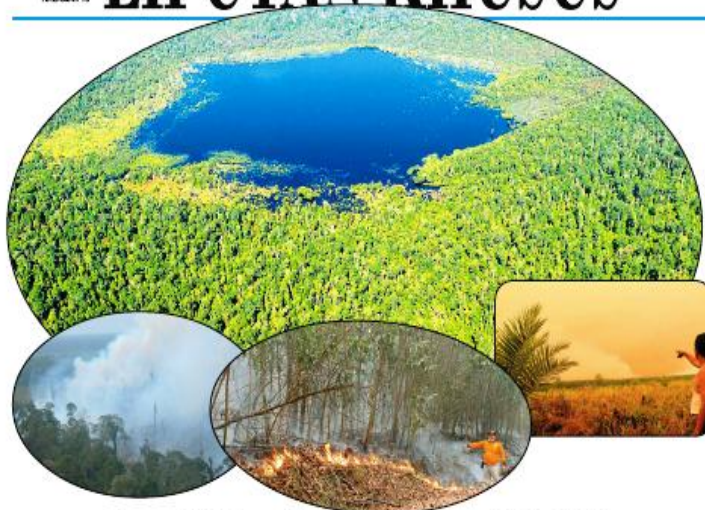
.....Kalau lipsus (liputan khusus) ini kami tidak di tugaskan oleh korlip, karena kami ada tim minggu jadi ya berbeda, kalau korlip kadang kami minta data dari wartawan harian, sekitar empat orang anggota minggu. Idenya dari tim lipsus juga. kan kalau yang harian cuma tau kulitnya saja karena *straight news*, sedangkan kami terjun berhari-hari dan tulisan hari Minggu juga kadang bisa digunakan oleh tim harian gitu.... (Kunni Masrohanti, wawancara 4 Januari 2017)

Space khusus ini dimanfaatkan untuk memberitakan kegiatan *save the earth* yang merupakan yayasan yang didirikan oleh Riau Pos pada tahun 2009 untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Sehingga berita lingkungan pada rubrik *save the earth* tidak banyak berbicara masalah kasus lingkungan hidup yang terjadi atau berdampak pada skala Nasional. *Save the earth* akan menyajikan berita lingkungan hidup dengan skala lebih kecil atau daerah, yang disajikan dengan bahasa lebih ringan dari berita lingkungan pada Koran harian.

Berita kebakaran hutan dan lahan yang diliput oleh tim Minggu memiliki perbedaan dari berita karhutla yang terbit di koran harian. Berita karhutla minggu akan disajikan dengan memberi sudut pandang yang berbeda dari kejadian karhutla tersebut. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab rubrik *For Us*:

.....Seperti, dia sebenarnya untuk karhutla tidak monoton di For Us. kita pernah muat di harian di halaman satu yang soal homo asapiens itu. karena kita Koran besar, jadi kita ingin membuat lebih dari yang lain, jadi ya isinya lebih ke solusi, ada hal baru ada sesuatu yang lebih maju dari Koran lain, tidak hanya soal korban jiwanya saja. Kita sudah punya TOR kita rapatkan, dan kita komunikasikan, isinya apasih yang mau kita buat nih, kemudian jadilah kerangka untuk kita jadikan tulisan ini, rapatnya senin dan jumat. Kita bahas mana yang menarik dan kita evaluasi juga. kita diskusikan (Mario Kisaz, wawancara 3 Januari 2017)

LIPUTAN KHUSUS



Menyusuri Jejak Perambah dan Karhuta di Cagar Biosfer GSK-BB Tuan BM dan BK 88 yang Ditakuti

Berita karhuta terbit pada halaman liputan khusus 16 Maret 2014

Berita kebakaran hutan dan lahan juga disajikan dalam rubrik liputan khusus. Rubrik tersebut memang dikhususkan untuk peliputan yang memerlukan investigasi langsung ke lapangan oleh wartawan. Wartawan yang ditugaskan juga merupakan wartawan yang tergabung dalam tim liputan khusus atau yang biasa disebut dengan tim Minggu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hary B Koriun (pemimpin redaksi Riau Pos online), liputan khusus sejak akhir 2016 kemarin hanya muncul setiap satu bulan sekali, hal tersebut berdasarkan pada keputusan manajemen Riau Pos Grup yang menggantinya dengan berita iklan kuliner, yang lebih banyak menghasilkan profit bagi perusahaan.⁵

3.4 Berita karhuta terbit pada halaman liputan khusus 16 Maret 2014

Berita kebakaran hutan dan lahan juga disajikan dalam rubrik liputan khusus. Rubrik tersebut memang dikhususkan untuk peliputan yang memerlukan investigasi langsung ke lapangan oleh wartawan. Wartawan yang ditugaskan juga merupakan wartawan yang tergabung dalam tim liputan khusus atau yang biasa disebut dengan tim Minggu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hary B Koriun (pemimpin redaksi Riau Pos online), liputan khusus sejak akhir 2016 kemarin hanya muncul setiap satu bulan sekali, hal tersebut berdasarkan pada keputusan manajemen Riau Pos Grup yang menggantinya dengan berita iklan kuliner, yang lebih banyak menghasilkan profit bagi perusahaan.⁵

⁵ Wawancara 28Desember 2016 dengan Hary B Koriun yang pernah menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi selama tiga tahun berturut

3.3.2 Karhutla Harian

Berita-berita soal karhutla di surat kabar harian Riau Pos dikerjakan oleh reporter harian yang bertugas di daerah atau Kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Reporter dengan *beat* atau penugasan pada posko Lanud dan Polres juga meliput kasus karhutla yang bersumber dari posko tempat mereka bertugas. Berita karhutla dari tim harian tersebut akan disajikan pada rubrik Nasional, Internasional, Pro-otonomi, dan Metropolis sesuai dengan lokasi dan dampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut. Berita karhutla yang muncul pada koran harian di kontrol langsung oleh seorang koordinator liputan yang dibantu oleh dua asisten koordinator. Sehingga, berita-berita karhutla tersebut bisa disajikan atau layak menjadi berita. Desriandi Candra memaparkan jumlah berita karhutla yang ditugaskan korlip kepada para reporter minimal sebanyak tiga berita dari jumlah enam berita yang ditugaskan dalam seharinya. Berita-berita karhutla yang disajikan pada koran harian akan berbentuk *straight news* berbeda dengan berita yang disajikan oleh tim Minggu. Hal serupa juga dipaparkan oleh Candra bagaimana proses peliputan yang dilakukan oleh wartawan yang mengisi rubrik harian berita karhutla.

...Ya saya mengontrol proses mereka mencari berita, tapi itu lebih ke asisten korlip, kalo berita gede kita suruh tajamkan lagi dengan suruh datang ke lokasi langsung. Dan kalau untuk karhutla sebagian besar wartawan yang kami tugaskan ya wartawan yang lebih senior dari wartawan lain atau sudah punya pengalaman sendirilah. sehari aja bisa 100 berita karhutla dulu kalau lagi parah itu, bisa kami ambil lima *angle* sekali pemberitaan. Ya kami sentil pemerintah dan kami tekan perusahaan dengan lahirnya desain *cover* homoasapien tahun 2015 itu karena parah sekali..... (Desriandi Candra, wawancara 26 Desember 2016).⁶

⁶ Desriandi Candra adalah koordinator liputan atau di Riau Pos menggunakan istilah penanggung jawab liputan, yang memimpin lembaga liputan di redaksi. Desriandi menjadi koordinator di Riau Pos sejak 2014 hingga tahun Januari 2017.

Asap Selimuti Malaysia



PROTES ASAP: Seorang anak perempuan di Malaysia memakai masker memegang plakat selama protes atas kondisi kabut asap di luar Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Jumat (18/9/2015). Hingga Ahad (27/9/2015) kabut asap semakin pekat terjadi di Malaysia.

Laporan IFC, Kuala Lumpur

KABUT asap tebal kembali menyelimuti berbagai wilayah di Malaysia, pada Ahad (27/9). Akibatnya, kualitas udara saat ini berada pada tahap tidak sehat. Selain itu, jarak pandang warga menjadi terbatas.

Berdasarkan pengamatan, pekatnya kabut asap terjadi di kawasan sekitar Lembah Klang seperti Subang, Shah Alam, dan Petaling Jaya. Di wilayah tersebut jarak pandang kurang dari 500 meter.

Masyarakat setempat menggunakan masker dalam beraktivitas. Puncak gedung-gedung tinggi diselubungi asap, termasuk menara kembar Petronas yang hanya terlihat samar.

Suasana siang hari nampak seperti mendung, karena cahaya matahari tidak mampu menembus tebalnya asap. Selain itu, matahari hanya nampak seperti bulatan merah.

Pejabat Meteorologi, Pusat Cuaca Nasional Dr Mohd Hisham Mohd Anip memperkirakan bahwa kondisi seperti ini akan berlangsung hingga akhir bulan. Namun, prediksi ini masih bisa berubah, karena semua hal terkait sangat bergantung pada arah pergerakan angin.

"Bacaan indeks pencemaran udara (IPU) meningkat di beberapa kawasan di Wilayah Persekutuan, Terengganu, Pahang dan Melaka," katanya.

Beberapa penerbangan di negara ini juga terpaksa ditangguhkan akibat kabut asap. Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang sempat ditutup pada Sabtu (26/9) pukul 16.00 waktu setempat, dan dibuka kembali pada pukul 19.30 waktu setempat. "Kami terpaksa tutup sementara lapangan terbang setelah jarak pandang hanya 50 meter. Operasi Lapangan Terbang Antarbangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan KLIA2 di Sepang masih berjalan seperti biasa," kata Kepala Departemen Penerbangan Sipil Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. (int/mag)

Masjid Ter

LONDON (RP) - Masjid Ba ul Futuh di Kota London, Inggris, dilaporkan terbakar pada Sabtu (26/9). Sebanyak 70 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Setengah di antaranya dikerahkan ke lokasi masjid tersebut sudah terbakar. Menurut Pemadam Kebakaran London (LFB), siaga masih berlangsung di masjid yang terletak di Jalan London Way, Morden, tepat di sebelah sel



PIXMA
Quality Promise
MAKIN HE
TETAP HE
PIXMA Ink Efficient
Print - Smart - Copy - V101
Dengan kualitas cetak terbaik, PEBAT, menawarkan kemampuan cetak yang lebih baik menggunakan printer Canon PIXMA. Lebih cepat, lebih cerdas, lebih hemat biaya cetak per halaman (PPH).

Gambar 3.5 Berita karhutla pada halaman Internasional 28 September 2015

Pada rubrik internasional berita karhutla yang disajikan merupakan kasus karhutla yang sudah memberi dampak asap hingga kepada Negara tetangga. Berita-berita karhutla pada rubrik internasional banyak memuat sudut pandang dari pemerintah luar negeri dan pemerintah dalam negeri dalam penanganan kasus tersebut. Kemudian, berita karhutla akan muncul pada rubrik pro-otonomi jika kasus tersebut terjadi di satu kabupaten di Riau dan tidak memiliki dampak sebesar berita karhutla yang muncul pada rubrik nasional ataupun internasional.

PRO-OTONOMI

Riau Pos • SELASA, 8 SEPTEMBER 2015 • HALAMAN 21



Jadikan bank riaukepri sebagai Pilihan Masyarakat

PERUBAHAN JAM PERBANGKAN
• Pekanbaru - Surabaya
• Surabaya - Pekanbaru
• Pekanbaru - Jakarta
• Jakarta - Pekanbaru

Isak Tangis Warnai Salat Istisqa

Laporan HASANAL BIKRIANI dan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
hbs@siaranews.com

KABUT asap pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru, Senin (7/9) pagi. Namun tidak menyurutkan semangat ribuan umat Islam un-

tersebut beribadah karena mereka meng- lakukan tawar-menawar dengan Allah SWT. Mereka berdoa agar hujan segera turun dan kabut asap segera hilang. Lebih kurang 1.000 umat Islam dari berbagai komunitas, mulai

pejabat hingga rakyat berkumpul di halaman Masjid Istisqa, agar Allah menurunkan hujan dituntun Lailaningsih. Lailaningsih adalah salah satu tokoh masyarakat Pekanbaru yang dikenal sebagai tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan. Dia adalah pengurus Dewan Masjid Istisqa dan juga ketua Dewan Masjid Istisqa.



SALAT ISTISQA: PE Gabri H ArsyadJuliandi Raohman bersama Danrem 031/WB Brigjen TNI Nurendi, Kapolresta Pekanbaru Kombes Drc Arles Syarif Hidayat MM dan masyarakat melaksanakan Salat Istisqa di halaman Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Senin (7/9/2015).

Gambar 3.6 Berita karhutla pada halaman pro-otonomi 8 September 2015



GUNAKAN MASKER: Anggota LAZ Alfikri membentangkan spanduk dan mengajak masyarakat menggunakan masker menghindari penyakit akibat asap.

LAZ Alfikri Bagikan 1.000 Masker

KOTA (RP) - Guna membantu masyarakat yang terkena dampak asap yang membahayakan

Civitas Unri Gelar Salat Istisqa

Laporan ERWANSANI,
Pekabaru
redaksi@riapos.co.id

BERTEMPAT di Lapangan terbuka halaman rektorat Kampus Universitas Riau (Unri) seluruh civitas dari jajaran pimpinan, dosen, pegawai, karyawan dan mahasiswa mengikuti salat istisqa (salat minta hujan) Sabtu pagi pukul 08.00 WIB.

Hal ini dilakukannya pihak civitas Unri mengutip kondisi kabut asap yang semakin parah dan kemarau panjang yang melanda Provinsi Riau membuat Unri merasa tergerak untuk berkontribusi memanasikan bencana tahunan ini.

Salat istisqa ini dilantani usaz Tajudin Nur Le dan khatib Dr Damsan Yahya Lc. Meski salat istisqa ini tidak telah namah diikuti, namun salat meminta hujan ini juga berlangsung khilmat diikuti oleh jemaah.

Rektor Unri Prof Dr Ir Aras



SALAT ISTISQA: Civitas akademika Unri saat menggelar salat istisqa di kampus Unri, Sabtu (5/9/2015) kemarin.

Muhyadi DEA mengharapkan setelah dilaksanakannya salat meminta hujan ini dilakukan oleh civitas Unri dan beberapa instansi lainnya Allah SWT segera menurunkan hujan.

"Hari ini kami memohon

kepada Allah SWT untuk menurunkan hujan di bumi Lancang Kuning, sehingga kabut asap yang menutupi-jumlah wilayah Riau bisa hilang dan aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik," kata rektor kepada Riau Pos.

Ia juga menyebutkan dalam mengatasi kabut asap ini ada tiga cara pencegahan, pengurangan dan rehabilitasi. "Kami Unri, red juga meningkatkan peran untuk pengalihan hutan lebak baik itu agar dikemudian hari

bencana asap tidak terulang setiap tahunnya. Selain itu, edukasi lainnya adalah KKN kebangsaan yang berakut 31 Agustus lalu dimana temanya adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat," ujarnya (mgf/

3.7 Berita soal karhutla pada halaman Koran Metropolis 6 September 2015

Desriandi juga menyampaikan bahwa berita karhutla yang ditampilkan pada rubrik metropolis merupakan dampak dari karhutla yang terjadi pada lingkungan Kota Pekanbaru. Berita karhutla akan masuk pada rubrik nasional dengan halaman utama koran Riau Pos jika kasus tersebut berdampak besar dan menjadi pembicaraan pada media nasional atau *mainstream* yang ada.

Presiden SBY: Padamkan Api, Hilangkan Asap

Sambungan dari hal. 1

"Kalian tahu tugasnya apa?" tanya SBY tegas saat memberikan arahan kepada gabungan tentara di posko BNPF Kimbo Panjang, Kecamatan Tambora, Kabupaten Kampar, Sabtu (15/4) sekitar pukul 17.40 WIB. Saat itu SBY didampingi Bupati Kampar Jefry Noer, Gubernur Riau Anas Maamun dan sejumlah petinggi negara. "Siap tahu!" jawab tentara itu serempak. "Padamkan api, hilangkan asap. Ini adalah operasi tanggap darurat. Operasi militer selain perang. Cari titik api dan padamkan. Tangkap yang membakar lahan dan penjarakan. Selamat bertugas. Tuhan bersama kita," kata SBY.

Arahan itu disampaikan dengan tegas dan singkat. SBY sendiri hanya sekitar 15 menit di sana. Selanjutnya, SBY kembali ke lapangan udara Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Sebelumnya, SBY direncanakan akan menginap di Bangkinang. Malamnya menggelar pertemuan dan jamuan makan serta besok (hari ini) melihat titik api. Namun, rencana tersebut batal dan SBY menginap di Pekanbaru.

Jefry Noer, Bupati Kampar saat mendampingi SBY juga mengatakan, Pemkab Kampar sudah berupaya memadamkan titik api yang muncul di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) antara Pemerintah Daerah-Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Pelaksana *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (BP REDD+) di lantai tiga kantor Gubernur Riau pertengahan Februari lalu, Jefry sudah menawarkan berbagai solusi soal penanggulangan kebakaran.

Kalau memang mau serius kata Jefry, siapkan dana khusus di APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana dan pembiayaan penghijauan. "Regulasi anggaran ini juga musti jelas. Biar kita tak dikajar bayangan saat memaknai. Lalu kita bikin skenario dan penataan yang benar soal lahan ini. Biar kerja kita

tidak berulang-ulang," pintanya. Jefry menyebutkan, tanpa adanya anggaran khusus untuk penanggulangan Karhutla ini Pemerintah Daerah bakal kesulitan terus. "Sebab salah-salah pakai duit, alamat pemereksa justru yang datang. Saat ini sulit, ketika benar saja kita, kadang disalahkan," katanya.

Perusahaan Harus Bertanggungjawab

Saat berada Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Asap Riau, Lanud Rosmin Nurjadin, ketika memberikan pengarahan kepada pihak yang terlibat pemadaman api karhutla di Riau diantaranya anggota TNI, pemadam kebakaran dari perusahaan termasuk Team Fire Fighter RAPP, Presiden minta perusahaan di Riau ikut bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan.

"Saya akan undang pimpinan perusahaan di Riau besok (hari ini, red) untuk bersama bertanggungjawab mencegah kebakaran lahan ini," kata SBY. Dikatakannya pula, usai menggelar rapat dengan jajaran menteri dan Forkopimda Riau, sebuah keputusan penting akan diambil dalam waktu dekat terkait Karhutla yang rutin terjadi. "Lusa saya akan ambil kebijakan yang penting," ucapnya.

Ia meminta saat ini semua pihak dapat fokus untuk terlibat dalam menangani permasalahan kabut asap. "Yang penting, dalam tiga minggu ini kita selesaikan kerja kita. Banyak orang yang tak berdos menjadi korban," ucap SBY. Karena itu, ia meminta dengan tegas agar siapapun yang bertanggungjawab atas terjadinya karhutla ditindak. "Orang-orang yang tidak bertanggungjawab penyebab ini harus ditindak tegas," tegasnya. Menutup arahan yang diberikannya, SBY kembali menegaskan bahwa operasi tanggap darurat yang dilakukan kini jadi fokus. "Kita lakukan operasi tanggap darurat yang massif. Apakah kita siap?" tanyanya. "Siap," jawab tim yang diberi arahan.

Hujan Mengguyur Menjelang Tiba

Kedatangan SBY di Riau disambut hujan lebat. Hal ini membuat presiden tertunda dua jam tiba di Pekanbaru. Kedatangan ini sendiri sempat ditangguh dalam beberapa skenario. Awalnya

ya karena kabut asap tebal yang menyelimuti Riau, SBY direncanakan akan datang ke Riau melalui darat dari Bandara Internasional Minangkabau. Rencana lain, SBY akan ke Riau melalui Batam, Kepulauan Riau ke Kota Dumai. Namun, kedua rencana tersebut akhirnya batal setelah pada Sabtu (15/3) cuaca terlihat bagus, kabut asap berkurang dan jarak pandang mencapai 1.500 meter hingga memungkinkan dilakukannya penerbangan langsung ke Pekanbaru. Presiden berangkat ke Pekanbaru menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor body pesawat PK-GMF. Ia bertolak dari Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo, sekitar pukul 12.30 WIB.

Menjelang kedatangan RI 1 ini, seluruh jajaran di bawahnya bersiap. Mulai dari jajaran pimpinan daerah di Riau, Gubernur, Anas Maamun dan bupati-bupati, Danrem 021/Wirabala, Brigjen TNI Prihadi Agus Riyanto dan kodim dibawahnya, hingga Kapolda, Brigjen Pol Condro Kirono MM MHum sudah sama jajaran polresnya. Hadir pula sebelum kedatangan SBY, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko dan Kapolri, Jenderal Starmam.

Jelang kedatangan ini, rintik hujan sudah mulai turun di Pekanbaru sekitar pukul 13.00 WIB dan mulai membesarkan hingga akhirnya deras sampai pukul 15.00 WIB.

Akibat hujan ini, pesawat yang ditumpanginya Presiden dialihkan sebentar ke Bandara Hang Nadim, Batam Kepulauan Riau. "Diperkirakan tiba sekitar 14.45 WIB mendarat di Pekanbaru. Karena hujan lebat, pesawat Presiden dialihkan (divert) dan mendarat sebentar di Hang Nadim Batam. Sekitar pukul 15.00 WIB, berangkat dari Batam menuju Pekanbaru tiba pukul 16.05 WIB," kata Kapentak Lanud Rosmin Nurjadin Pekanbaru, Mayor Sus Fil Fadri. SBY turun dari pesawatnya menggunakan baju batik coklat dan celana berwarna coklat. Didampingi, Gubernur Riau, Anas Maamun, dan jajaran Forkopimda Riau, ia bergabung masuk ke gedung Satya Pandawa, Lanud Rosmin Nurjadin. Posko Satgas Tanggap Darurat Penanggulangan Asap Riau (atg/sus/why)

3.8 Berita karhutla pada halaman nasional 16 Maret 2014

Kritik utama pada halaman karhutla yang disajikan oleh Riau Pos ialah bagaimana bisa liputan mendalam tentang karhutla hanya disajikan pada hari Minggu saja. Bukankah seharusnya riset, dan investigasi juga harus dilakukan ketika peliputan mengenai persoalan lingkungan hidup tersebut? Tidak hanya pada hari Minggu saja, melainkan penting pada berita karhutla harian juga. Sebab pada praktiknya jumlah halaman yang disediakan oleh Riau Pos untuk persoalan karhutla memang dikatakan cukup jika dibandingkan dengan media nasional yang sangat banyak memberi ruang kepada isu politik dan ekonomi saja. Permasalahannya bukan hanya pada ketersediaan ruang, tapi kepada bagaimana jurnalis yang membingkai persoalan karhutla yang ada. Menurut Kunni:

“di lipsus itu kan tulis panjang, soal karhutla atau kasus lain, indepth interview dan investigasi biasanya, sampai ke titik api dan titik asap, lebih rumit, detil, beresiko, lama, menyerap waktu dan tenaga, kalau yang lain ya berita biasa, lebih ke *straight news* aja, jadi gak rumit gini” (Kunni Masrohanti, wawancara 4 Januari 2017)

Namun, tidak dipungkiri memang banyaknya halaman yang diberikan untuk berita lingkungan di hari Minggu menjadikan berita-berita lingkungan salah satunya soal karhutla menjadi semakin rumit peliputan dan semakin banyak menyampaikan analisis dan temuan dari wartawan Minggu dibanding wartawan harian. Kritik ini muncul bukan untuk penyediaan halaman yang ada untuk kasus karhutla, melainkan bagaimana jurnalis harian harusnya ajuga mampu menyajikan berita yang kompleks dengan keterbatasan halaman yang disediakan pada koran harian. Hal tersebut disampiakan Suroso (2001 : 75), jurnalis menjalankan kegiatan jurnalistik yang bertujuan untuk mencari fakta dalam kegiatan investigasi, yang berarti kegiatan tersebut tidak hanya mengandalkan pada tulisan semata melainkan juga pada proses pencarian datanya. Penyebutan jurnalis lingkungan hidup sebenarnya tidak berbeda dengan penyebutan jurnalis politik, jurnalis olahraga, ekonomi dan sejenisnya. Olehnya, perlu sekali penerapan peliputan oleh wartawan harian dengan meniru kinerja wartawan Minggu dalam meliput persoalan karhutla dengan mengandalkan riset dan observasi langsung

dilapangan agar tulisan soal karhutla bukan sekedar ada saja dengan jumlah kolom yang minim tersebut.

3.4 Editorial : Sikap Riau Pos Terhadap Isu Karhutla

Selama penelitian ini dilakukan, peneliti melihat bahwa tidak ada opini atau tajuk rencana yang khusus tentang karhutla. Tidak adanya tajuk rencana tentang karhutla sebenarnya menunjukkan bagaimana sikap Riau Pos dalam melihat permasalahan karhutla tersebut. Sehingga, hasil observasi tersebut dapat dijadikan peneliti untuk melihat sejauh mana perhatian media dalam mendiskusikan persoalan lingkungan hidup kepada pembaca. Tajuk sebenarnya digunakan sebagai bentuk representasi media terhadap menyikapi suatu isu atau realitas yang ada. Dalam beberapa media, tajuk bisa memiliki beberapa sebutan seperti editorial, intisari, dan tajuk atau juga istilah lain yang khas dengan media tersebut. Tajuk yang dituliskan oleh pengelola media biasanya menggunakan bahasa resmi dan baku, yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang digunakan harus memperlihatkan cara berpikir dalam menganalisis permasalahan dalam pencarian jalan keluar (Koesworo 1994 dalam Ermanto 2005:70-71).

Tajuk rencana atau yang pada Riau Pos disebut dengan halaman opini, ketika terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 12 hingga 15 Januari malah membahas tentang: *Penerus Proklamator di Pusaran Kasus Nasional, Berita Hoax dan Perang Opini, Ketika SMA/SMK Dialihkan*. Tajuk rencana dengan judul “penerus proklamator di pusaran kasus nasional” tersebut menceritakan bagaimana adanya fenomena makar yang dilakukakan oleh salah satu anak dari proklamator Ir. Soekarno. Dalam pemaparannya, tajuk tersebut menggambarkan fakta bagaimana makar tersebut terjadi dan bagaimana ironi dari seorang putri proklamator yang justru melakukan makar. Kemudian, tajuk tersebut memuat opini dari bagian editorial yang menunjukkan bahwa perlunya perekat bangsa dan opini tersebut menggambarkan bagaimana Riau Pos mengamini bahwa hal tersebut sebagai kondisi bangsa yang perlu diperhatikan. Kemudian, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tajuk rencana tersebut ialah,

seberapa pentingkah fakta-fakta yang akan dijadikan tajuk rencana?, adakah pengaruh dan solusi yang diberikan kepada pembaca?, terbuka kah ruang diskusi pada tajuk rencana yang dibuat? Jika diteliti lebih lanjut, diangkatnya fakta tersebut menjadi tajuk rencana edisi 12 Januari sebab fakta tersebut sudah lebih dulu menjadi bahasan pada berita nasional. Praktikanya, Riau Pos merupakan media lokal yang masih mengikut apa yang menjadi perhatian utama media induknya yaitu Jawa Pos Grup. Dalam hal ini, Riau Pos juga mengambil sikap sebagai media yang memperhatikan apa yang menjadi isu nasional. Lalu, permasalahan utamanya ialah, pada saat opini dibuat, kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi, tidakkah baiknya media lokal ini lebih memperhatikan opininya akan isu lokal yang terjadi di sekitarnya?

Hal lain yang perlu diperhatikan selain pemilihan fakta dalam pembuatan tajuk rencana ialah. Interpretasi sebagaimana dalam Santana (2005) menjelaskan bahwa unsur tersebut merupakan proses penting dalam menjelaskan fakta yang ditemukan. Lalu, sejauh mana tajuk rencana yang disajikan Riau Pos diinterpretasikan? Kritik dalam pembuatan tajuk rencana edisi 12 Januari 2017 tersebut ialah bagaimana banyaknya penjabaran fakta yang ada di lapangan tanpa memberikan interpretasi, menjelaskan latar belakang terjadinya suatu permasalahan, kurangnya pengungkapan suatu fakta lain dibalik fenomena yang dituliskan. Tidak hanya itu opini yang disampaikan juga sangat dangkal. Bagaimana tidak, seharusnya opini dari suatu media mampu menggambarkan jalan keluar, membangkitkan diskusi pembaca, dan menggambarkan sikap jelas media akan suatu fakta (Santana, 2005:66-67). Opini yang disampaikan dalam tajuk rencana tersebut hanya berisikan satu baris paragraf yang menuangkan uneg-uneg penulis bahwa hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi pada bangsa kita saat ini dan ditutup dengan harapan agar bangsa ini tetap sesuai dengan harapan para proklamatornya. Kemudian, sedangkal itu kah sikap media menunjukkan posisinya? Tidak berhenti disitu, tajuk rencana edisi 13 Januari 2017 pada hari berikutnya ketika karhutla kembali terjadi ialah mengangkat tema tentang “*hoax*”.

Pertanyaan tersebut muncul kembali ketika penelitian berlangsung, ternyata jawabannya ialah tidak lain berkaitan dengan apa yang diangkat dan menjadi pembicaraan oleh masyarakat nasional atau kebanyakan. Tidak heran pada saat itu pemberitaan tentang dampak berita *hoax* yang ada di media sosial memang menjadi *trending*. Pada bahasan tajuk rencana edisi Jumat 13 Januari tersebut, ternyata banyak fakta yang dipaparkan oleh editorial. Berbagai interpretasi juga dituangkan dalam tajuk kali ini. Pandangan lain juga dijelaskan menyoal *hoax* tersebut hingga lahirnya opini yang jelas dari editorial mengenai permasalahan utama akan kasus *hoax* tersebut. Yang mana menurutnya kasus tersebut bukanlah permasalahan, melainkan bagaimana kebijakan dari pemerintah. Tidak hanya itu, tajuk rencana kali ini ternyata tetap membahas sambungan dari soal makar yang dilakukan oleh putri poklamator tersebut yang juga ada kaitannya dengan *hoax* tersebut. Ternyata dalam dua hari tersebut, persoalan makar masih menjadi perhatian utama dari media. Hal yang coba dikembangkan lagi dalam isu *hoax*. Sudah jelas jika dalam hal ini tajuk rencana yang muncul dan di analisis ialah yang menjadi perhatian masyarakat luas (Ermanto, 2005:71).

Tajuk rencana pada hari berikutnya yaitu 14 Januari 2017 dimana karhutla sebenarnya mulai memunculkan banyak titik api. Kasus ini tidak menjadi perhatian utama bagi media. Sehingga, wajar bila masyarakat tidak peduli ketika karhutla kembali muncul. Persoalan lainnya ialah, isu ini juga tidak menjadi perhatian bagi media nasional. Kesimpulannya, tajuk rencana yang akan dianalisis oleh editorial ialah isu yang memang sudah menjadi isu nasional. Berbeda halnya ketika karhutla sudah memberi dampak yang besar, seperti padatahun-tahun sebelumnya. Maka akan ada tajuk rencana berhari-hari pula mengenai persoalan ini. Kembali pada tajuk rencana 14 Januari yang berbicara soal SMA/SMK yang dialihkan. Pengalihan ini menjadi isu menarik nampaknya bagi tim editorial, sebab pada pemberitaan hari sebelumnya, kabar ini menghiasai *headline* surat kabar Riau Pos yang membahas tentang guru honore dan biaya masuk SMA/SMK. Dalam opini kali ini. Redaksi menyampaikan bagaimana banyaknya kepentingan lain yang menunggangi SMA/SMK, redaksi juga memberi opini hal tersebutlah sebagai potret pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Banyak fakta

yang dimunculkan dalam tajuk tersebut, pemikiran media juga tergambar bagaimana menyikapi kebijakan Pemprov tentang gaji guru honorer. Menariknya, tidak ada kaitan antara judul tajuk yang dimuat dengan isi dari tajuk itu sendiri. Judul mengindikasikan adanya pengalihan SMA/SMK, sedang isi berita adalah mengenai gaji guru honorer SMA/SMK, jadi seperti inilah sikap media yang tidak jelas memilah dan memilih penulisan tajuknya?

Beberapa tajuk tersebut menggambarkan kurang lebih sikap media dalam mengangkat fakta, menginterpretasikannya, hingga memberikan opininya. Fakta yang ditemukan memang tidak sedikit, namun opini yang diberikan sangatlah kurang kritis atas suatu fenomena, bagaimana tidak hal itu saja tergambar dari judul yang sangat berbeda dari apa yang ingin disampaikan pada isi tajuk. Beberapa tajuk yang dijabarkan dalam tulisan diatas adalah sebagai berikut:

4

OPINI

Riau Pos
KAMIS, 12 JANUARI 2017

TAJUK RENCANA

Penerus Proklamator di Pusaran Kasus Nasional

PUTRI-putri salah satu proklamator yakni Bung Karno tengah berada di pusaran kasus yang menyaingi perhatian publik, mulai kasus makar hingga dugaan kriminalisasi ulama. Yang pertama adalah Rachmawati Soekarno Putri. Rachmawati diduga terlibat kasus dugaan makar yang dituntut sebagai saksi superdamas 212 lalu. Rachmawati diduga sebagai salah seorang yang mengadakan rapat dengan maksud untuk mendatangi Gedung MPR dan memaksakan sidang untuk mengebalkan UUD 1945.

Upaya yang dilakukan Rachmawati dan kawan-kawannya inilah yang menurut aparat dikategorikan sebagai upaya pemufakatan makar. Sempat ditahan, Rachmawati akhirnya

dilepaskan. Tidak ada alasan yang cukup konkret saat Rachmawati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu akhirnya dilepaskan. Alasan sudah cukup tua dan sakit pun disampaikan aparat untuk tersangka makar itu.

Perlakuan berbeda diterima tokoh vokal lainnya Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas sebenarnya juga adalah keluarga proklamator lainnya Bung Hatta. Sri Bintang adalah saudara dari Sri Edi Swasono yang merupakan suami dari Mutia Hatta, putri kandung Bung Hatta. Tapi berbeda dengan Rachmawati, Sri Bintang justru ditangkap dan ditahan hingga saat ini.

Putri Bung Karno lainnya yang kini kembali

bersuara adalah Megawati Soekarno Putri. Lama tak bersuara, tiba-tiba pidatonya dalam HUT PDIP ke-41 di Jakarta Convention Center menghebat publik. Berbicara soal Pancasila dan keberagaman, Megawati dengan jelas menyampaikan keberpihakannya. Megawati seperti menunggu waktu untuk turun ke gelanggang, dan HUT PDIP ke-41 dimulainya merupakan waktu yang tepat. Dia menempatkan posisi sebagai tokoh politik yang menentang aksi umat Islam 212 lalu.

Lalu muncul pula Sukmawati Soekarno Putri. Sukmawati ikut bergabung dalam pusaran masalah ideologis ini dengan melaporkan Habib Rizieq ke aparat terkait dugaan pemencaran nama

baik dan Pancasila. Aparat pun seakan mendapat suntikan semangat untuk menindaklanjuti kasus ini. Panggilan pun dilayangkan dan babak baru dari ikutan kasus penistaan agama pun dimulai. Satu kasus berkembang ke kasus-kasus lainnya yang rumit, diselesaikan, dan seakan tak berujung. Sudah banyak yang diperiksa dan dijadikan tersangka dari satu kasus yang awalnya "hanya" penistaan agama biasa.

Dulu, Bung Karno dan Bung Hatta seaya sekata memperjuangkan negeri ini dan dipungkasi dengan proklamasi yang mereka bacakan. Kini, para penerus mereka berpisah jalan, bahkan dengan tega memencerakan yang lainnya, yang tak sejalan dengannya. Bahkan

sang putri proklamator pun terancam dipenjara karena diduga akan makar. Keluarga putra-putri proklamator ini seakan tak lagi peduli pada ideologi bersama yang pernah diucapkan dan diukuhkan bersama, dulu.

Inilah kondisi bangsa ini sekarang yang tentu perlu perekat dan rekonsiliasi besar. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada negeri ini? Pasti ada yang salah jika kondisi ini terus berlanjut. Aparat pun berada di pihak yang sulit untuk tidak memihak. Tapi ini pasti bisa diakhiri jika semua pihak mau menaruh diri, bukan dengan mengemukakan ego masing-masing. Semoga masih ada masa depan bagi negeri ini, seperti yang dicetuskan para proklamator itu.***

4

OPINI

Riau Pos
JUMAT, 13 JANUARI 2017

TAJUK RENCANA

Berita Hoax dan Perang Opini

MEDIA sosial (Medsos) menjadi perhatian publik. Terlebih, medsos menyebarkan berita hoax, maknanya harapan masyarakat agar media cetak dan televisi jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Namun bukan hanya media sosial, media cetak dan televisi pun agaknya sangat sulit memilah mana berita yang benar, dan mana berita yang hoax, saat ini.

Lalu bagaimana kata hoax yang menunjukkan pembuatannya ini muncul? Sebagai kalangan berpendapat istilah hoax atau kabar bohong merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri pada 1808.

Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni *hoax* dari mantra *hoax pocus*, yakni frasa yang kerap diucapkan oleh pesulap, serupa *sim salihim*. Asal kata ini

diungkapkan oleh filsuf Inggris, Robert Nares. Sementara Alexander Boese mencatat *hoax* pertama yang dipublikasikan adalah *almamok* atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Ia meramalkan kematian astrolog John Partridge.

Lalu bagaimana istilah *hoax* menjadi populer? Hal ini bermula sejak pemutaran film *The Hoax* yang dibintangi Richard Gere pada 2006 lalu. *The Hoax* adalah sebuah film drama Amerika yang rilis pada tahun 2006. Film *The Hoax* dianggap sebagai film yang banyak mengandungi kebohongan, sehingga kemudian banyak kalangan terutama para *netter* yang menggunakan istilah *hoax* untuk menggambarkan suatu kebohongan.

Nah, kembali soal banyaknya berita *hoax* yang

membuat pemerintah pun kewalahan. Bahkan pemerintah akan membentuk Badan Siber Nasional (BSN), agar info berita-berita *hoax* dikendalikan bisa dibenturkan.

Yang menjadi masalah, *hoax* politik saat ini cukup tinggi, karena tak lama lagi akan digelar pilkada serentak. Nah, berita *hoax* ini muncul selalu berdekatan dengan pilpres, pilkada dan pemilu legislatif, tentunya menjamurnya berita *hoax* menjadi ancaman stabilitas nasional. Selaku saya yang menjadi korban berita *hoax* adalah tokoh, baik tokoh nasional maupun lokal.

Balasanya lagi, bukan hanya masalah pilkada yang banyak saat ini, masalah ideologis pun menjadi persoalan. Jika selama ini anasir Islam dan nasional sudah tuntas, maka belakangan ini diperioalkan kembali. Kalangan nasionalis, terutama yang

berkuasa saat ini, mengklaim bahwa kalangan tertentu telah mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, masyarakat menilai penguasa yang berkuasa saat ini selalu saja menggunakan kata nasionalisme sebagai alasan untuk menegakkan kebijakannya. Penguasaan pihak asing di negeri ini demi bangsa, demi pembangunan dan demi-demi lainnya.

Munculnya pertentangan dan perbedaan pandangan saat ini membuat pemerintah yang berkuasa yang ditahkodai Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, menjalin komunikasi politik, mendekati rivalnya, yakni Prabowo, tokoh nasional dan ulama lainnya, bahkan Presiden seolah-olah memukulai orang sebagai ciri khas orang nabdhayin (NU). Kabinet pun sangat gemuk, semua parpol dimanfaatkan, namun tetap saja perlawanan pada pemerintahan tetap muncul, baik di

medsos yang benar maupun yang dianggap *hoax*.

Jika perang antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia ini perang dingin, maka perlakuan terhadap pemerintah saat ini pun bisa dikatakan perlakuan dingin. Lihat saja, putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri saat ini jadi tersangka. Demikian juga Dr Sri Bintang Pamungkas, selalu tokoh reformasi masih mendekam di penjara. Dan masih banyak tokoh lainnya yang diperiksa terangkut masalah tuduhan makar ini.

Jadi masalahnya bukan soal berita *hoax*, tetapi masalah kebijakan pemerintah yang berkuasa dan sikap rakyat. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap oleh rakyat tidak *pro-rakyat*. Bukan hanya kebijakan ekonomi yang dianggap mengancam rakyat, tetapi juga kebijakan hukum dan politik yang tidak berorientasi keadilan.***

TAJUK RENCANA

Ketika SMA/ SMK Dialihkan

KINI gaji guru SMA/ SMK dialihkan ke Pemprov Riau. Untuk tahap awal Pemprov Riau telah mencucukan lebih dari Rp30 miliar untuk membayar gaji 8.022 guru di SMA/SMK se-Riau. Masalahnya tidak hanya soal gaji guru ANS, ternyata jumlah guru non-PNS, ada dari honorer Pemkab/Pemko ada pula honor sekolah, jumlahnya cukup banyak. Tentunya akan menyedot dana APBD Riau. Pemprov tidak mau menerima seluruhnya guru honorer bulat-bulat. Pihak Disdik Provinsi akan menyeleksi ulang, melihat keperluan guru di masing-masing sekolah.

Yang menjadi pertanyaan, bukankah selama ini, guru-guru honor itu diperlukan dan bekerja sesuai dengan keperluan tenaga pendidik di sekolah mereka? Lalu mengapa harus diseleksi lagi? Muncul kekhawatiran, bahwa mereka akan

tergusur, bahkan yang jelas gaji mereka terancam tidak bayar, sebab belum ada anggarannya. Lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah dunia pendidikan, termasuk di dalamnya, anak didik, guru dan seluruh komponen pendidikan. Seharusnya masalah ini dilihat dengan jernih, tidak dilihat dari sisi anggaran saja. Sebab, membangun negeri bukan hanya gedung, tetapi sumber daya manusia.

Riau sebagai negeri yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, minimal dibandingkan provinsi tetangga lebih beruntung. Sudah sepatutnya tidak lagi mempersoalkan anggaran pendidikan. Jangan dianggap dana untuk pendidikan hilang sia-sia, ini merupakan investasi masa depan yang lebih baik.

Ada ungkapan, jika biaya menyekolahkan anak di

provinsi tetangga (Sumbar dan Sumut) jauh lebih murah dibandingkan di Riau. Ini menjadi pukulan bagi seluruh stakeholder di Riau, mengapa biaya pendidikan di "negeri di bawah minyak di atas minyak" ini lebih mahal. Artinya negeri ini sudah sepatutnya mengalokasikan dana yang lebih untuk pendidikan.

Untuk itu, kasus guru honor (Non-PNS) di seluruh SMA/ SMK di Riau harus diselesaikan segera. Jangan takut mengangarkan dana untuk kepentingan pendidikan. Lebih baik mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih, daripada menyebarkan sisa anggaran (Slip) ke pusat setiap tahun.

Kadang kita selalu berhemat-hemat dalam mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (pendidikan), namun

di sisi lain kita longgar untuk anggaran belanja aparatur seperti anggaran kunjungan, baju dinas dan lainnya.

Politik anggaran ini sangat berpengaruh pada pendidikan. Jika pemerintah tidak pro-pendidikan, maka dunia pendidikan dengan sendirinya akan lemah. Kasus peralihan wewenang guru SMA/ SMK ini sangat riskan, bisa membuat dunia pendidikan, khususnya tingkat menengah menurut kualitasnya.

Entah apa politik pendidikan mengapa guru-guru SMA/ SMK yang selama ini sudah nyaman mendapatkan gaji dari kabupaten/kota, kini mendadak harus dialihkan ke provinsi, secara nasional. Makanya Undang-undang No23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah digugat oleh Ketua Komite SMAN 4 Surabaya Bambang

Soenarko, Ketua Komite SMPN 1 Surabaya yang juga wali murid SMAN 5 Surabaya Emmy Ambar Sari, Radian Jaidi dan Wiji Lestari dan MK pun mengabdikan gugatannya.

Dunia pendidikan pun terganggu. Misalnya Pemkab Bengkalis, sebagai Kabupaten kaya, mereka mampu mengangarkan pendidikan yang lebih dibandingkan kabupaten lainnya di negeri ini, terpaksa melepas semua kebijakan untuk SMA/ SMK di Bengkalis. Jika saja keputusan MK membolehkan Pemkab mengangarkan untuk dunia pendidikan di tingkat SMA/ SMK, lagi-lagi sudah terlambat, sebab anggaran sudah ketek paku.

Inilah potret politik pendidikan di negeri ini. Dunia pendidikan ditumpang banyak kepentingan.⁴⁴

3.1 Tajuk Rencana Riau Pos Selama Kasus Karhutla Berlangsung

Beberapa unsur penting yang harus ada dalam tajuk rencana menurut Suherman dalam Santana yaitu, **fakta**: Tajuk atau editorial harus dibuat berdasarkan fakta. Tanpa fakta tentu sebuah opini akan menjadi fitnah, tentu kredibilitas media akan menjadi taruhannya nanti. Ke-dua yaitu **interpretasi**: Interpretasi bertujuan untuk menerjemahkan fakta yang ada menerangkannya menjadi suatu pesan yang memiliki jalan keluar. Kemudian, **opini**: yang merupakan pernyataan media terhadap persoalan terkait. Melalui pernyataan inilah terlihat bagaimana sikap sebuah media (Santana, 2005:66-67). Dalam hal ini, Riau Pos menunjukkan bagaimana pilihannya untuk menetapkan suatu tajuk rencana atau opini yang kadang sesuai dengan *headline* pemberitaan ataupun apa yang menjadi topik hangat dalam koran nasional saat itu. Riau Pos yang memiliki media induk Jawa Pos bisa saja tunduk kepada media besarnya untuk menentukan soal editorial atau tajuk rencana.

Sehingga, apa yang menjadi isu lokal belum tentu akan menjadi tajuk rencana di Riau Pos. Padahal, jika dilihat karhutla bukan hanya isu lokal saja, mengapa tidak untuk mengangkatnya dalam editorial meskipun kejadiannya belum sampai pada tingkatan nasional? Dari sini, sebenarnya tergambar bagaimana adanya pengabaian isu lingkungan pada tajuk rencana. Yang harusnya hal tersebut menjadi realitas yang patut untuk menjadi bahan diskusi bersama baik didalam ruang redaksi hingga akhirnya sampai kepada pembaca. Sehingga, terkadang realitas media menjadi sangat berbeda dengan realitas yang ada.

Fungsi tajuk rencana menurut William Pinkerton dalam Santana yaitu: Menjelaskan berita, tajuk sebenarnya dibuat untuk menjelaskan seberapa penting kejadian tersebut kepada masyarakat. Menjelaskan latar belakang, Tajuk haruslah menginformasikan berbagai hubungan yang terjadi pada berbagai peristiwa yang terpisah. Meramalkan masa depan, Isi tajuk kadang memaparkan analisis yang mengarah kepada bagaimana tindakan kedepannya dari peristiwa tersebut. Menyampaikan pertimbangan moral, tradisi jurnalisme yaitu menekankan pada nurani. Isu moral sebenarnya merupakan target penyampaian informasi oleh media. Maka dari itu, isi tajuk merupakan pertimbangan moral dalam menentukan hal yang salah atau tidak (Santana, 2005:69).

Tetapi tidak dengan tajuk rencana yang ada pada Riau Pos. Tidak selamanya isu yang penting akan menjadi tajuk rencana dan menuliskan realitas yang ada. Salah satunya tentang pembuatan editorial mengenai permasalahan lingkungan hidup. Jika diperhatikan ketika melakukan penelitian, tanggal 11 Januari hingga 15 adalah tanggal munculnya kembali karhutla setelah tahun 2016. Namun ternyata tidak semudah itu topik lingkungan menjadi perhatian bagi suatu media. Dari beberapa tajuk rencana tersebut, menunjukkan bahwa sikap, cerminan, dan visi misi yang dimiliki oleh Riau Pos tidak memihak kepada permasalahan lingkungan hidup. Jika iya, maka ketika karhutla muncul kembali harusnya isi tajuk rencana adalah yang berkaitan tentang opini media akan sikapnya mengenai permasalahan lingkungan di Riau yang tak kunjung usai tersebut. Belum ada kebijakan di Riau Pos untuk mengembangkan *angle* atau sudut pandang lain dari persoalan karhutla untuk memancing diskusi pembacanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengantar

Bab ini memaparkan temuan-temuan mengenai bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan oleh Riau Pos dalam memberitakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2017 di Riau. Aspek yang dibahas dalam bab ini ialah sesuai dengan proses peliputan berita dan jurnalisme lingkungan yang menjadi landasan berpikir pada kerangka pemikiran dan operasional.

Penelitian ini dilakukan pada Minggu kedua Bulan Desember 2016 hingga Minggu kedua Bulan Januari 2017. Meliputi pengumpulan data dari observasi proses kerja di redaksi, mengikuti rapat redaksi dan mengikuti peliputan yang dilakukan wartawan, pengumpulan berita karhutla dari tahun ke tahun hingga januari 2017 serta pengumpulan data dari wawancara pada pihak redaksi Riau Pos, meliputi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, layouter, koordinator liputan, reporter hingga koordinator lembaga swadaya masyarakat soal hutan dan lingkungan hidup di Riau yang menjadi data pendukung. Penelitian ini tepatnya dilakukan di Kantor Graha Pena Riau Pos Jl. HR Soebrantas Km 10,5 Kota Pekanbaru.

Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan empat berita kebakaran hutan dan lahan yang akan di analisis prosesnya. Keempat berita tersebut adalah (1) Tahun Ini Restorasi Gambut 400 Ribu Ha, 12 Januari 2017 (2) Pangdam Siap Kirim Pasukan, berita 12 Januari 2017 (3) Pesawat Tempur Pantau *Hotspot*, berita 13 Januari 2017, dan (4) Waspada Sebelum Membara, berita 15 Januari 2017. Karena topik penelitian yang khusus membahas proses pemberitaan karhutla, maka tidak mudah melihat prosesnya jika kasus yang berkaitan tidak terjadi. Sehingga, jumlah berita yang ada pada saat peneliti terjun langsung ke lapangan sangat terbatas. Maka, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

4.2 News Planning Redaksi Riau Pos

Pada praktiknya, rapat redaksi di Riau Pos tidak selalu dipimpin oleh pemimpin redaksi. Rapat dipimpin secara bergilir oleh wakil pemimpin redaksi yang merupakan penanggung jawab halaman atau lebih familiar dengan nama redaktur pelaksana kompartemen. Dalam rapat redaksi pada hari Rabu tersebut, agenda redaksi tidak menyinggung permasalahan mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan memang belum terjadi pada hari tersebut, dan media mainstream nasional belum ada yang membeberitakan persoalan karhutla. Pada praktiknya, berita yang akan dimuat pada halaman satu di Riau Pos, ialah berita nasional yang juga menjadi topik utama pada media-media nasional. Sehingga, pemberitaan yang bersumber dari wartawan Riau Pos yang bertempat di posko Jakarta akan selalu ditempatkan pada koran satu.

Kasus karhutla mulai kembali muncul pada 11 Januari 2017, yang mana kasus ini tetap menjadi bahan berita yang akan dimuat dan dibicarakan dalam ruang rapat redaksi oleh penanggung jawab liputan pada 12 Januari pukul 15.00 WIB pada saat itu. Rapat proyeksi dan evaluasi harian yang dilaksanakan pada hari Kamis sore diikuti oleh anggota redaksi termasuk pemimpin redaksi pada waktu itu, dengan agenda memberi sanksi berupa teguran kepada reporter yang meliput kasus karhutla pada hari tersebut. Pada hari Kamis 12 Januari, rapat proyeksi dan evaluasi dipimpin oleh pemimpin redaksi baru yaitu M Hafiz⁷. Dalam rapat evaluasi tersebut, Hafiz mengevaluasi kerja penanggung jawab liputan yang dianggap lalai memegang kendali liputan yang dilakukan oleh wartawan Eka Gusmadi Putra. Peliputan berita karhutla pada tanggal 12 Januari benar-benar berbeda dengan apa yang diberitakan oleh media kompetitor yaitu Tribun Pekanbaru. Menurut Muslim, pada saat itu menjabat sebagai asisten korlip yang mewakili koordinator liputan dalam rapat evaluasi menyampaikan bahwa :

“Kasus karhutla yang harusnya diliput adalah kasus di Tesso Nilo, tapi wartawan kita hanya menulis berita dari rilis yang dikasih lanud saja,

⁷ M Hafiz merupakan pemimpin redaksi Riau Pos yang menggantikan Asmawai Ibrahim per-Januari 2017. Pada 12 Januari merupakan rapat pertama yang membahas mengenai peliputan kasus karhutla.

Habislah kita di bantai, berita lengkap soal Tessonilo malah dimuat sama Tribun Pekanbaru, kita yang di redaksi ini malah tak tau apa-apa. Kita kalah sama Tribun, benar-benar tidak ada koordinasi antara reporter dengan fotografernya ini, fotografer benar-benar meliput di tempat kejadian, tapi reporternya benar-benar tidak di kasih tau kejadian di lapangan...(Muslim, wawancara langsung 13 Januari 2017)

Usai rapat evaluasi yang pada waktu itu membicarakan bagaimana pihak BPBD yang mulai membentuk satgas untuk penanganan kasus karhutla yang mulai muncul pada awal tahun tersebut. Dalam rapat proyeksi karhutla pemimpin, redaksi meminta korlip untuk menugaskan wartawan di setiap daerah mengecek adanya titik api dan meliput bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) soal karhutla. Rapat tersebut mengagendakan peliputan karhutla yang berbeda pada hari Kamis 12 Januari 2017 tersebut.

Sebagai kelanjutan dari pemberitaan kasus karhutla pada 12 Januari kemarin, Riau Pos kembali mengagendakan peliputan berita karhutla lanjutan. Pada rapat (*news planning*) proyeksi 12 Januari 2017 pemimpin redaksi menugaskan untuk peliputan titik api di daerah dan APBD karhutla. Namun, pemberitaan karhutla yang terbit pada Jumat 13 Januari 2017, bukan mengenai proyeksi pada hari sebelumnya. Berita karhutla yang belum berdampak besar seperti menimbulkan kabut asap akan kembali di proyeksikan pada halaman dalam yakni koran tiga atau dengan nama koran pro-otonomi. Sehingga, rapat evaluasi seperti yang diikuti peneliti pada ruang redaksi Riau Pos 13 Januari 2017 hanya sedikit mengulas tentang pemberitaan yang terbit pada hari tersebut, sebab pemberitaan yang dimunculkan adalah pemberitaan karhutla yang harusnya dimunculkan pada tanggal 12 Januari 2017 yaitu kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo.

Berikutnya, tim redaksi yang pada waktu itu melangsungkan dengan rapat proyeksi untuk pemberitaan karhutla 14 Januari. Penanggung jawab liputan, Muslim pada waktu itu selaku asisten penanggung jawab liputan daerah memberikan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Dumai. Sehingga, peliputan karhutla untuk 14 Januari 2017 di proyeksikan khusus untuk mengangkat kasus tersebut dan memunculkannya pada halaman

pertama pada koran satu. Proyeksi tersebut bertujuan untuk memprediksi perubahan di Pekanbaru yang juga akan memberi dampak pada keberlanjutan kasus karhutla. Dari penjelasan mengenai proses pemberitaan di atas, maka diketahui bahwa dalam proses *news planning* yang dilakukan di ruang redaksi, Riau Pos memiliki perhatian yang khusus dengan kasus kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut mengingat keberadaan Riau Pos sebagai koran lokal dan memiliki kedekatan dengan kasus lingkungan hidup yang sudah terjadi sejak tahun 1997 tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pandangan Conard C Fink (1998) yaitu dalam proses *news planning* unsur *Plan to Follow Readership* digunakan untuk melihat sejauh mana berita tersebut perlu dan dibutuhkan oleh pembaca.

4.2.1 Karhutla Minggu yang Terkonsep

Pemberitaan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tanggal 11 Januari hingga 14 Januari 2017 menjadikan agenda pemberitaan untuk koran hari Minggu mengulas permasalahan tersebut. Rapat redaksi untuk pemberitaan hari Minggu dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2015 pukul 15.00 WIB. Seperti yang dibahas pada bagian Bab 2 dimana untuk peliputan koran hari Minggu yang berbeda dengan tim harian, sehingga rapat yang dilakukan juga berbeda. Rapat proyeksi akan dilakukan setiap hari Jumat dengan tim harian dan rapat evaluasi akan dilakukan pada hari Senin dengan tim harian juga. Untuk pemberitaan yang berkaitan tentang karhutla dilakukan oleh Mario Kisaz penanggung jawab halaman *for-us*. Peliputan berita hari Minggu yang berisikan *for-us*, kuliner, dan liputan khusus merupakan peliputan yang harus menggunakan *term of reference* (TOR) atau panduan kerangka peliputan untuk tema yang akan diangkat.

“....Kita sudah punya TOR kita rapatkan, dan kita komunikasikan, isinya apasih yang mau kita buat nih, kemudian jadilah kerangka untuk kita jadikan tulisan ini, rapatnya senin dan jumat. Kita bahas mana yang menarik dan kita evaluasi juga. Kita diskusikan...”(Mario Kisaz, wawancara 15 Januari 2017)

Dalam rapat gabungan pada hari Jumat tersebut Mario menuliskan rencana peliputannya hanya dalam selembar kertas yang diusulkan sebagai proyeksi hari Minggu. Rencana peliputan karhutla tersebut adalah sebagai berikut:

TOR Liputaan Antisipasi Karhutla

1. Wawancara Kepala BMKG Pekanbaru

Pertanyaannya :

- * Informasi hot spot di Riau?
- * Ancaman musim kemarau panjang di awal tahun?
- * Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam antisipasi karhutla?

2. Wawancara Pengamat Lingkungan

- * Bagaimana tanggapan terkait kondisi karhutla di Riau?
- * Seperti apa langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk antisipasi karhutla?
- * Bagaimana solusi yang diperlukan dari kaca mata pengamat lingkungan?
- * Apa harapan dan tanggapan untuk antisipasi karhutla sejak dini?

3. Wawancara Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau

- * Apa langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi karhutla?
- * Bagaimana koordinasi dengan Tim BNPB dan lintas sektoral dalam mengantisipasi ancaman karhutla?
- * Langkah dari Pemerintah Provinsi Riau seperti apa untuk mengeliminir ancaman karhutla saat musim kering?

(Sumber: Mario Kisaz Riau Pos)

Rapat proyeksi pada hari tersebut dipimpin langsung oleh pemimpin redaksi dan menyetujui untuk menjadikan karhutla sebagai topik yang penting dibahas dalam koran Minggu. TOR yang ditawarkan juga ternyata tidak jauh berbeda dari pemberitaan karhutla yang disajikan pada koran harian di hari sebelumnya. *Point interest* yang dijadikan ialah bagaimana pemerintah melakukan antisipasi karhutla akan kabut asap. Informasi tentang titik api adalah pelengkap berita, yang selebihnya banyak memberitakan tentang hasil wawancara pada saintis dan lembaga terkait. Jika dikaitkan dengan teknik analisis *framing* berita. Maka, pemberitaan dengan menggunakan TOR adalah salah satu upaya untuk melakukan pbingkaiian tersebut di ruang redaksi. Melalui TOR, redaksi dan jurnalis yang bertuga sudah menentukan arah bagaimana untuk mengarahkan

masyarakat kepada informasi yang media inginkan. Unsur framing yang dilakukan diruang redaksi menurut Abrar (2005) yaitu *Defining Problem, Diagnosing Causes, Making moral judgement, Suggesting remedies*. Teknik tersebut nampak dari bagaimana TOR disajikan meliputi penentuan topik sebagai cara jurnalis untuk menggambarkan atau mendefinisikan permasalahan karhutla yang akan diliputnya. Kemudian, pemilihan narasumber juga sebagai cara untuk mencari kekuatan utama untuk mendefinisikan permasalahannya tersebut. Rincian pertanyaan yang dijabarkan dalam TOR juga menjabarkan bagaimana jurnalis Minggu dalam menyajikan saran dan menunjukkan penilaian moral dalam pembuatan berita karhutla.

Penulisan berita pada halaman *for-us* merupakan berita jenis *feature*, termasuk dalam penulisan berita karhutla. Yang memang dirangkum dari berbagai sisi dan lebih dalam menurut para wartawannya. Menurut Mario, berita karhutla yang ada pada halaman *for-us* memiliki porsi sebanyak tiga halaman.

.....Saya di sini mulai dari mengumpulkan bahannya, menulis, sampai mengedit, khususnya ya soal di *for-us* ini. Ada sekitar tiga halaman. kemudian lingkungan ini merupakan isu sentral global jadi kita kasih di mingguan, bahkan harian juga ada kadang. dulu kita punya logo sendiri untuk berita-berita lingkungan....(Mario Kisaz, wawancara 15 Januari 2017)

Dari hasil wawancara ternyata, jumlah berita lingkungan yang disajikan ketika karhutla terjadi sangatlah berbeda. Jumlah halaman yang digunakan untuk berita “waspada sebelum membara” hanya berjumlah satu halaman penuh beserta foto.

Dari proses *planning* hingga *publishing* berita di Riau Pos pada koran hari Minggu memang sangat berbeda. Berdasarkan data yang didapat peneliti, proses tersebut terlihat lebih mudah dari yang dilakukan oleh tim harian dengan deadline yang singkat dan waktu peliputan yang lebih singkat. Tim Minggu, mengerjakan dengan *deadline* yang cukup lama dan tidak perlu melewati tahapan seperti koordinator liputan, redaktur halaman, dan pengeditan dari redaktur koran. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, proses peliputan, penulisan, pengeditan, hingga mengatur jumlah halaman adalah kewenangan dari masing-masing

pemegang halaman atau rubrik di koran Minggu itu sendiri. Menurut Mario, dengan adanya halaman khusus lingkungan pada hari Minggu menjadikan pemberitaan lebih maksimal dibanding dengan harian. Kewenangan yang dimilikinya menjadikan berita yang ada pada *for-us* terbingkai sesuai dengan apa yang dia inginkan tanpa harus melalui penyuntingan seperti yang dilakukan oleh tim harian. Meskipun ada penyuntingan yang dilakukan oleh redaktur tim Minggu, hal tersebut tidak akan merubah isi ataupun judul yang sudah dibuat oleh penanggung jawab halaman *for-us*.

...Ya kita beda dengan harian, jadi kita lebih ke *feature*. kemarin kita ulas kanal bloking kita kasih solusinya, jadi *space* yang ada di maksimalkan. sebenarnya untuk karhutla tidak monoton di *For Us*. Ada hal baru ada sesuatu yang lebih maju dari koran lain, tidak hanya soal korban jiwanya saja...(Mario Kisaz, wawancara 15 Januari 2017)

Berita karhutla Minggu disajikan dengan bentuk *feature* berita komprehensif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai sumber berita yang digunakan. Mengapa demikian?, penggunaan *feature* dipilih Riau Pos untuk menunjukkan keberlanjutan suatu kejadian lingkungan hidup yang perlu diulas secara lebih dalam lagi, hal tersebut sesuai dengan jenis berita lingkungan hidup yang dimaksud Abrar (1993), jurnalis lingkungan hidup ialah yang mampu melakukan *interpretative reporting* yang salah satunya adalah melakukan analisis dan sintesis. Melalui analisis jurnalis lingkungan diharapkan mampu membayangkan bagaimana membuat jalan keluar dari permasalahan karhutla yang ada dan sintesis adalah bagaimana jurnalis tersebut akhirnya menilai masalah karhutka sesuai dengan nilai normatif yang berlaku dan benar untuk mengonfirmasikannya kepada narasumber yang kompeten (Abrar, 1993:111).

Sayang sekali, dalam proses editing dan penyajian berita edisi 15 Januari tersebut, foto yang dipilih adalah foto yang sama dengan pemberitaan karhutla edisi 12 Januari 2017. Tidak ada masalah dengan hal tersebut, hanya saja menunjukkan bagaimana kurangnya data dan materi yang matang untuk penyajian berita tersebut. Kemudian, bagaimana kurangnya koordinasi antara tim Minggu dan tim harian tentang penggunaan foto. Kemudian, yang membedakan hanya bagaimana pemilihan kata *caption* yang digunakan pada foto tersebut. Ketika hal

tersebut dikonfirmasi kepada Mario, menurutnya foto yang ia pilih ialah foto yang berbeda.

...Narasumber utamanya pengamat lingkungan. Karena dia lebih objektif dan memiliki *background* pendidikan dan pengalaman tentang lingkungan. Saya rasa fotonya berbeda, karena mau disesuaikan aja sama tema jadi pakai foto itu....(Mario Kisaz, wawancara 15 Januari 2017)

Sehingga hal tersebut yang benar-benar menunjukkan bahwa, yang penting adalah buat berita dulu, foto sebagai pendukung saja. Namun, jika melihat bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin redaksi Riau Pos, baginya hal tersebut tidak ada permasalahan, yang menjadi permasalahan adalah jika kasus karhutla tersebut tidak diulas kembali dalam *desk* lingkungan hidup. Sebab menurutnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup maka Riau Pos memberi *space* khusus hari Minggu untuk pemberitaan lingkungan hidup.

“...Kontrol dari awal proses hingga akhir, yang bersifat teknis juga kebijakan pemred wajib tahu, sehingga pengambilan keputusan itu betul-betul tahu, arah liputan kita kemana. Riau Pos inikan media pertama yang ada di sini, kami membicarakan diri kami adalah korannya orang Riau. lebih kepada kedaerahan, ketika misalnya lingkungan kami hancur, masak kami tak peduli, setidaknya karena kami bekerja di media, kita berikanlah halamannya, menunjukkan bahwa Riau Pos *concern* terhadap lingkungan. Kita merasa kita ini Koran orang Riau. Ketika lingkungan kami rusak, itulah tanggung jawab Riau Pos sebagai media...”(Asmawi Ibrahim, wawancara 28 Desember 2016)

4.2.2 Proyeksi : *Listing* Karhutla yang Tidak Selalu Ada di Harian

Proses peliputan (*news gathering*) karhutla yang dilakukan oleh wartawan Riau Pos yang bertugas Jakarta menurutnya dilakukan karena pilihannya sendiri. Jika dikaitkan maka, proses rapat redaksi (*news planning*) yang tidak mengagendakan adanya peliputan karhutla, maka tidak akan ada penugasan untuk meliput kasus tersebut. Sehingga, wajar bila peliputan karhutla untuk pemberitaan pada tanggal 12 Januari 2017 dilakukan atas inisiatif pribadi wartawan. Agenda editorial Riau Pos yang cukup jelas dalam setiap rapat redaksi ialah, akan

menaikkan setiap berita yang berkaitan dengan karhutla, baik skala kecil maupun besar dan baik dalam satu halaman depan penuh maupun halaman dalam. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemimpin redaksi Riau Pos:

“...Prioritas sekali itu, kita pernah blok satu halaman yang isinya tiga berita, mungkin dua berita yang lain. Selebihnya berita karhutla, sampai kita pasang koran *zombie* ya waktu itu, tentang homo asapiens. Kita malah juara indonesia premedia award di ntb waktu itu. Sangking parahnya kasus asap ini...” (Asmawi Ibrahim, wawancara 28 desember 2016)

Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh editor Riau Pos yaitu :

“...Kita *concern* setiap terjadi karhutla, rata-rata selalu kami taruh di halaman utama, bahkan jadi *Headline* baik dari foto maupun grafis. Apalagi karena hal ini terjadi terus. maka kami selalu menaruh di halaman depan. meskipun beritanya tidak cukup kuat ya kami taruh di halaman satu, biar pemerintah tahu, ya karena terjadi setiap tahun itu (Edwar Yaman, 27 Desember 2016)

Jika di diskusikan, maka seperti apa besar kecilnya berita yang berkaitan dengan kasus karhutla akan selalu menjadi prioritas dalam pemberitaan di Riau Pos. Sehingga, berita karhutla yang dibuat tanpa penugasan oleh penanggung jawab liputan akan tetap dimuat dalam pemberitaan. Dalam wawancara tersebut, M Fathra Nazrul Islam mengatakan:

“Tidak ada. Terkadang digabungkan dengan konfirmasi pejabat di daerah. Kalaupun ada perbaikan hanya aspek penulisan, pemilihan kata atau istilah saja. Untuk berita di restorasi saya pilih sendiri. Untuk isu lain terkadang ada penugasan yang sifatnya konfirmasi ke pejabat terkait di pusat” (Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Dari proses tersebut dapat dianalisis bagaimana proses pemberitaan tidak sepenuhnya dikendalikan dalam ruang redaksi. Nyatanya, penulisan berita karhutla yang dilakukan oleh wartawan tidak banyak dirubah dan tetap naik cetak meskipun tema tentang karhutla tersebut tidak dibicarakan dalam rapat proyeksi, atau tidak masuk dalam *list* berita. Sehingga, berita yang merupakan kutipan dari presiden tersebut tetap dinaikkan pada halaman satu namun, dengan porsi yang sangat sedikit dibandingkan dengan berita lain yang terbit pada halaman pertama tersebut. Disamping itu, proses pemberitaan yang dilakukan dari *news gathering* hingga *publishing* terkesan asal ada berita soal karhutla yang naik. Mengapa

demikian?, Hal ini nampak dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada wartawan yang meliput soal karhutla tersebut yang mengatakan memang kurang *concern* soal lingkungan hidup dan juga tidak perlu riset terlebih dahulu dalam peliputan. Sehingga, sangat terlihat bagaimana berita karhutla yang dibuat hanyalah kutipan-kutipan dari para tokoh penting tanpa disertai dengan pendapat atau pandangan khusus dari penulisnya. Tidak hanya itu proses editing juga menunjukkan kurangnya pengetahuan atau kepedulian akan kasus ini, terbukti dengan sedikit halaman yang disediakan untuk berita tersebut. Bahkan, pihak redaksi juga mengakui bahwa jika intensitas karhutla kurang atau belum berdampak besar maka sangat wajar jika berita karhutla hanya disajikan dengan ruang yang sangat sedikit, atau bila perlu diletakkan pada halaman dalam koran saja.

4.2.3 Evaluasi : Berita Karhutla yang Kecolongan

Pemberitaan karhutla yang terbit pada 13 Januari 2017 tersebut membahas bagaimana upaya pemadaman api yang dilakukan oleh pihak Lanud Rsn Pekanbaru yang memantau titik api di wilayah terjadinya kebakaran, dan memantau Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Pemberitaan tersebut berkaitan dengan berita yang naik cetak pada 12 Januari 2017 di Riau Pos. Seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya pada proses rapat proyeksi dan evaluasi tanggal 12 Januari 2017 yang mana M. Hafiz selaku pemimpin redaksi menginstruksikan untuk meliput titik api dan mengevaluasi berita terbit pada hari sebelumnya yang sama sekali tidak memuat masalah Tesso Nilo. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh reporter dan lembaga peliputan (koordinator liputan) dalam mengumpulkan suatu fakta di lapangan. Menurutnya, peliputan yang dilakukan oleh surat kabar kompetitor lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembaca. Berita karhutla yang terbit 12 Januari 2017 pada koran kompetitor yaitu :



Gambar 4.1 Berita Karhutla TNTN Oleh Tribun Pekanbaru 12 Januari 2017
Sumber: <http://pekanbaru.tribunnews.com/>

Pemberitaan tersebut menunjukkan bagaimana koran kompetitor memang mendapatkan data peliputan yang lebih kompleks mengenai titik api dan lokasi kejadian, berbeda dengan pemberitaan yang dimuat oleh Riau Pos. Sehingga, kesalahan peliputan yang dilakukan pada 12 Januari 2017 tersebut, berusaha dibenahi dengan berita yang terbit pada 13 Januari 2017 dengan ini pemberitaan yang berkaitan dengan lokasi terjadinya kebakaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan paragraf yang memuat:

“Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) juga harus tetap menjadi perhatian, karena apabila terbakar lagi, akan ada aksi nyata seperti pada tahun lalu,” paparnya mengingatkan”(Potongan berita karhutla “Pesawat Tempur Pantau *Hotspot*”)

Dari pemberitaan di atas, menunjukkan bahwa pihak redaksi Riau Pos, menginginkan pemberitaan yang berkaitan dengan lokasi kebakaran yang sebenarnya. Padahal, pemberitaan sebelumnya tidak ada yang membahas lokasi Tesso Nilo yang terbakar. Namun, pada pemberitaan setelahnya, jurnalis mencoba menjelaskan kejadian yang berkaitan dengan lokasi Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini bisa saja terjadi dalam proses pemberitaan. Berita karhutla yang diterbitkan oleh surat kabar kompetitor mungkin saja akan menjadi acuan bagi penyajian berita karhutla di Riau Pos. Mengapa hal ini bisa terjadi?, tidak bisa

dipungkiri data lapangan atau hasil observasi memang akan berbeda dengan data yang didapatkan oleh wartawan Riau Pos yang memang tidak terjun langsung ke lokasi terjadinya kebakaran.

4.3 News Gathering oleh Wartawan Riau Pos

Jika di diskusikan, maka seperti apa besar kecilnya berita yang berkaitan dengan kasus karhutla akan selalu menjadi prioritas dalam pemberitaan di Riau Pos. Sehingga, berita karhutla yang dibuat tanpa penugasan oleh penanggung jawab liputan akan tetap dimuat dalam pemberitaan. Dalam wawancara tersebut, M Fathra Nazrul Islam mengatakan:

“Tidak ada. Terkadang digabungkan dengan konfirmasi pejabat di daerah. Kalaupun ada perbaikan hanya aspek penulisan, pemilihan kata atau istilah saja. Untuk berita di restorasi saya pilih sendiri. Untuk isu lain terkadang ada penugasan yang sifatnya konfirmasi ke pejabat terkait di pusat” (Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Berita karhutla yang dibuat tanggal 11 Januari tersebut bersumber dari wawancara langsung pada kepala Badan Restorasi Gambut.

“...Untuk berita di atas, itu berlangsung di Istana Negara. Presiden bicara saat memimpin rapat terbatas restorasi gambut. Hadir juga *stake holder* terkait salah satunya kepala Badan Restorasi Gambut...” (Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Sumber wawancara dan sumber resmi merupakan sumber utama yang digunakan oleh para jurnalis dalam mengumpulkan fakta, setelahnya Fatra akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang berkaitan. Setelah melakukan peliputan atau pengumpulan fakta, berikutnya ialah menuliskan menjadi sebuah berita. Dalam menuliskan berita lingkungan hidup menurutnya tidak ada hal yang perlu dibedakan antara berit lingkungan hidup dan berita lainnya.

“Setahu saya tidak ada etika khusus kecuali memperdalam pengetahuan tentang lingkungan. Soal etika cukup berpegang pada kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik. Lagipula saya tidak begitu mendalami

masalah lingkungan” (Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Proses *news gathering* berita karhutla berikutnya dilakukan oleh reporter Eka Gusmadi Putra. Dalam mengumpulkan data, menurut Eka sumber utamanya ialah hasil wawancara yang ia lakukan pada pangdam Mayjen Lodewyck Pusung. Pernyataan tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Muslim asisten koordinator liputan yang mengatakan sumber utama berita 12 Januari tersebut hanya bersumber dari rilis saja.

.....Waktu itu, *fly over* sama heli, saya tidak ikut jadi ya wawancara sama pangdam sama tim satgas aja... (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Dari wawancara tersebut, sumber berita utama yang didapat dalam pengumpulan fakta ialah dari hasil wawancara, bukan bersumber dari *press release*. Peliputan berita yang dilakukan oleh reporter atau wartawan pada umumnya berdasarkan pada penugasan yang diberikan oleh penanggung jawab liputan atau koordinator liputan. Namun, hal tersebut berbeda ketika Eka meliput kasus kebakaran hutan dan lahan. Karena berada di posko yang berkaitan dengan penanganan karhutla, hal tersebut memudahkan Eka untuk mengetahui kasus terlebih dahulu tanpa harus menunggu penugasan dari penanggung jawab liputan.

“Jadi, karena gabung di tim satgas siaga karhutla jadi, ketika ada info tentang titik api langsung dikasih tahu sama satgasnya. Jadi kebetulan waktu itu ada titik api, karena daerah gak mampu, terus pangdam ikut rapat jadinya dia bilang pokoknya kalau Riau kebakar lagi dia mau kirim pasukan. Kalau penugasan ya biasanya, tapi karena ini karhutla jadi ya yang ini inisiatif aja” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Proses *news writing* sebagai lanjutan ketika proses *news gathering* sudah di lakukan. Dalam pemberitaan yang karhutla tanggal 12 Januari 2017 tersebut, menurut Eka berita lingkungan seharusnya ditulis dengan mendalam dan melalui proses observasi. Hal tersebut yang menurutnya akan membedakan antara berita lingkungan berita yang lainnya. Pernyataan tersebut berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh Eka dalam peliputan yang tidak dilakukan dengan cara

observasi langsung atau pada saat itu melakukan *fly over* dengan helikopter untuk memantau titik api di lokasi kejadian.

“...Bedanya apanya ya lebih ke peristiwa aja, kalau penulisannya ya memang harus mendalam atau ada observasi lapangannya. Biasanya ya lebih di kegiatannya aja ya, ya isunya juga karhutla uda berbelas tahun kebakaran. Ya bedanya, lebih ke kedaerahan kita lebih pengen pemberitaannya tuh mau menggambarkan kerja timnya dan pemerintahannya juga mau kerja juga menanggulangi karhutla gitu..” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Dari pernyataan tersebut Eka menggambarkan sedikit banyak bagaimana sebaiknya pembuatan berita karhutla. Menurutnya, berita karhutla yang baik menawarkan solusi dengan menekan perusahaan pembakar dan kerja pemerintah. Sehingga, dalam berita yang dituliskannya “Pangdam Siap Kirim Pasukan” nilai berita yang ditunjukkan seputar penanganan agar karhutla tidak terulang kembali.

“..Kalau menyudutkan suatu perusahaan atau pemerintah ya lebih ke solusi bahwa lokasi tersebut kebakar dan lokasi tersebut jadi kita jelaskan sanksinya disitu supaya daerah lain tidak melakukan hal sebelumnya. Ya diambil dari kasusnya aja, mentoknya ya lebih ke ancaman aja. Tim pangdam turun dan TNI juga ya berarti gagal gitu itu rentetan berita sebelumnya. Lebih biar ga kejadian lagi ga terulang lagi gitu, concernku bikin karhutla itu ya soal itu aja, biar apinya mati pokoknya tu. *Pressure* di poskonya aja biasanya...”(Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Proses *news gathering* mulai dari menerima data dan wawancara dengan pihak Pangdam, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan pemberitaan, maka proses selanjutnya ialah berita tersebut dikirimkan kepada lembaga liputan, atau yang bertanggung jawab adalah koordinator liputan. Tahapan tersebut dimulai dengan pengiriman naskah berita yang dilakukan oleh reporter harian, yang dikirimkan kepada penanggung jawab liputan melalui email Riaupos2017@gmail.com. Berita karhutla yang dibuat berdasarkan perintah dari penanggung jawab liputan berdasarkan dari hasil rapat proyeksi dan evaluasi pada 11 Januari 2017 pukul 15.00 WIB.

Untuk pemberitaan selanjutnya yang berjudul “Gunakan Pesawat Tempur Pantau *Hotspot*” dilakukan oleh Agustiar. Dalam penugasan peliputan (*news*

gathering) yang dilakukan oleh Agustiar sebagai wartawan yang bertugas di posko tersebut, berita utama yang didapat ialah konferensi pers (*press conference*) bersumber dari Pangkalan Udara atau lanud.

....Untuk pemberitaan ini, sumber utamanya dari Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru, yaitu disampaikan langsung oleh Komandan Lanud nya Marsma TNI Henri Alfiandi kepada wartawan terkait giat yang dilakukan (Agustiar, wawancara 15 Januari 2017).

Peliputan berita karhutla memang sebagian besar penugasan dari korlip atau penanggung jawab liputan. Menurut Agustiar, penugasannya selalu untuk mencari tau titik api yang ada akibat karhutla ini. Terkait dengan penugasan peliputan karhutla oleh penanggung jawab liputan, Agustiar menyampaikan bahwa:

“Biasanya, lebih kepada pantauan *hotspot* (titik panas) yang tersebar di wilayah Riau, bahkan *monitoring hotspot* dari provinsi tetangga, Jambi, Sumbar, Sumut, Sumsel dan lainnya, karena dari *hotspot* ini diketahui potensi kebakaran hutan di daerah mana saja. Lalu masalah *temperature* suhu, yang juga menjadi pemicu kebakaran hutan jika kondisinya ekstrim, yang dibantu juga oleh dukungan angin. Hmm... karhutla di Riau sudah tidak bisa ditolerir lagi, harus diatas dengan penegakan hukum yang kuat. Selama ini dari kejadian kebakaran yang terjadi penegakan hukumnya lemah. Maka itu, pelaku karhutla harus ditangkap dan dihukum sesuai dengan aturan. Jangan ada lagi karhutla. Ya itu tadi, paling sering itu masalah *hotspot*, dan *temperature* suhu ini banyak diperintahkan ke saya untuk mendapatkan informasinya” (Agustiar, wawancara 15 Januari 2017).

Informasi berupa data jumlah *hotspot* menjadi data yang paling penting dalam meliput kasus karhutla. Menurutnya, peliputan karhutla atau lingkungan hidup yang dilakukannya selama ini tidak butuh riset dengan dalam mengenai kasus seperti apa yang akan diliputnya. Data sudah ada dan selalu siap di posko-posko tempat mereka bertugas. Dengan begitu, sangat memungkinkan untuk tidak melakukan peliputan karhutla secara langsung di lapangan.

“.....Tidak ada riset. Kecuali, untuk membuat tulisan panjang untuk dilombakan. Dilapangan liputannya mengalir saja. Karena masalahnya dan dampaknya sudah jelas dari kebakaran hutan dan lahan itu, yang sengaja di bakar oleh orang yang tidak bertanggungjawab, observasi juga mengalir saja. Untuk mendapatkan data, semua cara dilakukan, turun kelapangan, wawancara langsung, *by phone* pun dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. (Agustiar, wawancara 15 Januari 2017)

Dari sini diketahui bahwa bagaimana jurnalis Riau Pos dalam melakukan peliputan berita lingkungan hidup. Berita lingkungan hidup dalam peliputannya haruslah dilakukan dengan observasi langsung dilapangan dan dengan riset terlebih dahulu. Sebab, bagaimana akan menghasilkan berita lingkungan hidup yang dalam dan menggerakkan hati pembaca jika berita yang dihasilkan hanya bersumber dari tulisan wartawan lain, atau bahkan hanya dari rilis yang diterima melalui email saja?. Hal ini seperti yang dituliskan oleh Bloom dalam Abrar (1993 : 110-111) memaparkan bagaimana seorang jurnalis lingkungan harus kritis dalam menyajikan realitas lingkungan hidup yang harus menyerap informasi, mulai dari istilah, konsep sampai klasifikasi realitas lingkungan hidup.

4.3.1 Rilis dan Konferensi Pers Sebagai Sumber Utama

Temuan lainnya ialah, bagaimana proses peliputan atau *news gathering* yang dilakukan oleh wartawan Riau Pos mengenai karhutla hampir tidak menemukan kendala yang berarti. Hal tersebut berbeda, ketika seharusnya wartawan lingkungan hidup melakukan peliputan karhutla dengan observasi langsung di lapangan. Menurut Agustiar, konferensi pers dan rilis adalah data utama yang digunakan selama ini dalam menuliskan berita karhutla.

“.....Data *press realese* dan juga *press conference* adalah data utama, pengembangannya dari data yang didapat dari lokasi dan juga dari *statement* pihak terkait. Dalam hal ini bisa dari pemerintahan, maupun TNI yang turun langsung ke lapangan (Agustiar, wawancara 15 Januari 2017)

Dari pemaparan tersebut, dapat diinterpretasikan sejauh mana berita karhutla yang dibuat. Berita karhutla tidak jauh berbeda perlakuannya dengan kasus di luar lingkungan hidup, yang mana penyajiannya bisa dengan mudah didapatkan hanya dengan rilis yang sudah tersedia dan konferensi pers. Hal tersebut tentu jauh berbeda dengan yang disampaikan Sudibyو dalam Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan, yang mana seorang jurnalis lingkungan bukanlah jurnalis yang hanya mendengar apa yang dikatakan oleh pemerintah, manajemen perusahaan, LSM, pakar lingkungan atau tokoh masyarakat, seorang wartawan lingkungan ialah

wartawan lapang yang benar-benar terjun sendiri melihat, menyaksikan, dan menginvestigasi kondisi lingkungan secara langsung (Sudibyo, 2014:72). Dari pemaparan Sudibyo, pandangan mengenai bagaimana seharusnya seorang jurnalis lingkungan bekerja adalah yang terpenting untuk melakukan observasi langsung. Hal tersebut menurutnya merupakan pembeda utama antara peliputan yang dilakukan antara jurnalis olahraga, ekonomi, politik dengan seorang jurnalis lingkungan.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Mustafa K. Anuar (2012) dalam penelitiannya dengan tema “*Reporting the Environment Human Rights, Development and Journalism in Malaysia*”. Dimana dalam praktiknya jurnalis lingkungan di Malaysia masih menggunakan sumber resmi yang sudah ada saja. Sumber resmi pada kenyataannya, memudahkan kerja para jurnalis Riau Pos yang kesehariannya tentu tidak hanya meliput persoalan lingkungan hidup saja, terutama persoalan karhutla. Sehingga, hal tersebut menjadikan sumber resmi seperti *press conference* lebih diutamakan dalam peliputan dibanding dengan melakukan observasi langsung dan mendapatkan sumber data yang didapat dari masyarakat sekitar.

Praktik jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan oleh Agustiar menurutnya sangat berbeda dengan ketika melakukan peliputan berita lainnya. Agustiar menyampaikan:

“.....Jelas ada perbedaan, mesti tujuannya sama untuk disampaikan kepada masyarakat banyak. Menurut saya, jurnalisme lingkungan lebih fokusnya hanya mencari, mengumpulkan dan menyampaikan masalah gangguan lingkungan, dan cinta lingkungan. Sementara untuk jurnalisme lainnya, bisa kemana saja, dan tidak mesti membahas soal lingkungan saja, akan tetapi semua hal.....” (Agustiar, wawancara 15 Januari 2017)

Dari penjelasannya, Agustiar cukup memahami bagaimana praktik jurnalisme seharusnya dilakukan. Namun, pemahaman akan berbeda ketika diterapkan menjadi sebuah praktik peliputan. Sumber data dalam penulisan pemberitaan belum menjadi pemahaman utama yang harus dipertimbangkan. Abrar dalam Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup menjelaskan bagaimana faktor yang menjadi kendala dalam praktik jurnalisme lingkungan hidup tersebut.

Menurutnya, narasumber yang sesuai masih sangat sulit ditemukan, sehingga kebanyakan jurnalis menggunakan narasumber yang berbentuk *press release* yang sudah disediakan oleh LSM atau korporasi (Abrar, 1993: 30-37). Pengumpulan fakta di lapangan atau yang disebut dengan *news gathering* menjadi langkah selanjutnya, yang ternyata dalam proses ini hal sama seperti yang dipaparkan oleh Kaheru (2005), sumber utama berita lingkungan hidup yang paling banyak digunakan oleh para wartawan yakni kelompok elit atau pejabat negara. Pengumpulan fakta yang dilakukan Agustiar, merupakan pemamaparan pejabat negara yaitu Komandan Lanud yang menggelar konferensi pers terkait dengan kebakaran hutan pada tanggal 12 Januari.

4.4 News Writing : Penulisan Karhutla Sebelum Naik Cetak

Pada tahapan penulisan berita tersebut, peneliti menganalisis tiga berita pada koran harian yang diikuti proses penulisannya sebelum akhirnya berita tersebut diterbitkan oleh redaksi. Ketiga berita tersebut berjudul :

1. Restorasi Gambut Tahun 2017 Seluas 400 Ribu Hektar
2. Pangdam Instruksikan Mulai Pencegahan
3. Gunakan Pesawat Tempur Pantau *Hotspot*

Proses penulisan berita karhutla dilakukan setelah para wartawan mendapatkan data dan kemudian diolah, dalam bentuk *stright news* maupun *feature*. Setelahnya akan dikirim kepada penanggung jawab liputan atau koordinator liputan sesuai *deadlinenya*. Dari keempat berita yang dilakukan pada tanggal 11 Januari hingga 14 Januari tersebut, tiga diantaranya merupakan berita harian yang dituliskan oleh wartawan yang mendapat *beat* peliputan karhutla. Ketiga berita tersebut ialah :

1. Berita untuk terbit tanggal 12 Januari 2017 oleh Fathra Nazrul Islam

BERITA TERBIT TANGGAL 12/1/2017

Restorasi Gambut 2017 Seluas 400 Ribu Hektar

JAKARTA (RP)- Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut yang ada di Indonesia, terutama pada tujuh provinsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya. Bahkan Presiden Joko Widodo secara langsung menegaskan komitmen tersebut kepada jajarannya saat memimpin rapat

terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (11/1).

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi lahan gambut di 7 provinsi, yaitu di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan di Provinsi Papua," ujar Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut sejalan dengan misi awal Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Sebelumnya BRG tersebut telah dibentuk pada tanggal 6 Januari 2016. "Kita telah menargetkan restorasi lahan gambut sampai 2020 seluas dua juta hektare di 7 provinsi tersebut dan pada tahun 2017 ini target kita adalah 400 ribu hektar," imbuhnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga untuk bersama-sama mendukung dan menyelaraskan agenda kerja pelaksanaan restorasi gambut. Apalagi pada tahun 2017 pemerintah telah menargetkan restorasi gambut pada kawasan budi daya, hutan lindung, dan konservasi tanah air.

Sebab, dari peta indikatif menunjukkan bahwa restorasi gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya, mulai dari hutan produksi sampai areal pengguna lain, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin. "Sisanya restorasi juga dilakukan di kawasan hutan lindung dan konservasi, yaitu seluas 685 ribu hektare," ucap Presiden. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal terkait restorasi gambut di kawasan budi daya. Pertama, masyarakat agar dilibatkan dalam restorasi gambut yang sedang dijalankan pemerintah. Presiden juga meminta agar semua unsur, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga swasta turut mengambil peran dalam restorasi gambut tersebut. Termasuk pemegang konsesi. Selain itu, pemberian hukuman yang tegas bagi para pelaku pembakar hutan dan alih fungsi kawasan.

"Penegakan hukum lingkungan yang tegas termasuk evaluasi pada izin-izin konsesi yang telah dikeluarkan bagi pembakar maupun pelaku alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung lahan gambut," terang mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Terakhir, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menutup izin baru dan pembukaan lahan sebagai bentuk perlindungan bagi kurang lebih 6,1 juta hektare areal gambut yang masih utuh. Apalagi pemerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perlindungan gambut atau PP Nomor 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"Saya minta semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut harus betul-betul menjaga fungsi hidrologis gambut dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar," tutupnya.

Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foad.

Nazir saat konferensi pers menambahkan bahwa selama 2016 lalu, pihaknya telah berkeliling ke 105 desa yang berada di areal gambut untuk membuat perencanaan maupun sosialisasi. Total gambut di seluruh desa pada 7 provinsi itu menurutnya mencapai 800 ribu hektar. BRG bahkan telah melakukan uji coba pembangunan sekat kanal serta membangun sumur bor sesuai permintaan masyarakat. Selain bermanfaat saat musim hujan, sumur bor juga membantu warga dsaat kemarau. "Musim kemarau bisa digunakan di lahan pertanian sehingga bisa tetap produktif. dan telah kita bangun 500 lebih sumur bor. Program ini akan diintegrasikan pada tahun ini," tambah Nazir.(fat)

(Sumber : Data Penanggung Jawab Liputan Riau Pos 2017)

Penulisan berita karhutla menurut Fathra juga tidak selamanya harus memenuhi unsur 5W+1H. Menurutnya, kelengkapan tersebut berpulang dari bagaimana narasumber dalam menyampaikan informasi tersebut. Menurutnya, pemberitaan yang hanya seputar rencana program tersebut tidak menampilkan unsur lengkap dari 5W+1H. Dari data yang didapaknya tersebut, Fathra lebih menunjukkan penanganan pemerintah dan aparat hukum agar tegas terhadap kasus karhutla tersebut.

"...Situasional. Terkadang narsum belum bisa menjelaskan sesuai keinginan. Apalagi kalau informasinya bersifat rencana program yang belum dijabarkan secara detil oleh narsum. Berita dimaksud bentuk rencana aksi pemerintah tentang pemulihan gambut. Belakangan juga telah diterbitkan regulasi yang menguatkan perlindungan terhadap area gambut, terutama yang berada dalam kawasan konsesi perusahaan. Intinya bagaimana mendorong pemerintah, aparat hukum untuk tegas pada pelaku

karhutla terutama korporasi. Dan tidak jarang oknum masyarakat yang bakar hutan/lahan juga suruhan perusahaan....” (Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Jika dianalisis bagaimana proses penulisan berita tersebut melalui teknik *framing* wartawan maka berita tersebut yaitu, ***defining problem*** : *framing* wartawan menunjukkan bagaimana akan diadakannya restorasi gambut pada tahun 2017 mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan. Dengan menggambarkan jumlah luas lahan gambut dan juga tahun yang pasti. “*Restorasi Gambut 2017 Seluas 400 Ribu Hektar*”. ***Suggesting remedies*** : “*Musim kemarau bisa digunakan di lahan pertanian sehingga bisa tetap produktif. dan telah kita bangun 500 lebih sumur bor. Program ini akan diintensifkan pada tahun ini,*” *tambah Nazir*” Pada berita awal wartawan mencoba untuk menunjukkan *framing* solusi yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mulai membangun 500 lebih sumur bor pada paragraf terakhir berita.

2. Berita untuk terbit tanggal 12 Januari oleh Eka Gusmadi Putra

Berita Terbit 12 Januari 2017

Pangdam Instruksikan Mulai Pencegahan

*Karhutla Mulai Mengancam Riau

PEKANBARU (RP) - Mengawali Januari 2017, tim darat di tingkat daerah mulai berjibaku memadamkan api yang mulai bermunculan. Seperti di wilayah Siak dan Pelalawan yang mulai dibakar. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mulai mengancam Riau ini menarik perhatian Pangdam I/BB Mayjen Lodewyck Pusung dan langsung menginstruksikan dilakukan pencegahan. "Yang penting cegah, cegah, cegah. Langsung lakukan pencegahan," tegas Pangdam dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Rabu (11/1).

Dikatakan Jendral Bintang Dua tersebut, pencegahan memang harus dilakukan. Mulai dengan membuat embung, hingga sosialisasi di tingkat tiga pilar. Mulai Babinkamtibnas, Babinsa, dan Kepala Desa hingga kini diakuinya masih terus sosialisasi. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pencegahan. Kata Lodewyck Pusung juga akan ditindaklanjuti dengan melihat perkembangan status atas evaluasi sepanjang tahun. "Pasukan sudah setel, kalau kurang dikirim kesini, dari Medan, Padang bisa memperkuat disini (Riau, red)," sambungnya.

Selain itu dikatakan Pangdam, dengan akan digelarnya Rapat Koordinasi pada Jumat (13/1) besok. Ia mengimbau kepada seluruh pihak supaya menyiapkan tekad yang bulat dan mari jadikan tujuan bersama agar tidak terjadi kebakaran lagi tahun ini.

"Tanamkan Mindset kita, bahwa Riau 2016 bisa tanpa Karhutla dan asap, jadi tahun ini juga harus bisa. Apapun akan saya lakukan, agar Riau bebas asap, kita harus solid," tegasnya. Sementara itu terkait rencana Rakor persiapan menghadapi Karhutla besok, ditambahkan Kepala BPBD Riau Edwar Sanger memang akan dilaksanakan. Diikuti seluruh stakeholder yang akan diundang dan selama ini aktif di posko Satgas Siaga Darurat Karhutla. "Kita lihat kondisinya dan akan dievaluasi terlebih dahulu secara menyeluruh. Untuk dibahas langkah selanjutnya," kata Edwar.

Pria yang kini menjabat Plt Wako Pekanbaru tersebut mengakui memang berdasarkan pantauan tim di daerah. Ada wilayah yang mulai dibakar oknum tak bertanggung jawab. Tapi kondisi di lapangan ditegaskannya tidak besar dan belum mengkhawatirkan.

"Tim darat diturunkan langsung dan bisa diantisipasi. Ada kekhawatiran soal kondisi di Dharmasraya (Sumbar, red) namun kita sudah koordinasi langsung kesana karena kebakarannya semakin meluas," sambungnya.

Disinggung mengenai penetapan status Siaga Darurat Karhutla Riau dalam rapat besok. Dikatakan Edwar Sanger dalam pertemuan tersebut belum melihat sampai pada penetapan status. "Kita lihat dulu, ada indikator juga, akan dilihat perkiraan cuaca dan indikator-indikator lainnya," tutupnya.(egp)

(Sumber : Data Penanggung Jawab Liputan Riau Pos 2017)

3. Berita untuk terbit tanggal 13 Januari oleh Agustiar

Berita Terbit 13 Januari 2017

Gunakan Pesawat Tempur Pantau Hotspot

PEKANBARU(RP)---Meski saat ini masih aman dari bencana asap. Namun sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin (Rsn) Pekanbaru melakukan kewaspadaan dini, dengan mengerahkan pesawat tempur, serta helicopter patrol udara.

Seperti disebutkan Komandan Lanud Rsn Marsma TNI Henri Alfiandi melalui rilis yang diterima Riau Pos, Kamis (12/1), bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Patrol ini disebutkan sebagai langkah antisipasi karhutla, apalagi lahan di Riau ini gambut dan mudah terbakar, maka ini dilakukan sejak dini.

“Patroli udara ini akan dilakukan setiap hari, dibarengi dengan kegiatan rutin personil setiap terbang. Mengawasi kemungkinan ada titik panas, yang harus segera dipadamkan,” kata Danlanud.

Kegiatan patrol udara ini sudah dilakukan Rabu (11/1) kemarin. Pesawat tempur yang dikerahkan untuk ikut memantau adanya hotspot itu adalah dari Skadron Udara 12 dan 16, serta Heli NAS-332 Super Puma. “Saat ini Heli NAS-332 itu stand by SAR di Lanud kita, untuk melakukan pemantauan,” jelas Jendral bintang satu ini.

Danlanud menambahkan setiap harinya, `1pesawat tempur Lanud Rsn akan berpatroli di seluruh wilayah udara Riau dan heli akan melakukan pemantauan di wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.

“Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) juga harus tetap menjadi perhatian, karena apabila terbakar lagi, akan ada aksi nyata seperti pada tahun lalu,” paparnya mengingatkan.

Danlanud berharap walaupun Satgas penanggulangan Karhutla belum terbentuk, semua elemen di himbau untuk dapat melakukan aksi pencegahan dan penanggulangan karhutla semaksimal mungkin, termasuk Lanud Roesmin Nurjadin yang dipimpinya.

“Pemantauan melalui patroli udara ini adalah aksi awal dari Lanud Rsn yang juga merupakan Satuan Tugas (Satgas) Udara untuk mencegah terjadinya Karhutla di provinsi Riau,” pungkas Danlanud.

Dia juga berharap, mulai saat ini dan kedepannya, tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Karena jika terjadi akan banyak yang dirugikan. “Mudah-mudahan semua siaga,” tutupnya.(gus)

(Sumber : Data Penanggung Jawab Liputan Riau Pos 2017)

Proses penulisan berita yang dilakukan wartawan Riau Pos dalam penulisan permasalahan lingkungan tidak memuat analisis permasalahan lingkungan dan menunjukkan solusi yang pasti dari kasus yang diberitakan. Hal tersebut berbeda dengan yang dituliskan Abrar (1993) wartawan lingkungan hidup yang seharusnya mampu memberikan analisis dan sintesis dari berita yang ditulisnya. Lanjut, dalam penjelasan proses jurnalisme lingkungan di atas, riset tentang kasus karhutla tidak dilakukan. Tidak ada riset untuk berita *straight news*, riset akan dilakukan ketika berita yang dibuat akan dilombakan. Faktor tersebut tidak menunjukkan kesamaan dengan proses peliputan yang dikatakan oleh Sudibyo (2014:72), bahwa jurnalis lingkungan hidup adalah dia yang selalu memiliki data dan menyocokkan dengan apa yang dia temukan di lapangan, dengan kata lain

seorang jurnalis lingkungan hidup adalah dia yang terlebih dahulu melakukan riset tentang kasus lingkungan hidup yang akan ditulis agar lebih menjiwai dan menulisnya dengan pemberitaan yang mendalam.

4.4.1 Karhutla Minggu yang Lebih Dalam

Wartawan lingkungan hidup termasuk pada kelompok wartawan khusus (Abrar, 1993:106). Hal tersebut dimiliki oleh Riau Pos dalam peliputan berita-berita lingkungan yang diterbitkan khusus pada hari Minggu. Wartawan yang tergabung pada tim Minggu merupakan wartawan khusus yang benar-benar mengusulkan peliputan lingkungan, mulai dari pembuatan TOR hingga dana peliputan dan terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut diceritakan oleh Kunni sebagai berikut:

“.....Ya tadi itu, harus nyamar, tebal-tebal muka, berhari-hari, resiko tapi sudah dibuat si dari redaksi. Pengambilan sudut pandang Biasanya dua, dari lokasi kebakaran sama dampaknya itu yang penting. Susah kalau bertemu perusahaan yang terkait, kalau aku lebih ke lokasi biasanya. Saya biasanya cuma liat di lapangan gimana, kebakarannya gimana, alat yang untuk madampak gimana, kalau wawancara biasanya tugas temen lain lagi. kalau wawancara biasa ke tentara yang di lokasi, tapi ada tim lain juga yang *handle*. terus saya deskripsikan kejadiannya. pernah mentok ga dapat narasumber ngeliput PT LIH, kalau ga dapet kita konfirmasi ke bagian liputan. jadi waktu itu PT LIH sudah dibekukan izinnya oleh pemerintah, jadi ga ada aktifitas lagi, tapi ternyata dia sedang membangun timbangan baru, entah bagaimana itu, ya itu temuan kami. dan sekarang PT LIH juga bebas”(Kunni Masrohanti, 4 Januari 2017)

Tindakan penyamaran memang lazim dilakukan ketika peliputan investigatif termasuk untuk permasalahan lingkungan hidup (Sudiby, 2014:44). Dan hal tersebut lazimnya dilakukan oleh wartawan khusus atau wartawan lingkungan hidup, jika di Riau Pos yaitu wartawan yang bertugas pada tim Minggu. Wartawan lingkungan hidup juga merupakan wartawan yang lapang, yang harus terjun langsung ke lapangan dan mencocokkan data dengan kondisi di lapangan, mewawancarai semua pihak terkait serta mewawancarai pakar yang tidak berpihak dan memahami benar permasalahan lingkungan hidup terkait (Sudiby,

2014:71-72). Dengan begitu data yang didapat tidak hanya secara singkat digambarkan tetapi juga dituangkan dengan detil dan menyajikan penulisan yang dalam.

....Di lipsus itu kan tulis panjang, soal karhutla atau kasus lain, *indepth interview* dan investigasi biasanya, sampai ke titik api dan titik asap, lebih rumit, detil, beresiko, lama, menyerap waktu dan tenaga, kalau yang lain ya berita biasa, lebih ke *straight news* aja, jadi gak rumit gini....(Kunni Masrohanti, wawancara 4 Januari 2017)

Predikat wartawan khusus dan peliputan yang dilakukan dengan penuh resiko di lapangan tetap akan sulit untuk transparan ketika yang diberitakan adalah terkait dengan kepentingan bisnis perusahaan.

“...Kita tidak menyebut perusahaan itu, kalau dia beriklan ya kita tidak sebutkan, kalau kita tidak kerjasama ya kita sebutkan juga perusahaan ini. ya aku kalo nulis lepaskan diri dari semuanya, biar netral. untuk lipsus banyak yang tidak berani pegang. karena aku juga jaga kepentingan perusahaan, jadi ya bertanggung jawab soal kedekatan pemred dengan ini, kerjasama dengan ini, itu harus hati-hati biar perusahaan tidak nuntut, jadi sebutkan perusahaan yang ini saja, jangan yang ini, jadi kita fokusin ke kasusnya, bukan interennya ini nantinya. kita bungkus dengan turun ke lapangan secara langsung, jadi menampik kedekatan dengan perusahaan lain begitu....”(Kunni Masrohanti, wawancara 4 Januari 2017)

Dengan tidak menuliskan nama perusahaan terkait pada pemberitaan mengenai pembakar hutan dan lahan, bukankah hal tersebut adalah membohongi publik akan realitas yang terjadi sebenarnya? Tentu saja hal tersebut bukanlah 100% kesalahan wartawan, melainkan karena adanya campur tangan dari pihak manajemen yang menyembunyikan kebenaran. Menurut apa yang dituliskan Ana Nadhya Abrar, Hal tersebut merupakan upaya media untuk menyeimbangkan posisinya di tengah tarik menarik antar organisasi media lain yang terkait dengan pengiklan (Abrar, 1993:32). Yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dan membatasi kerja wartawan untuk bekerja sesuai dengan etik jurnalistik. Praktiknya, masih sulit menjadi wartawan lingkungan hidup yang menuliskan berita lingkungan sesuai dengan tujuan jurnalisme lingkungan hidup itu sendiri, baik karena campur tangan pihak manajemen maupun kemampuan wartawan dalam mencari sumber dan menganalisisnya.

4.4.2 Penulisan Karhutla Secara Akomodatif

Bisakah berita karhutla diberitakan secara objektif dari berbagai sisi? Perlukah hal tersebut dilakukan? Menurut Ana Nadhya Abrar, berita lingkungan yang baik adalah yang mampu mengaitkan realitas lingkungan hidup dengan aspek politik, sosial, dan ekonomi (1993:134). Kenyataannya, menurut Abrar (1993) wartawan masih sangat sulit untuk berlaku objektif. Sebab, tidak mudah bagi wartawan lingkungan hidup untuk menggambarkan realitas lingkungan hidup secara komprehensif tersebut. Praktik tersebut seperti yang dilakukan oleh Fathra, bagaimana tidak cukup untuk memperdalam satu data narasumber saja, namun tidak mampu juga untuk menelusuri data dari pihak lain, sebab keterbatasan akan jangkauan lokasi kerja dan *deadline* yang ada.

.....Harusnya komprehensif. Tapi ya itu tadi, narsum belum bisa merinci programnya detail. Ya tinggal ditindak lanjuti pada berita-berita berikutnya. Misalnya disebutkan restorasi gambut 2017 400 ribu hektar. Saat ditanya detail di mana saja dilakukan, mereka hanya jawab di seluruh Indonesia, atau cuma sebut nama provinsi, belum sampai ke nama kecamatan atau desanya...(M Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, hal serupa disampaikan oleh Didik yaitu wartawan Riau Pos yang juga berpengalaman dalam meliput kasus karhutla sejak tahun 2014. Menurutnya data komprehensif akan selalu disajikan dalam pemberitaan karhutla di Riau Pos sebab sebagai kebijakan media yang memegang *tagline* akomodatif sehingga, ketika pemasangan iklan yang terlibat dalam kasus karhutla pun akan diberitakan, namun tidak menghakimi.

“Ketika dia terlibat asal ada konfirmasi tidak masalah, tapi beritanya tidak menghajar, itu kebijakan Riau Pos, judulnya tidak didasarkan kebencian, karena *tagline* kita jurnalistik akomodatif, kita tetap akomodir pihak yang salah juga, tidak kita hakimi” (Didik Hermanto, wawancara 4 Januari 2017)

Seberapa objektif kah Riau Pos dalam memosisikan pemberitaan ketika pengiklan yang beriklan terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan?, jawaban menurut redaktur halaman satu yaitu:

....Ya kita buat berita berimbang, kita beri kesempatan dia memberi hak jawab juga, karena dia beriklan di kita ya kita ga taruh di *headline* biasanya, ya harus naik meskipun di halaman tiga atau halaman bawah, soalnya sudah jelas beriklan sama kita. Ya, itu sudah ada pakemnya disini. harus ada konfirmasi sama kayak berita lain. semua sudah dikoordinasikan disini dari KL, gimana nih dia sudah beriklan ya mungkin taruh di halaman tiga...(Edwar Yaman, wawancara 27 Desember 2016)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh redaktur pelaksana kompartemen koran satu yaitu:

“Ya memilah sesuai porsinya, contoh RAPP kan banyak iklannya tuh, terus lahannya terbakar, ternyata itu anak perusahaan atau pemasoknya dan bukan RAPP jadi ya kita harus konfirmasi ke anaknya jangan ke induknya RAPP itu tadi. Jangan ujuk-ujuk ke RAPP karena dia memegang banyak iklan disini. Riau Pos situ kan dulu menganggap sebagai jurnalistik akomodatif, bangun negeri bijakkan bangsa, menjaga masyarakat untuk tetap tumbuh, tapi Riau Pos tidak hanya bisa hidup dengan masyarakat saja, ya menjaga relasi dengan perusahaan itu penting. Itu yang kita jaga. Istilahnya berkawan ya tetap nyubit juga kami”(Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Konfirmasi ternyata menjadi kunci penting dalam memberitakan kasus karhutla menurut Firman Agus. Tidak mudah untuk memberitakan persoalan tersebut memang. Apalagi ketika perusahaan yang terlibat pembakaran hutan banyak beriklan pada Riau Pos. Disini menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh Riau Pos, dimanakah dia harus berpihak, apakah hanya bermain aman untuk menyenangkan pihak pengiklan ataukah memberi wawasan kepada masyarakat. Tidak berhenti pada redaktur pelaksana saja, pernyataan mengenai jurnalisme yang akomodatif juga dijelaskan kembali oleh pemimpin redaksi Riau Pos yaitu:

...Kami mengolompokkan diri kami sebagai jurnalisme akomodatif, maksudnya kami akan menampilkan satu buah berita yang selalu membutuhkan konfirmasi, jadi biar publik yang menilai. nah, berita-berita karhutla seperti itu, seburuk apapun peristiwanya tetap kami beritakan perusahaan yang terlibatpun kami beritakan jadi betul-betul butuh konfirmasi. Kalau buruk ya biar orang yang menilai, kita sampaikan datanya, ya kode etik jurnalistik lah... (Asmawi Ibrahim, wawancara 28 Desember 2016)

Jurnalisme akomodatif menurutnya sangat cocok diterapkan pada koran kedaerahan seperti Riau Pos. Dari jawabannya, pemred Riau Pos ingin

menunjukkan bagaimana media tersebut berpihak kepada fakta sebagaimana pun hal tersebut berkaitan dengan kelancaran hubungan bisnis media dengan pengiklan.

...Pertama kita berpihak ke arah fakta di lapangan, kita sampaikan kemudian kita lihat disitu kenapa terjadi, yang berbuat siapa yang terlibat siapa, kita harus bagaimana, apakah benar-benar perusahaan melakukan, bukan melakukan maksudnya terjadi di area perusahaan, kemudian bagaimana tanggung jawabnya. Jika bukan perusahaan yang melakukan, kita juga harus memberi ruang untuk mereka, harus memberi tempat bahwa perusahaan ini seperti ini loh, selalu memposisikan diri difakta yang sebenarnya itu... (Asmawi Ibrahim, wawancara 28 Desember 2016)

Dari penjelasan tersebut, sedikit banyak tergambar bahwa akomodatif yang dimaksud berarti tetap memberi ruang kepada pengiklan untuk melakukan hak jawab. Pemberitaan dari berbagai sisi, mulai dari realitas lingkungan hidup hingga hubungan bisnis antara Riau Pos dan pengiklan. Namun, hal tersebut menunjukkan bagaimana aspek akomodatif menjadikan berita karhutla yang disajikan oleh Riau Pos cenderung bermain aman dan tidak berfungsi sebagai *watchdog*. Dimana ketika karhutla yang terjadi melibatkan perusahaan pengiklan, maka berita akan diletakkan pada bagian dalam, dan paling tidak berita akan dibuat sehalus mungkin tanpa menyudutkan pengiklan tersebut.

Lalu apakah akomodatif ini bisa mewakili nilai objektivitas berita lingkungan? Jawabnya, tentu tidak. Ketika media memberitakan kasus lingkungan hidup secara aman seperti akomodatif tersebut, maka bagaimana kontrol sosial sebagai peran media akan berfungsi. Memang, menurut penelitian yang dilakukan Hanitzsch (2005; 2006) menunjukkan bagaimana proses kerja jurnalis di Indonesia. Berjudul "*Journalist di Indonesia: Educated but Timid Watchdogs*" ditulis berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 385 wartawan di Jakarta (50% dari total responden), Yogyakarta (25% dari total responden), dan Sumatera Utara (25% dari total responden). Dia menemukan bahwa wartawan di Indonesia cenderung berorientasi untuk menyampaikan informasi secara netral dan obyektif, dibandingkan menjadi anjing penjaga (*watchdog*) yang kritis. Orientasi wartawan Indonesia ini meliputi, "*getting information to the public neutrally and precisely*",

“depicting reality as it is”, “staying away from stories with unverified content” and “getting information to the public quickly” (Hanitzsch, 2005: 498).

Temuan tersebut ternyata tidak berbeda dengan yang ada pada wartawan Riau Pos dalam memberitakan karhutla 12 Januari 2017 tersebut. Sebab, jurnalisme akomodatif menjadikan wartawan dan juga redaksi bermain aman dengan memberitakan karhutla secara netral dan menyampaikan data resmi dari pemerintah untuk mempercepat pemberitaan dan menjadikannya mudah. Orientasi akomodatif menjadi pilihan yang kurang tepat jika disandingkan dengan temuan Hanitzch, jurnalis dan tim redaksi juga kebijakan manajemen tidak akan bisa memberitakan perusahaan pengiklan dengan seandainya saja. Semua kembali lagi, kepada bisnis bagaimana bertahan menjadi media yang tetap terlihat memihak masyarakat dan lingkungan namun juga terlihat sangat baik dalam memposisikan pengiklan sebagai sumber pemasukan medianya.

4.4.3 Berita Lingkungan yang Tidak Pesimistis

M. Alwi Dahlan (1989) dalam Abrar (1993:35) menilai bahwa pers Indonesia cenderung memasukkan unsur dramatisasi dalam memberitakan informasi lingkungan hidup. Paling tidak, berita lingkungan hidup yang dihasilkan haruslah mampu memperluas wawasan masyarakat agar nantinya lebih kritis dalam menyikapi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di sekitarnya. Kenyataannya, Riau Pos tidak selamanya memberitakan berita lingkungan hidup yang menjual air mata dan di dramatisasi. Berita tentang yang terbit pada tanggal 12 Januari 2017 dengan judul “Tahun Ini, Restorasi Gambut Seluas 400 Ribu Ha” memberikan gambaran harapan akan kinerja pemerintah yang terlihat lebih serius dalam menghadapi permasalahan karhutla di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Fathra dalam penulisan berita yang dilakukannya:

...Berita dimaksud bentuk rencana aksi pemerintah tentang pemulihan gambut. Belakangan juga telah diterbitkan regulasi yang menguatkan perlindungan terhadap area gambut, terutama yang berada dalam kawasan konsesi perusahaan. Intinya bagaimana mendorong pemerintah, aparat hukum untuk tegas pada pelaku karhutla terutama korporasi. Dan tidak jarang oknum masyarakat yang bakar hutan/lahan juga suruhan perusahaan. Yang bersifat solusi terhadap persoalan

lingkungan....(M. Fathra Nazrul Islam, wawancara via email 15 Februari 2017)

Menurutnya, berita solutif yang ditulisnya mendorong ketegasan dari pemerintah dan aparat hukum akan perlindungan terhadap lahan gambut. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pihak redaksi mengenai pemberitaan karhutla tersebut. Redaktur pelaksana Riau Pos dalam penjelasannya menyampaikan sebagai berikut:

.....Kami memilih berita yang berisikan harapan, karena memberikan harapan ke masyarakat, misal satgas bilang kami jamin asap hilang seminggu lagi, berita-berita seperti itu tuh yang buat senang pembaca biasanya ada harapan gitulah, jadi ya dengan cara kami kawal terus kerja satgas ini....(Firman Agus, wawancara 27 Desember 2017)

Ketika berdiskusi tentang bagaimana Riau Pos menggambarkan permasalahan karhutla selama ini, ternyata semakin memberi harapan positif kepada pembaca, maka semakin banyak pula pembaca yang akan membeli koran yang terbit pada hari tersebut. Hal berbeda ternyata disampaikan oleh pemimpin redaksi dalam melihat sisi persoalan karhutla yang harus diangkat, menurutnya kesedihan adalah hal yang penting dalam angle pemberitaan kasus karhutla. Tentunya, pernyataan tersebut sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh wartawan juga redaktur pelaksana di atas.

...Kita terkadang, kepedihan masyarakat itu yang kita munculkan, kita setting beritanya. tapi *setting* dalam arti ada rumusan, kita mau angkat apa, apa yang kita kedepankan. Misalnya A, kenapa kok harus itu, bagaimana pemerintah bisa kesana, perusahaan ya juga jangan tutup mata. Ya *gor-goran* kadang kita kirim orang ke lapangan, seperti tim khusus, dan itu sampai di *finishing* di rapat nanti...(Asmawi Ibrahim, 28 Desember 2016)

Rupanya, ketika peneliti membaca berita-berita karhutla yang ada di Riau Pos dari tahun 2016 kebelakang, berita yang dituliskan kebanyakan menjelaskan jumlah titik api dan area mana saja yang terdampak kabut asap. Berita tentang kemunduran tidak diceritakan dalam permasalahan tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Lowe dan Morrison (1984:78) menyatakan bahwa berita lingkungan cenderung berkisah tentang kemunduran dibandingkan kemajuan. Juga, Campbell (1999) menyebut berita lingkungan yang bersifat

pesimis dan menyudutkan kegagalan teknologi atau manusia berpotensi memberikan gambaran yang salah tentang kenyataan sebenarnya. Sehingga, wajar bila pada praktiknya Riau Pos menerapkan pemberitaan yang optimistis dan mengarah kepada kemajuan untuk memberitakan persoalan lingkungan hidup yang sudah terhitung belasan tahun terjadi di provinsi Riau tersebut. Dengan demikian, praktik produksi berita lingkungan hidup mengarahkan kepada wartawannya untuk tidak membesar-besarkan persoalan karhutla dengan jalan dramatisasi dan menjual kesedihan bagi pembacanya.

4.5 News Editing : Proses Penyuntingan Berita Karhutla

Menurut redaktur pelaksana kompartemen Riau Pos proses pengeditan (*news editing*) sebagian besar dilakukan untuk menentukan judul dan gambar yang pas, kemudian diletakkan pada bagian mana di halaman satu tersebut. Ketika berita penting dan foto bagus maka akan ditempatkan pada bagian tengah, namun ketika berita karhutla masih kurang penting dibanding berita yang lain maka berita akan ditaruh pada sisi kirian atau bagian bawah koran depan. Hal tersebut sudah disesuaikan oleh layout standar pada perwajahan koran Riau Pos. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

...Koran 1 dari halaman 1 sampai 8, menjaga lintas berita, menjaga isu, menjaga berita ini supaya tidak keluar jalur, biasanya kalau teknis juga lebih kerjaan redaktur. dan untuk halaman satu pun kita diskusikan juga dengan redaktur ataupun pemred untuk menentukan *headline* bagus yang mana. *Listing* sekitar jam 3 , kalau saya oke ya taruh halaman dua atau didalam lagi. Kami juga merancang konsep tentang homo asapiens itu, dan itu sampai mendapat penghargaan, tapi ya mendapat pukulan telak juga dari republika. Halaman satu ini kerjanya tim. Kalau khusus untuk kabut asap dan karhutla ya bisa sampai ukuran bulan juga jadi *Headline* di Riau Pos...(Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Menurut Firman, keputusan yang dibuatnya untuk meletakkan suatu berita karhutla dalam halaman satu adalah untuk menjadikannya perhatian bagi para pembaca yang juga termasuk pemerintah. Kewenangan tersebut dilakukannya berdasarkan diskusi bersama antara pemimpin redaksi juga penanggung jawab

halaman (redaktur). Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan memposisikan diri sebagai korban dari karhutla tersebut.

“*Angle* masyarakatnya, dampaknya, langkah mengatasinya apa, kemudian mengakomodir kerja satgas karhutla, ya karena masyarakat ngga pengen tau sebabnya, mereka cuma pengen asap itu tidak ada besok, “ya instan saja pengennya. Kan ini wartawan kabupaten kota yang bisa ngontrol kejadian titik api. Riau Pos menganggap dirinya sebagai korban juga, ya karena merasakan. Ya kami plong aja pemberitaan soal karhutla ini” (Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Menurutnya, proses pengeditan sudah cukup. Karena setiap berita sudah melalui tahap pengecekan dari korlip, redaktur, hingga redaktur pelaksana. Proses pengecekan keakurasian berita karhutla selalu dilakukan dengan diskusi pada redaktur halaman satu. Diskusi tidak selalu dilakukan dengan pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi biasanya berperan dalam pengecekan berita ketika sudah naik cetak. Jadi, ketika berita masih terlihat berpotensi salah bagi pemred, maka akan diedit kembali pada waktu itu.

...Biasanya sudah akurat karena sudah lewat korlip dan redaktur. memposisikan diri sebagai redpel, menjadi bagian dari manajemen juga agar tidak keluar dari kebijakan media, dan memposisikan diri sebagai pembaca juga. Ya diskusi juga mana bagus yang naik ini dengan redaktur. karena pemred ga bisa baca semua jadi saya yang mantau. bagusnya *angle* gimana. Sebelum cetak ya diserahkan ke saya. Kalau ada peluang salah, masih ada waktu perbaiki sampai malam... (Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Setelah melakukan pengecekan kembali, menyesuaikan judul dengan isi berita, kemudian menyesuaikan berita dengan *space* yang sudah disediakan. Dalam pemberitaan di atas, terlihat proses *editing* yang dilakukan seputar perubahan judul berita yang pada menurut redaktur lebih mudah untuk dibaca. Menurut redaktur halaman satu judul yang dirubah selalu akan disesuaikan dengan isi berita dan dengan maksud lebih enak untuk dipahami. Pendapat tersebut disampaikan sebagai berikut :

“ Perlu saya perhatikan juga tata bahasanya bagaimana, kalimatnya gimana supaya efektif, rata-rata banyak tulisan reporter ini panjang-panjang. Teman-teman reporter ini masih banyak yang salah nempatkan kata depan. Kami diskusi santai dengan Redpel dengan 3 pilihan judul umpunya, mana yang cocok nih, terus diskusi lagi sama pemred,

bagaimana kalo ini? ok, ya sesuaikan judul sama isinya lagi habis itu” (Edwar Yaman, wawancara 26 Desember 2016)

Pemberitaan yang akan naik cetak juga menurutnya berdasarkan pada apa yang diinginkan oleh masyarakat.

...Ya menyampaikan bagaimana kegiatan pembakaran hutan tidak bagus, berita yang diinginkan masyarakat ya bagaimana kasus ini tidak terjadi lagi. Tapi perusahaan masih tetap saja melakukan itu.... (Edwar Yaman, wawancara 26 Desember 2016)

Selanjutnya, proses editing berita karhutla menurut penanggung jawab koran satu (redaktur pelaksana kompartemen), tidak mudah untuk membuatnya. Sebab contoh berita yang terbit pada 12 Januari tersebut, berupa sumber resmi. Sehingga, model pemberitaan seperti itu akan lebih sulit untuk menjelaskannya kepada pembaca dengan bahasa yang lebih mudah untuk ditangkap.

“..Karena sumber data kami itu bersifat resmi, dari satgas. Mereka yang memantau yang tau titik api, terus data dari mandat presiden, kemudian dengan istilah *backing*, yaitu yang sulit menjelaskan ke masyarakat mana tau mereka dengan itu, dunia abu-abu itu susah, makanya ketika ada pejabat datang ya kita ambil data dari mereka karena ada yang ngomong itu tadi. Data resmi yang *sikit* infonya, ya harus terjun kesana langsung akhirnya. Kalau sudah dapat sedikit ya cepat saja merambah kemana mana kami” (Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Berita karhutla yang baik menurut pandangan redaktur pelaksana adalah berita yang layak dan sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada. Tidak hanya itu, berita karhutla pada tanggal 12 Januari tersebut sudah memenuhi kelengkapan berita yang hal tersebut dirasa memang layak untuk diberitakan.

“.....Yang penting ya tetap menjaga kelengkapan berita, kadang lengkap tapi tak layak juga untuk di beritakan. Kode etik, konfirmasi harus, SOP harus tetap dijalankan. kalau berurusan dengan perusahaan juga kan harus berhati-hati kalau kita sudutkan terus nanti bisa berbalik, malah kita yang dibawa ke pengadilan. Kalau urusan dengan masyarkat ya paling besok aja marahnya. Ya menjaga hal itu adalah tugas saya sama pemred, agar berita lebih aman dari adanya peluang untuk digugat ke depannya. Soalnya menghadapi korporasi itu agak susah, kalau sekedar memberi hak jawab ya kami sediakan...” (Firman Agus, wawancara 27 Desember 2016)

Sehingga, dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang redaktur pelaksana, berita karhutla yang dirasa sudah cukup layak berdasarkan opini pribadinya, maka berita tersebut akan disepakati sebagai kesepakatan satu pandangan, mulai dari wartawan hingga medianya. Proses editing berita karhutla yang dilakukan oleh redaktur yang berupa pengecekan kelengkapan kalimat dan penulisan kata ternyata masih terdapat sedikit kesalahan, proses yang dilanjutkan oleh seorang redaktur pelaksana ternyata tidak menolong teks berita tersebut luput dari kesalahan. Namun, praktiknya Riau Pos menerapkan sistem minim sensor pada pemberitaan karhutla yang dibuat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Abrar (1993:85), berita lingkungan hidup secara praktis haruslah meminimalkan sensor, sebab dalam pemberitaan yang terkait tidak ada kaitannya dengan pemasang iklan yang berkaitan dengan bisnis media ataupun kepentingan redaksi. Proses pengeditan berita hanya sebatas penggantian judul berita yang tersebut membuat berita lebih mudah dipahami hanya dengan membaca *headlinenya* saja. Pengurangan dua paragraf terakhir pada proses editing juga tidak mengurangi makna dari teks yang dibuat, hal tersebut dilakukan oleh editor hanya untuk memenuhi *dummy* atau ruang berita yang sudah disediakan sehingga tidak mengganggu posisi iklan yang sudah disajikan pada *dummy* di hari tersebut.

4.5.1 Redaksional : Penyuntingan Hanya Pada Judul Berita

Proses penyuntingan berita karhutla yang berjudul “Pangdam Siap Kirim Pasukan” sebenarnya tidak banyak isi pemberitaan yang diubah oleh editor halaman maupun redaktur pelaksana. Proses *editing* yang dilakukan adalah mengganti judul menjadi lebih singkat dari judul awalnya yaitu “Pangdam Instruksikan Siap Kirim Pasukan”. Jika isi berita tersebut dibaca lebih lanjut, maka tepat bila wartawan menuliskan dengan kata “Instruksi” memang isi berita banyak bercerita tentang bagaimana pangdam dalam menginstruksikan kepada timnya untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di daerah. Namun, jika dilihat dari kacamata redaktur judul berita yang awal kurang menunjukkan kinerja dari pangdam dalam memadamkan api. Tidak hanya pada satu berita saja, penyuntingan tersebut dilakukan pada beberapa berita lain yaitu :

Tabel 4.2 Penyuntingan Judul berita

Judul Berita Awal	Judul Berita Setelah Penyuntingan
Restorasi Gambut Tahun 2017 Seluas 400 Ribu Hektar	Tahun Ini, Restorasi Gambut 400 Ribu Ha
Pangdam Instruksikan Mulai Pencegahan	Pangdam Siap Kirim Pasukan
Gunakan Pesawat Tempur Pantau <i>Hotspot</i>	Pesawat Tempur Pantau <i>Hotspot</i>

Berita karhutla, pada kenyataannya memang di bentuk sedemikian atau tetap dikonstruksi oleh editor yang memang berwenang dalam menentukan judul dan juga isis berita karhutla yang akan diterbitkan. Dari sini, nampak bagaimana sebenarnya Riau Pos memposisikan diri dalam kasus karhutla. Berita yang disajikan tersebut ternyata mendukung penuh kerja yang dilakukan oleh tim pangdam dan kinerja BPBD Riau.

Sepertinya, memang terdapat keseragaman berfikir dan kesepakatan dalam pengkonstruksian berita soal karhutla. Yang mana jurnalis akan selalu menunjukkan kinerja pemerintah dalam usaha penanggulangan karhutla, yang hal tersebut menjadi kebijakan redaksi untuk memihak kepada kinerja pemerintah tersebut, sehingga berita-berita lingkungan hidup yang masuk dari wartawan jika memberitakan soal kerja pemerintah maka akan dinomersatukan dengan sedikit pemolesan judul menjadi lebih menonjolkan kerja pemerintah.

Proses *editing* judul berita tersebut menunjukkan sejauh mana kerja redaksi yang memang hanya melakukan penyuntingan pada judul berita saja. Proses editing isi berita tidak ada yang berubah dari berita awal, pengurangan satu baris kalimat terakhir yang ada pada paragraf terakhir. Hal tersebut dilakukan karena jumlah kolom yang memang dibatasi tiga kolom saja. Menurut pemimpin redaksi Riau Pos, pengeditan yang dilakukan oleh editor memang sebatas perubahan judul yang hal tersebut kadang membahayakan penulisan isi berita yang kadang masih terdapat kesalahan penulisan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai berikut:

“.....Oh tidak sulit, karna sudah tersistem, kami kan rapat redaksi nih, terus kan ada beberapa lapisan, yang pertama ada reporter nih, kemudian ada lembaga liputan, jadi semua berita dari reporter ini masuk ke lembaga liputan, karna berita sudah terproyeksi jadi korlip nanti melihat dapat gak proyeksinya nih, kemudian kan masuk ke redaktur nih pemegang halaman nanti kan dia baca juga, setelah itu kan ada yang

namanya redpel yang mengawasi, jadi ya saya rasa cukup, ya saya di sini cuma nengok cemana hasil rapat tadi, ya kayak gitu aja kita mengawasinya, karna sistem itu tadi udah jalan. Dan keuntungan di Riau Pos sendiri karena sudah terbiasa bekerja dalam sistem, cuma kadang-kadang ya kebobolan juga ya, tapi itu kan karena persoalan editing biasanya, kalau untuk yang lainnya kita terukur lah... (Asmawi Ibrahim, wawancara 28 Desember 2016)

Tidak hanya itu, mantan wakil pemimpin redaksi Riau Pos yang sekarang menjabat menjadi pemipin redaksi Riau Pos *online* juga menyatakan hal yang sama, bagaimana proses penyuntingan yang dilakukan seakan tidak serius. Hal tersebut bisa jadi hal yang tidak menguntungkan nantinya bagi Riau Pos. Namun, hal ini akan dianggap wajar saja terjadi sebab para wartawan dan tim di redaksi yang memang sudah ditentukan arah peliputannya, sehingga untuk apa bersusah payah mengedit berita yang sudah sesuai dengan keinginan manajerial dan redaksi. Menurut Hary B Koriun:

“...Editing di sini itu masih lemah, kata aja banyak salah apalagi kalimat, jaman di cetak itu saya paling banyak protes, tapi mereka menganggap kalo selesai kerja ya sudah. Salah sekecil apapun di editing bisa jadi problem, dulu di Riau Pos pernah bermasalah, merubah satu huruf saja, dari Nabi jadi Babi, akhirnya kami di tuntutan. Cuma satu huruf itu, akhirnya kami minta maaf satu halaman penuh itu, kami dituntut sama pemuda anshor kalau tidak salah. Artinya, saya pernah jadi wapimred cetak tiga tahun, supaya dari reporter perbaikan bahasa di lakukan, ada peran editor, persoalannya editor di sini hanya beberapa saja yang mengerti akhirnya kita melakukan kesalahan terus menerus, pernah saya munculkan itu, berita dari wartawan tidak di edit jadi yang dicetak sama yang asli sama persis, kesalahan titik dan komanya sama, ya alasannya karna latar belakang pendidikan mereka, di sini juga tidak ada editor bahasa, jadi di situ susahnya, kalau saya ya harusnya njelimet gapapa tapi masalahnya ya di *deadline* itu, orang menganggap kesalahan sepele, tapi kan kita jual kata-kata, dan nantinya bisa jadi masalah...” (Hary B Koriun., wawancara 4 Januari 2017)

Ada kesadaran dari pihak redaksi akan lemahnya *editing* yang mereka lakukan. Namun kenyataan tersebut menjadi sangat wajar bagi para wartawan, sebab para redaktur tidak ikut bertungkus lumus di lapangan dan mencari data tentang kasus lingkungan tersebut. Sehingga, menurut wartawan Riau Pos akan

sangat wajar jika pengeditan hanya dilakukan pada judul berita saja, menurut beberapa wartawan Riau Pos adalah sebagai berikut:

“....editor cenderung membolak-balikkan saja kayak gabungan dari beberapa berita yang ada gitu kadang ada 4 sampai lima kode, perubahan biasanya di judul atau headlinenya...” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

“....kalau karhutla itu jarang di rubah total karena redaktur kan gak ada di lapangan, karena ini fakta, kalau ganti judul, atau lead tidak sesuai ya itu aja yang di rubah sama dia....”(Didik Hermanto, wawancara 4 Januari 2017)

“....Kadang-kadang ada perbedaan, namun kadang-kadang tidak ada perubahan kecuali di judul berita yang dibuat...” (Agustiar, wawancara 15 Januari 2017)

....Biasanya kalo total engga ya, pencarian angle dan judul aja yang di edit biasanya....(M Ali Nurman, wawancara 4 Januari 2017)

Dari beberapa pernyataan wartawan mengenai bagaimana kebiasaan penyuntingan yang dilakukan oleh editor memang terlihat bagaimana judul menjadi prioritas utama dalam mengedit berita karhutla. Hal tersebut rupanya tidak berbeda dari apa yang ditemukan oleh Rahmawati, et., al (2008). Dalam riset itu, kedudukan wartawan yang berada di posisi paling bawah dalam penentuan kehadiran sebuah teks di media membawa implikasi yang dalam. Dengan rutinitas kerja yang telah berjalan lama, wartawan sangat paham apa yang menjadi pertimbangan redaksi dalam memilih atau mengonstruksi suatu berita.

Dari proses pengeditan akan menentukan bagaimana *framing* atau pembingkaihan yang dilakukan mengenai pemberitaan karhutla yang akan naik cetak. Hal tersebut disampaikan Kaheru (2005) mengenai ciri penulisan yang dilakukan dalam pemberitaan lingkungan hidup. Dalam pembingkaihan media menggunakan bahasa tertentu untuk membahas suatu masalah agar khalayak menerima masalah tersebut sesuai dengan keinginan media. Dalam hal ini, Riau Pos membingkai kasus karhutla yang terjadi di daerah dengan kemasam penanganan yang cepat dan sigap dari BPBD dan Pangdam. Pemberitaan tidak diarahkan kepada bagaimana sebenarnya kebakaran yang terjadi dan bagaimana seharusnya masyarakat disekitar bertindak. Judul berita mengarahkan kepada

bagaimana Riau Pos yang menonjolkan peran Pangdam dalam menangani persoalan karhutla, sehingga permasalahan tersebut cukup melibatkan karhutla dan Pangdam saja tanpa ada kaitannya dengan masyarakat atau aspek lainnya.

4.6 News Publishing : Karhutla Riau Pos yang Naik Cetak

Proses penyajian berita bergantung pada bagaimana *dummy* yang sudah dibuat pada siang harinya, nilai berita juga menentukan bagaimana berita karhutla disajikan. Semakin besar dampak, siapa tokoh yang berbicara dibelakangnya akan menentukan di halaman berapa berita karhutla tersebut akan muncul. Pada praktiknya, penyajian berita karhutla pada edisi 12,13 Januari 2017 tersebut hanya memiliki satu kolom pada halaman depan di koran tiga dan diletakkan pada bagian kirian kolom, yang berarti berita tersebut tidak lebih penting daripada berita yang disajikan pada bagian *center* koran. Setelah melalui tahapan penyuntingan, maka berita karhutla yang ada akan disesuaikan dengan jumlah kolom yang sudah disediakan oleh divisi perwajahan. Kemudian berita akan diatur tata letaknya dan dicetak dalam kertas berukuran folio, untuk kemudian diperiksa kembali oleh redaktur pelaksana dan kemudian siap untuk naik cetak. Berita naik cetak yang pertama diikuti oleh peneliti dari tahapan rapat hingga naik cetaknya. Berita tersebut ditulis oleh M. Fathra Nazrul Islam. Berita tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun Ini, Restorasi Gambut 400 Ribu Ha

Sambungan dari hal.1

juta hektare di 7 provinsi tersebut. Pada 2017 ini target kita adalah 400 ribu hektare," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga bersama-sama mendukung dan menyelaraskan agenda kerja pelaksanaan restorasi gambut. Apalagi tahun ini pemerintah telah menargetkan restorasi gambut pada kawasan budi daya, hutan lindung, dan konservasi tanah air.

Sebab, dari peta indikatif menunjukkan bahwa restorasi gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Mulai dari hutan produksi sampai areal penguna lain, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin.

"Sisanya restorasi juga dilakukan di kawasan hutan lindung dan konservasi, yaitu seluas 685 ribu hektare," ucap Presiden.

Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"Saya minta semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian. Terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut harus betul-betul menjaga fungsi hidrologis gambut dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar," tutupnya.

Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution,

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

Nazir saat konferensi pers menambahkan bahwa selama 2016 lalu, pihaknya telah berkeliling ke 105 desa yang berada di areal gambut untuk membuat perencanaan maupun sosialisasi. Total gambut di seluruh desa pada 7 provinsi itu menurutnya mencapai 800 ribu hektare. (fat)



Gambar 4.3 berita karhutla naik cetak pada halaman koran nasional 12 Januari 2017

Maka, untuk melihat seperti apa proses jurnalisme lingkungan yang dilakukan oleh Riau Pos dalam pemberitaan karhutla pada 12 Januari 2017, peneliti menyederhanakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Daftar Poses Pemberitaan
“Tahun Ini, Restorasi Gambut 400 Ribu Ha”**

Konsep	Indikator	Keterangan
<i>News Planning</i>	Berita yang dibutuhkan pembaca	Tidak dibahas
	Editorial Mix	Berita berkaitan dengan kebijakan presiden sehingga perlu untuk diletakkan pada halaman pertama koran satu rubrik nasional.
	Agenda surat kabar	Tidak dibahas
<i>News Gathering</i>	Wawancara	Tidak ada
	Observasi	Tidak ada
	Rilis dan konferensi pers	Konferensi pers yang dilakukan oleh kepala badan restorasi gambut
	Studi literatur (riset)	Tidak ada
<i>News Writing</i>	5 W + 1 H	Kurang Lengkap
	Istilah Ekologi	Penggunaan kata hidrologis yang tidak diberi penjelasan
	Jenis Penulisan	<i>Stright news</i>
	Nilai Berita	Tokoh dan kemajuan atau keberlanjutan dari penanganan suatu kasus (konflik lingkungan hidup)
	Analisis dan Sintesis	Tidak ada, hanya berupa deskripsi tentang kebijakan pemerintah akan restorasi lahan gambut mengingat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
<i>News Editing</i>	Penyederhanaan kalimat	Dihapusnya dua paragraf terakhir pada berita asli
	Pengecekan jumlah angka, nama gelar, tanggal, lokasi, dan kata	Penulisan beberapa kata yang masih <i>typo</i> seperti “gambut” menjadi “gambur”
	Meminimkan sensor	Tidak ada sensor dalam berita tersebut
	Menentukan <i>headline</i> / judul	Berita asli dengan judul : “Restorasi Gambut 2017 Seluas 400 Ribu Hektar” Menjadi : “ Tahun Ini, Restorasi Gambut 400 Ha”
	Ferivikasi dan kode etik jurnalistik	Ferivikasi dilakukan untuk pengecekan siapa saja yang hadir pada rapat terbatas dan tentang jumlah lahan gambut
<i>News Publishing</i>	Jumlah kolom dalam pemberitaan	Tiga kolom pada halaman sambungan dan dua kolom pada halaman depan posisi bawah koran satu
	Makna pemberitaan	Memberitakan kebijakan dari presiden akan

		restorasi lahan gambut sebagai bentuk kepedulian dalam penanganan kasus karhutla
	Gambar dan <i>caption</i> yang jelas	Foto profil Nazir Foead sebagai kepala badan restorasi gambut
	Tidak ada kesalahan dalam pemberitaan	Tidak ada

Berita berikutnya ialah berita kedua yang diikuti oleh peneliti dari proses rapat hingga terbitnya. Berita tersebut ditulis oleh Eka Gusmadi Putra, yang dalam wawancara sebelumnya mengatakan bahwa peliputan yang dilakukannya tidak berdasarkan pada penugasan dari ruang redaksi. Berita tersebut adalah sebagai berikut:

Pangdam Siap Kirim Pasukan

Sambungan dari hal.17

"Yang penting cegah, cegah, cegah. Langsung lakukan pencegahan," tegas Pangdam dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Rabu (11/1).

Dikatakan jendral bintang dua tersebut, pencegahan memang harus dilakukan. Mulai dengan membuat embung, hingga sosialisasi di tingkat tiga pilar. Mulai babinkamtibnas, babinsa, dan kepala desa hingga kini diakuinya masih terus sosialisasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, Kata Lodewyck Pusung juga akan ditindaklanjuti dengan melihat perkembangan status atas evaluasi sepanjang tahun. "Pasukan sudah setel, kalau kurang dikirim ke sini, dari Medan, Padang bisa memperkuat disini (Riau, red),"

sambungannya.

Selain itu dikatakan Pangdam, dengan akan digelarnya rapat koordinasi pada Jumat (13/1) besok. Ia mengimbau kepada seluruh pihak supaya menyiapkan tekad yang bulat dan mari jadikan tujuan bersama agar tidak terjadi kebakaran lagi tahun ini.

"Tanamkan Mindset kita, bahwa Riau 2016 bisa tanpa Karhutla dan asap, jadi tahun ini juga harus bisa. Apapun akan saya lakukan, agar Riau bebas asap, kita harus solid," tegasnya.

Sementara itu terkait rencana Rakor persiapan menghadapi Karhutla besok, ditambahkan Kepala BPBD Riau Edwar Sanger memang akan dilaksanakan. Diikuti seluruh *stakeholder* yang akan diundang dan selama ini aktif di posko Satgas Siaga Darurat Karhutla.

"Kita lihat kondisinya dan akan dievaluasi terlebih dahulu secara menyeluruh. Untuk dibahas langkah selanjutnya," kata Edwar.

Pria yang kini menjabat Plt Wako Pekanbaru tersebut mengakui memang berdasarkan pantauan tim, ada wilayah yang mulai dibakar oknum tak bertanggung jawab

"Tim darat diturunkan langsung dan bisa diantisipasi. Ada kekhawatiran soal kondisi di Dharmasraya (Sumbang, red) namun kita sudah koordinasi langsung kesana karena kebakarannya semakin meluas," sambungnya.

Disinggung mengenai penetapan status Siaga Darurat Karhutla Riau dalam rapat besok. Dikatakan Edwar Sanger dalam pertemuan tersebut belum melihat sampai pada penetapan status. (exp)

Gambar 4.5 berita karhutla naik cetak pada koran pro-otonomi 12 Januari 2017

Maka, untuk melihat seperti apa proses jurnalisme lingkungan yang dilakukan oleh Riau Pos dalam pemberitaan karhutla pada 12 Januari 2017, peneliti menyederhanakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6 Daftar Poses Pemberitaan "Pangdam Siap Kirim Pasukan"

Konsep	Indikator	Keterangan
News Planning	Berita yang dibutuhkan pembaca	Tidak di bahas dalam rapat
	Editorial Mix	Berita yang terjadi di daerah maka akan ditempatkan pada koran pro-otonomi

	Agenda surat kabar	Tidak ada
<i>News Gathering</i>	Wawancara	Wawancara langsung dengan pangdam Mayjen Lodewyck Pusung dan Kepala BPBD Edwar Sanger
	Observasi	Tidak ada
	Rilis dan konferensi pers	Tidak ada
	Studi literatur (riset)	Tidak ada
<i>News Writing</i>	5 W + 1 H	Lengkap
	Istilah Ekologi	Tidak ada penggunaan istilah ekologi dalam berita Pangdam Siap Kirimkan Tersebut
	Jenis Penulisan	<i>Stright news</i>
	Nilai Berita	Konsekuensi kasus yang dilakukan oleh pembakar hutan
	Analisis dan Sintesis	Tidak ada analisis dan sintesis dalam pemberitaan
<i>News Editing</i>	Penyederhanaan kalimat	Berita asli sama persis dengan berita yang naik cetak
	Pengecekan jumlah angka, nama gelar, tanggal, lokasi, dan kata	Penggunaan bahasa asing yang tidak di cetak miring " <i>mindset</i> "
	Meminimkan sensor	Tidak dilakukan penyensoran
	Menentukan <i>headline</i> / judul	"Pangdam Instruksikan Mulai Pencegahan" diubah redaktur menjadi "Pangdam Siap Kirim Pasukan"
	Ferivikasi dan kode etik jurnalistik	Penulisan berita sudah memenuhi kode etik jurnalistik, ferivikasi akan dilakukan ketika banyak berbicara data titik api dari BMKG
<i>News Publishing</i>	Jumlah kolom dalam pemberitaan	Tiga kolom pada halaman sambungan dan dua kolom pada halaman depan
	Makna pemberitaan	Memberi informasi akan upaya pencegahan asap yang dilakukan pangdam. Aksi Pangdam menjadi framing utama dalam pemberitaan.
	Gambar dan <i>caption</i> yang jelas	Gambar yang diambil oleh fotografer Riau Pos secara langsung dengan <i>caption</i> yang berkaitan dengan topik pemberitaan.
	Tidak ada kesalahan dalam pemberitaan	Berita dianggap tidak sesuai dengan keinginan redaksi, yang seharusnya memberitakan kebakaran hutan dan lahan di Tesso Nilo.

Berita ketiga yang berjudul “Gunakan Pesawat Tempur Pantau Hotspot” disunting menjadi “Pesawat Tempur Pantau Hotspot”. Berita tersebut ditulis oleh Agustiari. Berita tersebut adalah sebagai berikut:

Pesawat Tempur Pantau *Hotspot*

Sambungan dari hal.17

ini gambut dan mudah terbakar, maka ini dilakukan sejak dini.

“Patroli udara ini akan dilakukan setiap hari, dibarengi dengan kegiatan rutin personel setiap terbang. Mengawasi kemungkinan ada titik panas, yang harus segera dipadamkan,” kata Danlanud.

Kegiatan patrol udara ini sudah dilakukan Rabu (11/1) . Pesawat tempur yang dikerahkan untuk ikut memantau adanya *hotspot*

itu adalah dari Skadron Udara 12 dan 16, serta Heli NAS-332 Super Puma. “Saat ini Heli NAS-332 itu *standby* SAR di Lanud kita, untuk melakukan pemantauan,” jelas Jendral bintang satu ini.

Danlanud menambahkan setiap harinya, pesawat tempur Lanud Rsn akan berpatroli di seluruh wilayah udara Riau dan heli akan melakukan pemantauan di wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.

“Kawasan Taman Nasional Tes-

so Nilo (TNTN) juga harus tetap menjadi perhatian, karena apabila terbakar lagi, akan ada aksi nyata seperti pada tahun lalu,” paparnya mengingatkan.

Danlanud berharap walaupun Satgas penanggulangan karhutla belum terbentuk, semua elemen di himbau untuk dapat melakukan aksi pencegahan dan penanggulangan karhutla semaksimal mungkin, termasuk Lanud Roem-smin Nurjadin yang dipimpinnya. (gus)

Gambar 4.7 berita karhutla naik cetak pada koran pro-otonomi 13 Januari 2017

Maka, untuk melihat seperti apa proses jurnalisme lingkungan yang dilakukan oleh Riau Pos dalam pemberitaan karhutla pada 13 Januari 2017, peneliti menyederhanakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8 Daftar Poses Pemberitaan “Pesawat Tempur Pantau Hotspot”

Konsep	Indikator	Keterangan
<i>News Planning</i>	Berita yang dibutuhkan pembaca	Perkembangan kebakaran hutan dari hari sebelumnya
	Editorial Mix	Berita karhutla yang belum memunculkan asap parah sehingga menempati koran tiga pada halaman dalam.
	Agenda surat kabar	Meliput dana APBD karhutla dan memberitakan kebakaran pad TNTN yang dilewatkan pada sebelumnya 12 Januari 2017
<i>News Gathering</i>	Wawancara	Tidak ada
	Observasi	Tidak ada
	Rilis dan konferensi pers	Data bersumber dari konferensi pers dari Komandan Lanud Rsn
	Studi literatur (riset)	Tidak ada
<i>News Writing</i>	5 W + 1 H	Lengkap
	Istilah Ekologi	Tidak ada
	Jenis Penulisan	<i>Stright news</i>
	Nilai Berita	<i>Proximity</i> dan konsekuensi (antisipasi dan kewaspadaan terhadap kasus karhutla)
	Analisis dan Sintesis	Berita berupa pemaparan hasil konferensi pers

		sehingga tidak memuat unsur analisis dan sintesis atau memberi solusi dari berita yang ditulis.
<i>News Editing</i>	Penyederhanaan kalimat	Penyederhanaan dilakukan dengan menghilangkan dua paragraf terakhir pada berita asli.
	Pengecekan jumlah angka, nama gelar, tanggal, lokasi, dan kata	Masih terdapat kesalahan pada penulisan kata depan dan kata sambung “di” untuk kata “di himbau” yang seharusnya “diimbau”
	Meminimalkan sensor	Tidak ada sensor pada penulisan berita
	Menentukan <i>headline</i> / judul	Penyederhaan dari “Gunakan Pesawat Tempur Pantau <i>Hotspot</i> ” menjadi “Pesawat Tempur Pantau <i>Hotspot</i> ”
	Ferivikasi dan kode etik jurnalistik	Ferivikasi tidak dilakukan karena berita bersumber dari rilis
<i>News Publishing</i>	Jumlah kolom dalam pemberitaan	Berita sambungan berjumlah tiga kolom dihalaman dalam dan satu kolom pada halaman depan
	Makna pemberitaan	Memaparkan bagaimana kerja Satgas Udara dalam peran penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Tamana Nasional Tesso Nilo
	Gambar dan <i>caption</i> yang jelas	Gambar berupa foto profil dan nama dari komandan Lanud Rsn yang menyampaikan rilis tersebut.
	Tidak ada kesalahan dalam pemberitaan	Tidak ada kesalahan ketika evaluasi berita di ruang redaksi

Berita karhutla selanjutnya, terbit pada halaman *For-Us* koran Minggu Riau Pos. Berita tersebut disajikan sebanyak satu halaman penuh dengan jumlah enam kolom. Berita karhutla Minggu berbeda sebab dilakukan dengan penulisan *feature* dan dengan halaman kolom yang disediakan lebih banyak khusus pada hari Minggu. Berita tersebut adalah sebagai berikut:

Riau kembali dibayang-bayangi hot spot yang mulai bermunculan. Saatnya bergerak meminimalisir penyebab teror asap yang sempat menjadi momok negatif dan menghantui beberapa tahun lalu.

Laporan **MARRIO KISAZ**, Pekanbaru

MINIM kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2016 lalu bukan jaminan Riau akan bebas dari teror kabut asap di 2017. Ancaman yang dapat mengganggu beragam sektor kehidupan tersebut bisa terulang lagi jika Riau telena dan tidak bersiap sejak dini.

Kondisi itu perlu mendapat perhatian serius, karena hot spot mulai bermunculan di daerah. Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprediksi Riau akan menghadapi cuaca panas yang lebih ekstrim di tahun 2017.

Dengan situasi tersebut kewaspadaan dan langkah antisipasi menjadi hal yang sangat urgen dilakukan. Sebelum kebakaran hutan dan lahan yang terpantau tersebut meluas semakin membara.

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sugarin mengatakan hal itu memang perlu mendapatkan perhatian ekstra. «Prediksi BMKG, iklim 2017 lebih ekstrim dari 2016. Makanya perlu pencegahan lebih awal karena bulan Februari akan masuk musim kemarau terutama di pesisir timur wilayah utara,» tuturnya saat berbincang dengan *Riau Pos*, baru-baru ini.

Kekhawatiran tersebut mulai menghampiri. Meskipun cenderung berfluktuasi, namun *hot spot* kerap terpantau di Sumatera, khususnya di Riau. Seperti Jumat (13/1) lalu, terpantau 19 *hot spot* dan lima titik berasal dari Riau.

Berdasarkan pantauan BMKG 19 *hot spot* tersebut berasal dari 8 titik dari Sumatera Utara, empat titik dari Jambi dan satu titik dari Sumatera Selatan. Sementara untuk Di Riau lima hot spot tersebar di Bengkalis satu titik, Meranti satu titik dan di Pelalawan terbanyak dengan tiga titik.

Menanggapi ancaman karhutla yang mulai menghampiri Pemerhati Lingkungan Riau Prof Adnan Kasri menilai kewaspadaan menjadi hal yang sangat mutlak untuk dilakukan. Begitu juga langkah antisipasi dan mitigasi juga perlu dilakukan agar Riau dapat terbebas dari ancaman asap. «Jadi jangan tunggu terbakar dulu, jangan tunggu ada asap dulu. Harus waspada dan mengambil langkah antisipasi dan penanganan cepat bersama pihak-pihak terkait,» tegasnya.

Menurut Guru Besar Universitas Riau itu, langkah menginformasikan ancaman cuaca ekstrim dari BMKG sudah tepat. Sehingga dapat menjadi dasar bagi stakeholder terkait untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanganan yang cepat.

Saat ditanyakan langkah antisipasi yang dapat dilakukan, Adnan menilai tahun 2016 sudah menunjukkan langkah yang maksimal. Begitu juga untuk langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan tim Satgas yang melibatkan lintas instansi.

«Sebenarnya standar kerja dan langkah antisipasi yang telah dilakukan tahun 2016

dengan seluruh pihak terkait. Baik dari kabupaten/kota, provinsi, lintas sektoral hingga ke Pemerintah Pusat.

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah langkah antisipasi perlu dukungan peralatan, dana dan sumberdaya manusia. Beberapa poin tersebut juga berperan penting dalam meminimalisir kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah rawan.

«Selain itu langkah yang paling efektif adalah memang pengawasan secara menyeluruh. Aparat yang berwenang sudah harus melakukan patroli dan pengawasan secara berkelanjutan, khususnya di daerah titik rawan karhutla. Jangan sampai api sudah membara, asap sudah banyak baru turun melakukan langkah penanganan. Apalagi kawasan hutan kita itu didominasi lahan gambut yang tergolong sulit dipadamkan jika sudah terbakar. Jadi lebih baik mencegah dan mengantisipasi dari pada melakukan penanganan ataupun pemadaman,» terangnya lagi.

Kanal Bloking Perlu Dievaluasi

Selain melakukan pengawasan dan pemetaan kawasan rawan terbakar, langkah antisipasi yang juga dapat dilakukan adalah dengan melanjutkan beberapa langkah yang sudah pernah di terapkan sebelumnya. Seperti pengembangan kanal bloking yang dinilai juga berperan positif dalam mengeliminir peningkatan luasan lahan yang terbakar.

«Seperti kanal bloking yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya perlu dilanjutkan lagi. Tapi juga harus dievaluasi dan dilakukan pemeliharaan agar kanal bloking yang dilakukan untuk memastikan lahan gambut tetap basa berjalan sesuai

Gambar 4.9 berita karhutla naik cetak pada koran Minggu 15 Januari 2017

Maka, untuk melihat seperti apa proses jurnalisme lingkungan yang dilakukan oleh Riau Pos dalam pemberitaan karhutla pada 15 Januari 2017, peneliti menyederhanakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Daftar Poses Pemberitaan “Waspada Sebelum Membara”

Konsep	Indikator	Keterangan
News Planning	Berita yang dibutuhkan pembaca	Bagaimana penanganan dan antisipasi untuk kasus karhutla
	Editorial Mix	Berita satu halaman penuh pada rubrik <i>for us</i> di koran Hari Ahad
	Agenda surat kabar	Memberitakan kerja pemerintah tentang antisipasi kasus karhutla, membuat halaman Minggu mengangkat topik yang lingkungan yang hangat pada pertengahan Minggu di Bulan Januari tersebut, sebagai bentuk teror lingkungan hidup.
News Gathering	Wawancara	Wawancara dilakukan kepada pihak BMKG, Pengamat lingkungan hidup, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau
	Observasi	Tidak ada

	Rilis dan konferensi pers	Tidak ada
	Studi literatur (riset)	Tidak ada
<i>News Writing</i>	5 W + 1 H	Lengkap
	Istilah Ekologi	Adanya penjelasan tentang kanal blocking dan hidrologi
	Jenis Penulisan	<i>Comprehensive news feature</i>
	Nilai Berita	Konsekuensi dari kasus (konflik) lingkungan
	Analisis dan Sintesis	Analisis dilakukan dengan menganalisis berita yang terbit pada hari-hari sebelumnya mengenai kasus karhutla tersebut dan memberi solusi atau sintesis melalui pandangan para ahli lingkungan hidup
<i>News Editing</i>	Penyederhanaan kalimat	Tidak ada penyederhanaan
	Pengecekan jumlah angka, nama gelar, tanggal, lokasi, dan kata	Beberapa kesalahan penulisan kata seperti : sehingga, negatif, dan penggunaan huruf besar dan kecilnya.
	Meminimalkan sensor	Tidak ada sensor, sebab tidak ada tentang perusahaan Riau Pos, pengiklan terkait maupun klien.
	Menentukan <i>headline</i> / judul	Dalam TOR tertulis “Antisipasi Karhutla” menjadi “Waspada Sebelum Membara”
	Ferivikasi dan kode etik jurnalistik	Penulisan berdasarkan kaidah jurnalistik dan sesuai kode etik
<i>News Publishing</i>	Jumlah kolom dalam pemberitaan	Satu halaman penuh yaitu enam kolom
	Makna pemberitaan	Menceritakan analisis terjadinya kembali karhutla pada Januari 2017 dan solusi menghadapi karhutla.
	Gambar dan <i>caption</i> yang jelas	Gambar pertama dengan ukuran enam kolom dan gambar ke-dua dengan jumlah tiga kolom. Gambar pertama menunjukkan <i>caption</i> yang berkaitan, gambar kedua memiliki kesamaan dengan gambar yang digunakan pada pemberitaan tanggal 13 Januari 2017, hanya berbeda pada penulisan <i>caption</i> .
	Tidak ada kesalahan dalam pemberitaan	Tidak ada kesalahan pemberitaan ketika proses evaluasi dilakukan

4.6.1 Ruang Karhutla Masih Terbatas

Berita karhutla “Tahun Ini, Restorasi Gambut Seluas 400 Ha” merupakan berita pertama yang berkaitan dengan karhutla dan disajikan pada halaman pertama pada koran Riau Pos. Berita tersebut merupakan hasil inisiatif peliputan yang dilakukan oleh wartawan Riau Pos posko Jakarta. Dengan kata lain, berita tersebut tidak dibicarakan sama sekali dalam agenda proyeksi pada hari sebelumnya. Sehingga, sangat tidak mungkin redaksi menempatkannya menjadi

berita utama dengan memakan jumlah enam kolom misalnya. Sehingga, berita yang terhitung cukup penting bagi redaktur koran satu tersebut mau tidak mau tetap disajikan pada halaman koran satu. Dengan catatan hanya dua kolom pada halaman depan koran dan diletakkan pada bagian bawah koran. Semakin penting nilai suatu berita maka semakin besar halaman yang disediakan. Estetika ternyata menjadi pertimbangan utama dalam menentukan posisi suatu berita. Jika berita karhutla tersebut memiliki nilai penting, tetapi foto dan grafis tidak mendukung maka layak untuk diletakkan pada posisi kirian atau bawah saja. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh divisi perwajahan Riau Pos:

“....Penentuan posisi berita, apakah berita utama, kedua, di atas, bawah, atau kirian, ditentukan oleh redaktur berdasarkan bobot nilainya, *layouter* mnyusunnya agar terlihat bagus dan terpenuhi unsur keterbacaannya. Ini berita di halaman sambungan. Bentuk berapa kolomnya lebih ditentukan oleh *layouter* dengan pertimbangan estetik dan unsur keterbacaannya...” (Furqon LW, wawancara 15 Februari 2017)

Pernyataan tersebut, tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh redaktur atau penanggung jawab halaman satu Edwar Yaman:

.....Misal karhutla ada 2 *angle* menarik nih, fotonya bagus juga nih, ada data grafis pendukung juga umpamanya HL nya uda ketahuan nih, foto sudah, ya kita kasih *layout*, tinggal di tata letak, *layout* kerja sama dengan desain grafis macam mana biar menarik, ya tugas saya lebih ke *editing* beritanya biar dapat HL dengan redpel dan pemred nantinya. Pada intinya koordinasilah soal halaman satu ini. Karena halaman ini penting sekali....(Edwar Yaman, wawancara 26 Desember 2016)

Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun kasus lingkungan tersebut sudah sering terjadi, tidak selalu akan menempati kolom utama pemberitaan. Nilai berita akan selalu menjadi pertimbangan dalam menentukan tata letak suatu berita dalam surat kabar. Temuan ini serupa dengan Mochamad Nuryadi (2004) “*Penerapan Jurnalisme Lingkungan Pada Pemberitaan Lingkungan Hidup di Surat Kabar*” dalam tulisannya, surat kabar Kompas dan Sinar Harapan menyajikan berita lingkungan hidup dengan porsi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan berita lain seperti politik dan ekonomi.

Tidak berbeda dengan temuan Nuryadi, pada penelitian ini peneliti juga menemukan hal yang sama. Meskipun pada pernyataan sebelumnya Riau Pos

merupakan media yang *concern* terhadap permasalahan lingkungan hidup terutama pada koran hari Minggu, tidak menjadikan koran yang terbit pada harian menyajikan porsi lingkungan hidup yang banyak juga. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyajian dua kolom berita karhutla pada posisi bawah dan tiga kolom pada halaman sambungannya. Produksi berita lingkungan hidup di Riau Pos, seperti yang dikatakan oleh Kaheru (2005:32) yang disebut dengan *trivialisme*. Karakteristik tersebut masih berlaku bagi media cetak yang memang menyajikan berita lingkungan khususnya karhutla dalam bentuk *stright news*. Dengan begitu, penyederhanaan tidak hanya terlihat dari jumlah halaman dan posisi berita tersebut tetapi juga dari isi berita. Pada penyajian *stright news* akan sulit bagi seorang wartawan menuliskan latar belakang dari data yang ditemukannya karena keterbatasan *space* yang memang sudah ada pakemnya atau standar ruang berita yang disediakan oleh departemen perwajahan.

4.6.2 Berita Karhutla yang Selalu Mengakomodir Kerja Pemerintah

Sebagian besar wartawan lebih suka mengutip apa yang disampaikan oleh para pejabat atau para ahli mengenai pendapat mereka tentang persoalan lingkungan hidup (Abrar, 1993: 71). Menurutnya, tindakan seperti itu akan membuat berita yang dihasilkan tidak sesuai dengan konteks realitas lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dimuat dalam pemberitaan menurut Eka bukan hanya persoalan lingkungan hidup saja. Pendapat tersebut dikemukakannya sebagai berikut:

Masalah ini sama kayak *illegal logging* terlalu banyak pihak yang bermain, memanfaatkan masyarakat, dimanfaatkan kebiasaan mereka yang cenderung buka lahan dengan cara mudah itulah ngebakar kan itu merentet ke perusahaan ikut ngebakar, mungkin lebih ke aturan ya, tapi ya tetap aja orang yang main sampe ke provinsi pun ya gitu aja ga bisa mengerjakan, lebih ke modernisasi ekonomi Riau ni kebakaran hutan. Sampai ke semua sisi sosial, ekonomi, kesehatan” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Dari pernyataan tersebut, Eka memiliki pengetahuan akan persoalan lingkungan hidup mengenai kasus karhutla yang ditulisnya. Namun, pengetahuan akan persoalan lingkungan hidup tidak menjadikan apa yang ditulis oleh wartawan

sesuai dengan apa yang diketahuinya. Praktikanya, penulisan berita karhutla yang ditulisnya tidak sepenuhnya bertakaitan dengan pengetahuan akan kasus yang dimilikinya. Beberapa pemberitaan yang ia muat masih memunculkan komplain dari pihak atau narasumber elit pemerintahan yang memang ingin menjadi topik dalam pemberitahaan kasus karhutla tersebut. Menurutnya, dalam pengalamannya memberitakan kasus karhutla komplain bukan berasal dari redaksi ataupun masyarakat terkait dengan kasus tersebut. Komplain yang terkesan sepele bahkan akan muncul dalam posko tempat Eka ditugaskan. Menurutnya :

“....Komplain biasanya dari tim posko aja yang saya beritakan misalnya pangdam ada disebelah presiden kesini nengok pemadaman api, terus waktu itu ada kapolda di sebelahnya dan waktu itu danremnya nggak masuk jadi dari pihak TNI nya komplain gitu ke saya, saya ga beritain kenala saya, kalau dari redaksi ga ada sejauh ini. Komplain dari redaksi itu lihat isinya sih, kalau itu di daerah biasanya yang kena wartawan berita. Ga ada sih komplain ke aku langsung....” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017).

Hal ini tentunya berkaitan dengan nilai objektivitas dari sebuah berita. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa wartawan tidak sepenuhnya bebas nilai dalam meliput berita itu sendiri. Pada kenyataannya, wartawanlah yang membentuk realitas yang akan diberitakannya. Eka yang banyak berinteraksi pada posko tersebut akhirnya memilih untuk lebih memberitakan perihal tokoh yang berbicara mengenai kasus karhutla pada posko tempatnya bertugas. Interaksi tersebut yang kurang lebihnya akan berpengaruh kepada bagaimana bentuk dan isi berita yang akan dihasilkan oleh wartawan (McQuail, 2000:65).

Nilai objektif berita lingkungan hidup merupakan hal penting dalam pemberitaan. Prinsip tersebut menurut Eka adalah penting :

“...Objektifitas ini sangat perlu kalau di cetak. Ketika ada tersangka, ok lah dari masyarakat, cenderungnya kami keroyokan ngerjakannya karhutla ini biar objektif, kalau kesimpulanku ya harus objektif..” (Eka Gusmadi Putra, wawancara 15 Januari 2017)

Namun, prinsip tersebut pada kenyataannya akan berbenturan dengan berbagai kepentingan yang penulis katakan sebelumnya bahwa wartawan tidak sepenuhnya

bebas nilai. Kenyataan tersebut didukung oleh pernyataan Abrar (1993 : 149-150) bahwa, wartawan lingkungan haruslah bersikap obyektif. Menurutnya, masih banyak wartawan lingkungan hidup yang masih bersikap tidak obyektif. Ini disebabkan oleh berbagai kepentingan itu tadi, baik dari wartawan itu sendiri maupun pengaruh dari ruang redaksi yang dikontrol oleh editor. Sebagai prinsip utama yang dimiliki Eka adalah wartawan lingkungan haruslah obyektif, namun pada praktiknya ilmu dasar mengenai realitas karhutla yang sudah dimilikinya berbenturan dengan kepentingan sekelompok elit di mana posko tempatnya bertugas. Sehingga, obyektivitas yang menjadi prinsipnya dipertaruhkan mengikuti kepentingan lain yang ternyata kepentingan tersebut di luar kepentingan redaksi atau editor.

Beberapa fakta mengenai kepentingan yang mempengaruhi pemberitaan ditemukan dalam praktik pemberitaan karhutla di Riau Pos, bahwa:

“.....Pemerintah itu suka kalau kita beritakan karhutla, karena pemerintah provinsi cenderung disudutkan kan soal kasus ini, permasalahannya kan di perusahaan sebenarnya bukan di pemerintah.....”
(Hary B Koriun, wawancara 4 Januari 2017)

Pernyataan Hary di atas menunjukkan kesinambungan dengan fakta peliputan yang juga dilakukan oleh Eka Gusmadi Putra. Pemberitaan karhutla yang dilakukan wartawan ternyata tidak serta merta murni hanya karena persoalan lingkungan dan humanisme saja. Sumber elit digunakan sebagian besar dalam isi pemberitaan karhutla. Temuan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Guy Berger dalam tesis Yayan Sakti Suryandaru (2015). Berger menemukan bahwa pemerintah lebih memiliki otoritas dibandingkan dengan masyarakat sipil dan grup-grup penekan seperti LSM. Pemberitaan lingkungan hidup sering menempatkan kelompok-kelompok elit seperti pihak-pihak dari badan pemerintahan juga saintis sebagai sumber yang berwenang terhadap sebuah informasi. Sumber yang digunakan wartawan Riau Pos ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Berger.

4.7 Faktor yang Mempengaruhi Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup di Riau Pos

Proses jurnalisme lingkungan hidup dalam pemberitaan karhutla yang dilakukan oleh wartawan Riau Pos dalam peliputan sebenarnya sedikit banyak mendapat pengaruh dari tingkat pengetahuan dan latar belakang akan persoalan lingkungan hidup. Menurut Shoemaker dan Reese (1996) dalam level individu, para wartawan akan berhubungan langsung dengan realitas yang ditemuinya di lapangan. Sebagaimana berita karhutla yang tersaji di media adalah hasil konstruksi yang dibentuk secara subyektif oleh wartawan itu sendiri. Dalam tingkatan ini individu wartawan Riau Pos yang melakukan peliputan karhutla sebagian besar adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan lingkungan hidup maupun bergabung pada organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh M. Fathra Nazrul Islam yang tidak begitu tertarik meliput permasalahan lingkungan hidup, kemudian Agustiar, Eka Gusmadi Putra, M.Ali Nurman, dan Didik Hermanto yang juga tidak memiliki organisasi atau latar belakang yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi, latar belakang pendidikan jurnalistik menjadi bekal utama mereka sebagai jurnalis di Riau Pos dan juga terlibat dalam penulisan berita-berita karhutla.

Wartawan yang memiliki pengetahuan lingkungan hidup hanyalah Mario Kisaz yang memang ditugaskan pada peliputan *desk* lingkungan hidup atau yang disebut dengan *for-us*.⁸ Pengalaman tersebut ternyata disetujui oleh koordinator Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau). Menurutnya, dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan penalaran yang kurang berperspektif lingkungan hal tersebut menjadikan pemberitaan yang dibuatpun terkesan dangkal. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan sebagai berikut:

“Wartawan perspektif lingkungan itu sangat jarang jadi ya sangat sedikit bias *tercover*, media lokal itu masih jarang sekali. sekarang ini sudah lebih ke soal penegakan hukumnya. Berita selama ini lebih *soft*, padahal harusnya lebih dalam, mengungkap persoalan aktornya, karenan media juga di *support* dengan pemerintah dan pemerintah juga terlibat dengan oknum-oknum yang melakukan pembakaran perusahaan dan sebagainya. Ketika ada beberapa isu dari perspektif NGO juga di muat di

⁸ Hasil wawancara dengan para wartawan Riau Pos Januari 2017

media, kebakaran 2015 itu sebenarnya menjadi titik kesadaran semua orang bahwa persoalan ini perlu di kawal gitu loh, pemerintah akhirnya ngeluarin kebijakan baru, level lokal tapi kurang terangkat, belum maksimal. Pemerintah itu memandang industri ini sebagai *income*, tanpa melihat resikonya belum jadi *mainstreamnya* kebijakan kitalah....”(Woro Supartinah, wawancara 9 Januari 2017)

Tantangan praktik jurnalisme lingkungan juga salah satunya datang dari para jurnalis yang masih sedikit memiliki latar belakang dan pemahaman akan perbedaan cara peliputan maupun penulisan berita. Dengan kemampuan yang seperti itu dan penugasan peliputan yang secara umum diberikan oleh redaksi, menjadikan para jurnalis menyamaratakan peliputan dan penugasan berita lingkungan hidup dengan peliputan dan penulisan berita populer. Menurut Fathra wartawan Riau Pos, tidak ada perbedaan etika antara peliputan dan penulisan berita lingkungan dan berita lain, semuanya dengan perlakuan yang sam. Hal sama juga disampaikan oleh wartawan Riau Pos yang lain :

“Mengenai etika menulis pemberitaan tentang lingkungan etikanya sama saja dengan yang lainnya. Mesti tahu dahulu persoalan lingkungan apa yang mau diangkat, jika sudah begitu, harus menguasai data, lalu mencari sumber beritanya, bisa dari masyarakat, pengamat, pejabat maupun LSM yang ada”(Agustiar, wawancara 15 Januari 2017)

Berlanjut, tantangan lain yaitu tujuh dari wartawan yang diwawancarai oleh peneliti hanya satu orang yang tergabung dalam organisasi profesional jurnalis⁹. Tentunya, hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagaimana media dan jurnalis memperoleh pengetahuan yang lebih tentang praktik jurnalisme. Siregar (1996) mengungkapkan bagaimana pentingnya organisasi profesi. Yaitu untuk membantu institusi jurnalistik dan mengembangkan pelaku profesi di dalamnya. Sedangkan organisasi media Riau Pos nampaknya tidak melihat hal tersebut adalah penting untuk mengarahkan etika jurnalistik bagi para wartawannya. Hal tersebut terlihat dari jumlah wartawan yang hanya satu orang saja tergabung dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). PWI menjadi satu-satunya organisasi

⁹ Hasil wawancara mengenai latar belakang pendidikan dan juga organisasi lain diluar kegiatan sebagai wartawan di Riau Pos.

kewartawanan yang wajib diikuti oleh para wartawan di Indonesia sampai tahun 1999 dari tahun berdirinya 1946.

Rutinitas media juga menjadi faktor penentu akan bagaimana berita karhutla yang dihasilkan. Pada level ini, peran penting dibawa oleh editor dan juga redaktur pelaksana bagaimana mengemas isu karhutla yang akan disajikan. Dalam hal ini seperti pada ulasan sub bab sebelumnya, bagaimana proses editing yang dilakukan oleh editor Riau Pos ternyata hanya pada level perubahan judul dan meminimalkan jumlah kata agar tidak mengambil jumlah halaman iklan yang sudah disiapkan. Rutinitas media yang seperti itu berpengaruh juga kepada bagaimana para jurnalis yang bertugas meliput kasus karhutla. Dari hasil penelusuran yang dilakukan peneliti selama mengikuti peliputan bersama wartawan Riau Pos, peliputan yang dilakukan bukan ternyata sangat dimudahkan dengan adanya *e-mail* dan *mobile phone*. Dengan kecanggihan teknologi yang ada sangat memudahkan para wartawan untuk menjadikan persoalan karhutla menjadi sangat sederhana.

Dari pengamatan, ditemukan bahwa para wartawan mendapat data peliputan hanya dengan menunggu *email* yang dikirim dari wartawan lain juga bertugas pada posko yang sama. Dengan begitu, praktik jurnalisisme lingkungan yang dilakukan tidak harus melalui wawancara langsung dengan narasumber, mengikuti konferensi pers, apalagi sampai observasi langsung ke lapangan itu menjadi hal yang sangat sulit. Seperti yang dikatakan oleh Desriandi koordinator liputan, bahwa kasus karhutla akan benar-benar mendapat perhatian baik dari segi peliputan maupun penyajiannya dalam surat kabar ketika karhutla sudah menimbulkan kabut asap dan dampak yang tidak dalam kelas lokal lagi.

Pernyataan tersebut tentu menggambarkan setidaknya bagaimana level *media routine* yang ada pada redaksi Riau Pos. Ditambah lagi dengan *deadline* yang memburu pekerjaan para wartawan yang dalam sehari harus mengumpulkan enam berita termasuk berita karhutla. Menjadikan media dan juga para jurnalis bekerja seadanya saja, asal berita tersebut ada dan naik cetak. Apa yang dikerjakan oleh jurnalis lingkungan terlihat hanya sekedar rutinitas normal jurnalisisme. Hal tersebut juga sudah dijabarkan dari bagaimana para editor yang

hanya mengecek dan merubah judul, kemudian menggunakan foto yang sama pada pemberitaan karhutla yang berbeda. Tidak hanya itu, level *external media* juga sangat berpengaruh pada pemberitaan karhutla yang dimuat oleh media. Menurut Shoemaker dan Reese, terdapat lima faktor di luar organisasi media yang bisa mempengaruhi isi media yaitu, sumber berita, iklan dan pelanggan, kontrol pemerintah, pasar, dan teknologi. Dalam level tersebut teknologi sangat berpengaruh pada perolehan sumber data yang hanya melalui *email* saja. Iklan dan pelanggan juga menjadi faktor penentu bagaimana angle yang dipilih oleh media dalam memberitakan kasus karhutla selama ini. Pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh Woro ketika berdiskusi langsung tentang bagaimana berita-berita karhutla yang ada di media lokal saat ini. Menurutnya:

“Kita juga perlu lihat *positioning* media lokal di Riau ini, sebelum 2014 mereka sering jading corongnya perusahaan yang beriklan kayak RAPP missal perusahaan in melakukan pemadaman gitu, tetapi karena 2015 parah dan *concern* bahwa ini persoalan yang penting akhirnya suara NGO mulai di akomodir, tapi belum jadi garis ideologinya media jelaslahya. Kecenderungan media lokal itukan bisnis, jadi ya lebih banyak RAPP yang diberitakan¹⁰” (Woro Supartinah, wawancara 9 Januari 2017)

Kemudian sumber berita yang didapatkan juga banyak terpengaruh pada kepentingan pemerintah dalam kepentingannya. Kepentingannya yaitu bagaimana menjadi *media darling* yang selalu menjadi rujukan utama bagi media besar di Riau. Menjadi *media darling* dari media besar merupakan keuntungan besar bagi mereka (Sudiby, 2014: 48). Terbukti dengan pemberitaan karhutla pada tanggal 12, 13, dan 15 Januari yang banyak menggunakan sumber data dari BPBD, Lanud, dan lembaga restorasi gambut. Seperti yang dilihat oleh Woro sebagai aktivis yang berpihak pada penyelamatan hutan Riau:

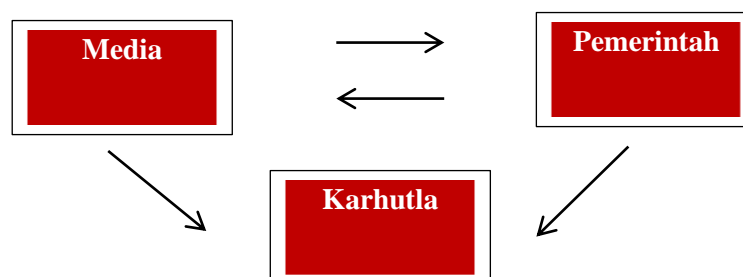
“Di lapangan ya kayak gitu, cuma soal memadamkan saja. kita taulah yang mereka sampaikan ya yang baik baik aja, kayak BPBD itu. kalau mereka mengkritik ya menguliti dirinya sendiri, contohnya ya perusahaan yang sampai bebas. Ini sebetulnya identik soal konflik lahan lain

¹⁰ RAPP adalah perusahaan atau industri yang bergerak di dalam bidang produk pulp (bubur kertas) RAPP merupakan singkatan dari Riau Andalan Pulp and Paper yang terbesar di Asia. RAPP merupakan anak perusahaan APRIL grup yang memimpin pulp and paper di dunia. RAPP banyak beriklan di Riau Pos dan memiliki halaman *advertorial* sendiri termasuk dalam Riaupos.co. (wawancara 9 Januari 2017)

seperti pemilikan lahan, *illegal logging*, seperti itu”(Woro Supartinah, wawancara 9 Januari 2017)

Jurnalis Riau Pos rupanya menjalankan tugas peliputan dengan memposisikan diri sebagai pelaku media. Ketika menjadi pelaku media, maka tujuan utama peliputan berita karhutla yang dilakukan adalah membuat berita karhutla sebagai komoditas atau sebuah produk yang akan dikonsumsi. Menurut Ana Nadhya Abrar Jurnalis sebagai pelaku media akan melakukan fungsi utama yang akan berorientasi dengan kepentingan medianya, yaitu melihat khalayak sebagai konsumen untuk komoditas produknya. Sedangkan, di posisi lain seorang jurnalis juga harus menjalankan fungsi sosialnya sebagai tanggung jawab secara tidak tertulis kepada khalayak atau publiknya. Fungsi yang dijalankan, akan menentukan bagaimana berita lingkungan yang dihasilkan (Abrar, 2015:31).

Jurnalis Riau Pos memproduksi berita karhutla berdasarkan apa yang menjadi kepentingan redaksi, sebab akan sulit memberitakan tentang karhutla ketika hal tersebut tidak dianggap layak dan penting untuk diberitakan oleh redaksi. Jika peneliti melihat proses pemberitaan karhutla, maka peneliti menemukan pola yang mempengaruhi produksi berita karhutla di Riau Pos yaitu:



Bagan 4.7 Pola interaksi pemberitaan karhutla di Riau Pos
(Sumber: anlisa peneliti)

Dalam pola ini menggambarkan bagaimana adanya hubungan saling menguntungkan antara kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap aksi yang dilakukan oleh pemerintah tentang kasus karhutla. Pola ini juga menunjukkan bagaimana Riau Pos menjadi satu-satunya media yang mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Riau atas peran serta dalam mendukung operasi siaga dalam penanggulangan bencana asap akibat karhutla pada 2016

(sumber:Riau Pos). Peran serta mendukung operasi siaga yang dilakukan oleh Riau Pos tentunya tidak terlepas dari pemberitaan yang dilakukan selama ini. Pemberitaan yang seperti apa? Tentu saja yang memihak kepada pemerintah.

Pemerintah Riau seperti BPBD, Lanud dan lembaga lainnya seperti sudah menjadi media darling dalam bencana karhutla ini. Ketika mereka melakukan pencegahan dan pemadaman api dilapangan, tentunya yang diinginkan oleh pemerintah adalah kinerjanya yang disoroti dan diexpose oleh media besar di Riau yaitu Riau Pos. Dari sini, kebijakan media yang mengutamakan asal ada berita naik, maka menjadi jalan masuk bagi para pemerintah yang ingin mencari muka dalam kasus karhutla. Kesempatan tersebut juga saling dimanfaatkan oleh media untuk menjadi anak “manis” atau kesayangan pemerintah. Sehingga, tidak heran ketika Riau Pos menjadi satu-satunya media yang mendapat penghargaan dari pemerintah itu sendiri.

Tidak heran jika sumber elit merupakan sumber primer bagi para jurnalis dalam menulis berita karhutla. Button juga cenderung melihat bahwa media tergantung pada pernyataan resmi dan ahli yang hal tersebut untuk membedakan antara pengetahuan profesional dan awam (Button, 2002:157). Praktik jurnalisme lingkungan yang dilakukan Riau Pos berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayan Sakti Suryandaru (2015) pada wartawan Madura di mana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa wartawan Madura banyak menggunakan sumber data observasi dengan resiko besar yang menghasilkan data mentah. Sehingga berita yang dihasilkan juga terpaku pada data deskriptif yang menjelaskan dampak dari konflik migas di Madura. Media Riau Pos berbeda, sumber data utama ialah yang berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh sumber terpercaya menurut mereka. Sumber terpercaya adalah mereka yang memberi informasi terlebih dulu, tidak lain adalah elit pemerintahan. Tidak etis memang ketika kasus karhutla hanya bercerita soal realitas di lapangan tanpa ada kutipan dari elit birokrasi atau narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Namun, yang ada selama pada pemberitaan di Riau Pos ialah bagaimana narasi dari sumber yang memiliki kredibilitas tersebut kemudian disajikan secara mentah juga, tanpa adanya analisis dan sintesis yang sesuai dengan jurnalisme lingkungan

seharusnya. Olehnya, sedikit sulit bagi media lokal untuk mengembangkan praktik jurnalisme lingkungan agar bermanfaat bagi pembacanya. Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh ahli lingkungan yang tergabung dalam LSM Jikalahari:

....Kalau media nasional malah lebih bagus menurut saya, dari pada lokal masih sangat sulit. Mereka selama ini memang tergantung isu naik, kalo ada isu yang naik baru di angkat. Sumber terdekat mereka kan media cetak nih, jadi kalo ada persoalan besar itu kadang baru diangkat sama media, dan publik juga akhirnya kan mencoba mencari tahu gitu. Aku pikir media tu tergantung sekali sama sumber berita, jurnalis investigasi yang sangat kurang diterapkan, saya juga ga tau ideologi perusahaan media seperti apa, si redaktornya seperti apa mereka. Kalau ada *presscon* baru mereka kejar, dan itu kan dangkal, hanya menyajikan informasi tidak menyajikan satu konstruksi persoalan saja, tidak menggigit, itu mungkin yang akhirnya menjadikan publik cuma tau sampai disitu saja.... (Woro Supartinah, wawancara 9 Januari 2017)

Jurnalis dan organisasi medianya menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari persoalan karhutla tersebut. Karena miskin data dan tidak ada riset yang mendalam sehingga kritisisme dan ketajaman menganalisis suatu permasalahan lingkungan hidup tidak konsisten. Ada beberapa kemungkinan lagi mengapa jurnalis dan media cenderung mengerjakan persoalan lingkungan sama halnya dengan menggarap berita populer lainnya dan terkesan asal ada berita. Yaitu persoalan kompensasi atau penghargaan yang diberikan oleh media kepada para pekerjanya. Yang hal tersebut menurut Hary sangat berpengaruh kepada kinerja mereka dalam meliput dan membuat berita.

“Sangat berpengaruh, bahkan gajipun telat dibayar, bonus tahunan tak di bayar, tunjangan banyak di potong, uang bantuan komunikasi, dan itu semua karyawan bukan hanya wartawan, sekitar satu tahun ini” (Hary B Koriun, wawancara 4 Januari 2017)

Praktiknya, keterlambatan gaji yang ada di media akan berpengaruh kepada bagaimana berita lingkungan yang disajikan oleh media. Tidak mudah menjalankan tugas peliputan dengan memikirkan kurangnya komisi yang didapatkannya. Lalu, permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah bagaimana sikap media dalam melihat permasalahan karhutla tersebut. Riau Pos pada praktiknya, tidak memuat persoalan yang menahun tersebut menjadi topik

utama yang dimuat dalam tajuk rencana. Bagaimana bisa ketika kasus lingkungan yang terulang tersebut kembali muncul namun tidak menjadi bahan evaluasi dan diskusi bersama dalam editorial surat kabar. Ini juga diungkapkan oleh Hary bagaimana kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh redaksi dalam menyikapi persoalan pemberitaan karhutla. Menurutny:

“Evaluasi berita dan orang yang mengerjakan berita itu tidak ada di sini, tidak hanya karhutla, semuanya. Susah juga bukan dari isinya aja ya, tapi yang buat juga. Gak ada *maintenance*” (Hary B Koriun, wawancara 4 Januari 2017)

Jika dalam media tidak bisa memberi perhatian pada persoalan lingkungan, paling tidak pemberitaan yang dilakukan oleh media harus ada unsur advokasi yang memihak kepada keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh Sudibyso sebagaimana tujuan dari jurnalisme lingkungan itu sendiri yaitu: (a) Membantu masyarakat untuk mendapatkan kesadaran sosial atas apa yang sedang terjadi terhadap lingkungan mereka, (b) Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk memutuskan sikap, (c) Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan bertindak dalam pelestarian lingkungan hidup, (d) Menekan pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan informasi lingkungan hidup sebagai landasan tindakan dan kebijakan yang di ambil, (e) Memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR tentang pelestarian lingkungan atau pengendalian praktik-praktik yang merusak lingkungan (Sudibyso, 2014: 8). Sehingga, di sini sangat perlu bagi sebuah media untuk selalu melakukan perbaikan dalam melakukan pemberitaan permasalahan lingkungan hidup. Sebab tidak sekali atau dua kali saja karhutla ini terjadi di Riau, lalu akankah hanya berulang saja cara Riau Pos memberitakannya. Apalagi tidak diiringi dengan sikap yang nampak yaitu dari setiap pembuatan tajuk rencana yang menyoal Karhutla.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos terkait dengan pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi awal tahun 2017. Temuan lainnya juga menjawab faktor apa saja yang menghambat dan mempengaruhi proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos tentang berita karhutla tersebut. Dari hasil wawancara, pengamatan langsung peneliti, dokumentasi, hingga mengkaji literatur, maka beberapa temuan akan proses jurnalisme lingkungan hidup di Riau Pos tentang pemberitaan karhutla adalah sebagai berikut.

Pada proses perencanaan di ruang redaksi, isu karhutla tidak selamanya akan menjadi *listing* atau daftar tema yang harus diliput. Seperti temuan peneliti bahwa beberapa wartawan melakukan peliputan karhutla bukan berasal dari penugasan. Hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian dari wartawan Riau Pos untuk menjadikan karhutla sebagai permasalahan yang perlu untuk diangkat kembali ketika muncul. Sayangnya, hal tersebut tidak didukung dengan *skill* mengumpulkan dan mengolah data. Jurnalis Riau Pos tidak ada yang melakukan riset terlebih dahulu ketika melakukan peliputan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber saja. Mestinya, kasus lingkungan hidup yang berulang dapat dipelajari kembali atau dengan istilah riset dan studi dokumen dari berita-berita karhutla sebelumnya.

Perihal tersebut terkendala lagi dengan peletakan halaman karhutla yang menempati posisi koran tiga atau koran dalam. Dari sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa keberpihakan kepada lingkungan hidup ditunjukkan oleh jurnalis Riau Pos dalam memilih isu yang diliput, namun tidak dengan editor atau redaktur pelaksana yang menganggap karhutla penting untuk dikaji lebih dalam ketika sudah menjadi isu nasional dan memberi dampak yang juga signifikan atau seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Maka benar bahwa peliputan dan penurunan berita lingkungan hidup di surat kabar akan lebih sering terhambat oleh

kendala internal. Wartawan hanya bertanggung jawab pada peliputan hingga penulisan saja, sisanya keputusan tentang naik cetak berita karhutla tetap menjadi hak redaktur. Artinya, berita tersebut dikatakan penting namun ketika redaktur memutuskan untuk diletakkan pada halaman dalam maka berita lain yang menjadi lebih penting dari persoalan karhutla tersebut.

Pencarian informasi oleh wartawan utamanya mengandalkan pendapat para elit atau pejabat daerah seperti komandan militer dan Panglima kodam. Pemilihan narasumber mengindikasikan pemahaman yang lebih mengenai persoalan karhutla. Narasumber elitis dianggap sebagai sumber yang lebih memiliki keabsahan dalam pendapatnya untuk diberitakan. Observasi di lapangan menjadi proses yang tidak akan dilakukan ketika sudah ada sumber terpercaya yang mengirimkan rilis dan menggelar konferensi pers. Hal ini ditentukan juga dengan latar belakang para jurnalis akan pengetahuan ilmiah tentang lingkungan hidup. Juga, tidak adanya pelatihan khusus dari Riau Pos untuk penulisan berita-berita khusus termasuk persoalan lingkungan hidup. Banyak juga dari para jurnalis yang tidak tergabung dalam organisasi profesional jurnalis seperti PWI maupun AJI.

Kemudian, secara teknis penulisan berita lingkungan hidup yang dilakukan menunjukkan adanya kesepakatan mengenai kelengkapan 5w+1h, nilai berita seperti *proximity*, aktualitas, konsekuensi, konflik, dan *human interest*. Sandaran objektivitas dan verifikasi akan fakta juga dipenuhi dalam penulisan berita karhutla. Hal ini yang diakui bersama bahwa Riau Pos menerapkan jurnalisme akomodatif yang akan selalu memberi ruang pemberitaan bagi siapa saja yang terlibat dalam persoalan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa dalam praktik jurnalisme lingkungan berbeda dengan penulisan berita umum lainnya. Jurnalisme lingkungan merupakan perspektif khusus dalam penulisan berita yang membutuhkan verifikasi tinggi dengan benar-benar mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Objektivitas yang dikatakan sebagai jurnalisme akomodatif juga berbeda ketika diterapkan pada jurnalisme lingkungan, yang membutuhkan keberpihakan dimana hal itu berbeda dengan etika jurnalistik yang independen, proporsional,

dan tidak berpihak. Sehingga, tantangan yang sebenarnya dihadapi dalam penulisan berita lingkungan oleh jurnalis Riau Pos ialah bagaimana menjunjung tinggi etika jurnalistik namun tetap berpihak kepada upaya penyelamatan lingkungan hidup, mengarahkan kepada kemaslahatan publik, dan memenuhi standar kerja jurnalistik yang ada. Nyatanya, cara akomodatif tersebut malah menjebak media untuk menutupi kesalahan pengiklan yang terlibat kasus pembakaran, yang tetap diberitakan namun dengan *image* yang berbeda dari yang seharusnya. Selama ini surat kabar lokal di Riau khususnya Riau Pos masih menjadi corong utama pemerintah juga perusahaan pengiklan dalam pemberitaan karhutla.

Penelitian ini menganalisis berita awal dari jurnalis hingga akhirnya suatu berita karhutla di publikasikan. Yang pada analisisnya, peneliti menemukan bahwa proses penyuntingan masih menjadi kendala dalam produksi berita lingkungan hidup di Riau Pos. Penyuntingan berita hanya perihal redaksional, untuk mengganti judul dan pengurangan jumlah paragraf agar sesuai dengan *layout* yang sudah dirancang oleh halaman perwajahan. Sedangkan untuk perihal substantif tidak ada yang berubah sedikitpun dari berita awal hingga berita naik cetak, hingga pada proses evaluasi diketahui bahwa berita yang naik cetak sama sekali tidak membahas kejadian detail di lokasi kebakaran. Kelemahan *editing* tersebut diidentifikasi oleh peneliti sebagai sebuah kendala dari proses produksi berita lingkungan yang dilakukan oleh Riau Pos.

Praktiknya, proses peliputan dan publikasi berita lingkungan yang secara deskriptif masih menjadi kebiasaan umum dalam praktik di Riau Pos. Proses jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan Riau Pos masih terbelang belum optimal. Artinya, masih ada kendala yang menjadikan berita karhutla yang dipublikasikan hanya sebatas pada penyampaian yang informatif saja. Berita karhutla yang dibuat sebatas isi kutipan langsung dan tidak langsung dari pendapat narasumber yang diuraikan. Sehingga, tidak ada isi berita yang menjabarkan permasalahan dari karhutla yang terus terjadi tersebut dan menjadi inti dari persoalan lingkungan hidup. Deskripsi soal konsekuensi selalu menjadi cerita utama dalam berita karhutla. Berita lingkungan yang seharusnya mampu

memberikan pengetahuan dan menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, nyatanya hanya sekedar informasi yang cukup untuk diketahui saja. Berita-berita dangkal dan minim analisa masih lebih sering diterapkan dalam penulisan dan penyuntingannya.

Selama penelitian ini berlangsung, tidak ada proyeksi khusus mengenai editorial atau tajuk tentang kasus karhutla dari Riau Pos. Dari sini dapat dijadikan indikasi konfirmatif bahwa kurangnya perhatian media akan kasus lingkungan hidup. Bahkan, ketika kasus lingkungan hidup tersebut hanya terjadi di daerah, koran lokal justru tidak memberikan suaranya kepada persoalan ini. Apa yang menjadi suara media akan terlihat dari apa yang menjadi topik utama di halaman satu. Kemudian editorialnya akan mengikuti sesuai dengan topik utama tersebut. Isu yang menjadi pembahasan pada koran nasional atau media nasional lebih dipilih untuk menjadi tajuk rencana pada halaman opini.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, masih banyak yang perlu dilakukan dalam proses jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan oleh Riau Pos agar bisa lebih optimal. Olehnya beberapa saran dan rekomendasi diberikan dalam penelitian ini, baik untuk redaksi Riau Pos, praktisi jurnalisme lingkungan hidup lain, maupun akademisi. *Pertama*, berita karhutla yang disajikan oleh Riau Pos masih sebatas pada penyajian kutipan dari narasumber saja, berita lingkungan khususnya karhutla akan lebih optimal jika disajikan dengan analisis yang dalam dan juga tidak hanya bersumber dari elit pemerintahan saja melainkan dari pihak masyarakat terdampak juga agar lebih mengerti tentang kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar mereka. *Kedua*, bagi akademisi yang hendak meneliti tema proses jurnalisme lingkungan hidup, masih banyak persoalan lingkungan hidup yang bisa dikaji lebih dalam lagi, bagaimana cara peliputan dan juga penyajiannya di redaksi. *Ketiga*, penelitian ini hanya menyajikan data secara deskriptif sehingga masih banyak metode lain dalam mencari dan mengolah data di lapangan agar lebih kompleks dengan mengaitkan sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya dari media yang memproduksi teks berita lingkungan hidup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- _____. 1995. *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- _____. 2005. *Penulisan Berita*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- _____. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 2015. *Tata Kelola Jurnalisme Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 1992. *Pers Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Assegaff, Dja'far. 1983. *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Atmakusumah, et. al. 1996. *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Button,G.V. 1999. *The Negotiation of Disaster: the Media Response to Oil Spills in GreatBritain, dalam A Oliver Smith & S.M Hoffman (Eds), The Angry Earth. Disaster in Anthropological Perspective*, New York and London:Routledge.
- Campbell, M. 1999. *A Content Analysis of Environmental Reporting in Time and New York Times, 1991 and 1992*. Master thesis. Grahamstown:Rhode University

- Cox, Robert. 2010. *Environmental Communication And The Public Sphere (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2009. *The Sage handbook of qualitative research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Stein, M.L. 1988. *Bagaimana Menjadi Wartawan*. Bina Aksara, IKAPI
- Detjen, J., Fico, F., Lie X., 2000. *Changing Work Environment of environmental reporters*. Newspaper research Journal. Vol. 21
- Djuroto, Totok. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang
- Ermanto. 2005. *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*. Yogyakarta : Cinta Pena
- Fink, Conrad C. 1998. *Strategic Newspaper Management*. New York : Random House.
- Garst, Robert E & Bernstein, Theodore M. 1982. *Headlines and Deadlines*. New York: Columbia University.
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Itule, Bruce., & Anderson, Douglas A. 1987. *News Writing And Reporting For Today's Media*. New York: Random House
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. 2001. *The elements of journalism. What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Crown.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Luwarso, Lukas & Gati Gayatri. 2006. *Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*. Dewan Pers, Kementrian Komunikasi dan Informasi

- McQuail, Dennis. 2000. *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publications
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : P.T Rosda Karya
- Pape, Susan & Featherstone, Sue. 2005. *Newspaper Journalism*. London: Sage Publication
- Rolnicki, T. E., Tate, C. D., & Taylor, S. A. 2015. *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*. Edited by Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.
- Santana, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Shoemaker, Pamela Reese (eds). 1996. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. London: Longman Group
- SK, Ishadi. 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta : Penerbit Kompas.
- Siregar, A. 1998. *Bagaimana meliput dan menulis berita untuk media massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudibyo, Agus. 2014. *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan*. Jakarta : Gramedia
- Tebbel, John. 2000. *Karier Jurnalistik*. Semarang: Dahara Prize

Jurnal dan Penelitian

- Ayu Puspita Sari. 2014. *Problem Jurnalis Lingkungan di SKH Riau Pos (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Jurnalis SKH Riau Pos dalam Pemberitaan Seputar Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau)*. Universitas Atmajaya
- Dwi Pela Agustina. 2016. *Proses Jurnalisme Lingkungan Hidup di Media Online (Studi Deskriptif Terhadap Kontributor Lingkungan Hidup di Situs www.mongabay.co.id Tahun 2015)*. Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada
- Hanitzsch, T. (2005). "Journalist in Indonesia: Educated but Timed Watchdogs." *Journalism Studies*, Volume 6, Nomor 4, 2005, pp. 493-508
- Hanitzsch, T. (2006). "Mapping Journalisme Culture: Teoritical Taxonomy and Case Studies from Indonesia." *Asian Journal of Communication*. Vol. 16, No. 2, Juni 2006. Pp 169-186
- Joel Simon. 2009. *Unnatural Disaster*;

- The Crisis of Environmental Journalism*. Sage Publication: World Policy Journal
- Kaheru, H. 2005. *An Analysis of the Views of Journalist and Governments Official Regarding the Impact of New Vision's Coverage of the Bakivibo Channel Rehabilitation Project*, Master Thesis Rhode University. 32
- Lowe, J., Morrison, P. 1984. *Reframing Public Relation: New Direction for Theory and Practice*. *Australian Journal of Communication*, Vol.24 (2), 17-32
- Mochamad Nuryadi. 2004. *Penerapan Jurnalisme Lingkungan pada Pemberitaan Lingkungan Hidup di Surat Kabar; Studi Kasus Kepedulian Surat Kabar terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup, Khususnya Permasalahan Air*. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia
- Mustafa K. Anuar. 2012. *Reporting the Environment Human Rights, Development and Journalism in Malaysia*. Sage Publications
- Nurul Farida Rachmawati; Dyah Netty Kurniasari; Rosmini Retno Haris Susmiyati. 2008. *Madura di Mata Media : Analisis Wacana Kritis Terhadap Representasi Carok Sebagai Identitas Kultural Madura Dalam Radar Madura Jawa Pos : Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo.
- Putri Aisyiah Rachma Dewi. 2011. *Praktik Jurnalisme Lingkungan oleh Harian Jawa Pos*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Shindawani, Trilok N. 1979. *Newspaper Economics and Management*. New Delhi : Ankur Publishing House.
- Samir S. Patel. 2006. *'Islands of understanding': Environmental journalism in the South Pacific*. Environmental Journalist, New York
- Wiebke Rögener and Holger Wormer. 2015. *Defining criteria for good environmental journalism and testing their applicability: An environmental news review as a first step to more evidence based environmental science reporting*. TU Dortmund University, Germany
- Yayan Sakti Suryandaru. 2015. *Jurnalisme Isu Eksplorasi Migas di Madura; Analisis dengan pendekatan Ekonomi - Politik Media*. Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Situs Online

<https://nasional.tempo.co-kematian-akibat-kebakaran-hutan-2015> diakses pada 7/12/2016- 22:14

<http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/cerita-akhir-tahun-2016/> diakses pada 30 Januari 2017

www. Tribun.com/ diakses pada 12 Maret 2017

LAMPIRAN

Panduan Wawancara untuk Jurnalis Riau Pos

I. Identitas Informan

1. Siapakah nama anda?
2. Dimana anda berdomisili?
3. Apa latar Belakang Pendidikan Anda? (terakhir sekolah atau kuliah di jurusan apa?)
4. Sudah berapa lama bekerja sebagai wartawan di Riau Pos?
5. Selain di Riau Pos apa pekerjaan atau kegiatan anda? (organisasi atau komunitas apa ada tergabung?)
6. Apa posisi atau jabatan anda di Riau Pos ?
7. Di posko apa anda bertugas?

II. Pertanyaan Untuk Pemberitaan (Pesawat Tempur Pantau Hotspot 13/1/2017)

1. Apakah anda pernah menempati *desk* lingkungan hidup? Jika iya, pernahkah menulis tentang kasus kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi pada 2016 hingga 2017?
2. Tahun berapa kasus karhutla yang sangat krusial untuk di beritakan?
3. Apakah anda pernah tergabung dalam gerakan lingkungan apa yang pernah anda lakukan?
4. Apakah ada latar belakang yang berkaitan dengan komunikasi, jurnalisme, pembangunan ataukah mengenai jurnalisme kebijakan?
5. Menurut anda apa perbedaan yang mendasar antara jurnalis lingkungan dengan jurnalis lainnya?
6. Bagaimana etika dalam menulis berita lingkungan? Apakah sama dengan etika jurnalisme pada umumnya?
7. Apa kendala anda dalam menulis berita karhutla yang selalu terulang setiap tahunnya?

8. Apa yang anda lakukan jika sulit mendapatkan fakta atau menemui narasumber? Apakah wawancara yang dilakukan secara langsung ataukah via telephone atau email?
9. Jika sudah ditulis, bagaimana anda melaporkan berita tersebut ke atasan anda selaku editor? Apakah ada perbedaan tulisan anda dengan yang diterbitkan editor?
10. Jika ada, apakah dari aspek isi berita atau sekedar penulisan saja?
11. Apakah *Beat* karhutla dalam menulis berita lingkungan hidup yang akan anda tulis ditugaskan oleh editor atau anda yang memilihnya sendiri?
12. Berita karhutla seperti apa yang sering ditugaskan kepada anda?
13. Apakah sebelum liputan anda pernah melakukan riset terlebih dahulu?
14. Dalam menulis berita karhutla yang berjudul “pesawat tempur pantau hotspot” dari mana sumber informasi utama anda?
15. Apakah dalam peliputan anda melakukan observasi lapangan secara langsung?
16. Apakah anda pernah menggunakan data dari *press realese* atau *press conference*? Bagaimana mengembangkan data dari sumber tersebut?
17. Bagaimana anda melihat kasus karhutla yang terjadi?, lalu bagian apa yang paling sering anda beritakan, baik itu perintah redpel maupun liputan anda sendiri?
18. Angle seperti apa yang menurut anda cukup menawarkan solusi bagi kasus tersebut?
19. Apakah berita karhutla yang anda buat tersebut pernah mendapat komplain dari pihak redaksi atau tidak naik cetak ? jika iya, karena hal apa?
20. Nilai berita apa yang sering ditonjolkan dalam pemberitaan karhutla khususnya dalam berita “pesawat tempur pantau hotspot 13/1/2017” tersebut?

Pertanyaan 5W+1H?

1. Menurut anda, apakah setiap berita harus menjawab pertanyaan 5W+1H?

2. Jika tidak, mengapa? Apakah sebagian dari pertanyaan tersebut sudah dapat mewakili berita yang anda tulis?
3. Jika iya, apakah berita lingkungan hidup harus di tulis secara komprehensif dengan menjawab semua pertanyaan tersebut?

Mem-Framing Berita

Framing berita ditujukan agar pembaca dapat menangkap wacana sesuai dengan yang diharapkan oleh anda. Pertanyaan yang muncul ialah:

1. *Defining Problem.* Bagaimana cara anda mendefinisikan masalah yang sudah anda amati? Apakah anda mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang berlaku umum?
2. *Diagnosing Causes.* Bagaimana anda mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam permasalahan tersebut? (Contohnya terkait liputan yang pernah anda lakukan)
3. *Making moral judgement.* Bagaimana anda melakukan penilaian moral terhadap berita yang akan anda buat? Semisal efek dari berita yang dibuat?
4. *Suggesting remedies.* Apakah anda selalu memberikan solusi dari setiap berita yang anda buat? Bagaimana cara anda melakukannya?
6. Bagaimana cara anda agar bersikap objektif dalam mem-*framing* berita? Dalam artian tidak terpengaruh dengan subjektivitas anda? Atau justru apakah menurut anda subyektifitas anda secara otomatis akan muncul dengan sendirinya ketika hendak menulis berita? Jika iya, mengapa?
7. Pernahkah *Framing* yang anda lakukan dapat berubah sesuai dengan *framing* yang dikehendaki oleh Editor anda? Jika pernah bagaimana menurut anda?

Panduan wawancara untuk Pemimpin Redaksi Riau Pos

1. Bagaimana *controlling* terhadap proses pemberitaan di redaksi?
2. Arah liputan karhutla di Riau Pos sendiri seperti apa, bagaimana hubungan dengan visi misinya?
3. Bagaimana dengan rapat redaksi soal kasus karhutla yang terjadi tiap tahun ini, adakah *treatment* khusus?
4. Apa tujuan utama rubrik FOR US di dirikan? Apa memang Riau Pos mau menunjukkan sebagai media yang peduli lingkungan?
5. Bagaimana dengan perusahaan yang terlibat kasus karhutla yang juga memasang iklan di Riau Pos?
6. Dari sisi apa berita karhutla yang paling dibutuhkan pasar menurut Riau Pos?
7. Bagaimana tindakan pengawasan oleh pemred dalam hal *publishing*?
8. Problem penulisan di Riau Pos ini apa?
9. Bagaimana dengan pelatihan Pendidikan wartawan?
10. Prioritas berita karhutla?

Panduan Wawancara untuk Redaktur

1. Berita karhutla seperti apa yang sering dijadikan *headline*?
2. Nilai berita karhutla seperti apa yang sering ditonjolkan dalam pemberitaan?
3. Adakah kendala di sistem kerja peliputan karhutla?
4. Sebagai Redpel bagaimana menentukan dan melihat berita karhutla yang baik itu seperti apa?
5. Bagaimana ketika perusahaan pembakar hutan memasang iklan di sini? bagaimana *treatmentnya*?
6. Kesulitan memberitakan kasus karhutla ini apa?
7. Pengecekan Akurasi berita seperti apa?
8. Bagaimana pemilihan *headline* soal karhutla yang menarik?
9. Untuk evaluasi beritanya bagaimana?
10. Bagaimana dengan proyeksi untuk berita karhutla?

11. Proses *editing* yang dilakukan bagaimana?
12. Adakah perlakuan khusus dari Riau Pos untuk berita karhutla?
13. Bagaimana peran Riau Pos dalam menyajikan berita karhutla yang diinginkan masyarakat?
14. Bagaimana pengambilan keputusan berita karhutla?
15. Judul karhutla menarik itu yang gimana?
16. Bagaimana dengan perusahaan pembakar yang beriklan di Riau Pos?
17. Apakah pemred pernah mengusulkan berita karhutla yang dia mau?
18. Permasalahan dari pemberitaan karhutla ini apa?
19. Objektivitas yang ada terkait perusahaan pembakar yang merupakan pengiklan?
20. Pernahkah berita di For Us dibuat tidak sesuai TOR yang ada oleh wartawan?